GENOSIDA GAZA 2023

Memahami Realitas dan Mengambil Sikap

Ringkasan buku

Tahun 2023 menandai 75 tahun penjajahan Israel atas Palestina. Kekerasan yang terjadi sejak tanggal 7 Oktober 2023 telah menyebabkan jatuhnya ribuan korban penduduk sipil di Gaza. Serangan demi serangan dilakukan oleh Israel tanpa mengindahkan peringatan, desakan, dan hukum internasional yang menjadikan kekerasan yang dilakukan oleh Israel layak untuk disebut sebagai sebuah gerakan 'genosida'.

Buku 'Genosida Gaza 2023: Memahami Realitas dan Mengambil Sikap" mencoba untuk menangkap dan mengulas berbagai fenomena yang terjadi sejak genosida yang tejadi pada tanggal 7 Oktober 2023 yang meliputi manuver dan strategi Israel, krisis Zionisme, kejahatan perang Israel, peran negara-negara Islam dalam penyelesaian konflik, gejolak publik di dunia maya, serta menjelaskan bagaimana posisi penulis dalam menyikapi fenomena tersebut.

Tentang INSIERA

Insiera didirikan pada hari Jumat 12 Februari 2016 oleh para akademisi dari tujuh universitas Islam di Indonesia, yakni UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Sunan Ampel Surabaya, Universitas Islam Indonesia, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Abdurrab Riau, dan Universitas Darussalam Gontor Ponorogo.

Kajian hubungan internasional dalam tradisi Islam sangatlah kaya. Islam sebagai fokus kajian juga telah menjadi tren dan kebutuhan dalam Kajian Hubungan Internasional masa kini. Insiera bermaksud menggali lebih dalam hubungan dan kontribusi studi keislaman (dirasah Islamiyyah) terhadap Hubungan Internasional. Selain itu, Insiera juga terus menyebarkan nilai-nilai dan perspektif Islam dalam studi Hubungan Internasional di Indonesia.

ISBN 978-623-236-384-7

PUSTAKA PELAJAR
Penerbit Pustaka Pelajar
Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta 55167
Telp. (0274) 381542, Faks. (0274) 383083
e-mail:pustakapelajar@yahoo.com
website:pustakapelajar.co.id

insiera

GENOSIDA GAZA 2023

Memahami Realitas dan Mengambil Sikap

| Fajri M.Muhammadin | Hadza M.F. Robby | Hasbi Aswar | Khairul Munzilin
| M. Rezky Utama | Pizaro G. Idrus | Prihandono Wibowo | Ramdhan Muhaimin
| Rizki Damayanti | Rizki D. Nursita | Rizky Hikmawan| Rizki R. Nurika
| Unis Sagena |

GENOSIDA GAZA 2023

Memahami Realitas dan Mengambil Sikap

GENOSIDA GAZA 2023

Memahami Realitas dan Mengambil Sikap

GENOSIDA GAZA 2023

Memahami Realitas dan Mengambil Sikap

Tim Penulis

Fajri Matahati Muhammadin., Hadza Min Fadhli Robby
Hasbi Aswar, Khairul Munzilin, Mohamad Rezky Utama
Pizaro Gozali Idrus, Prihandono Wibowo, Ramdhan
Muhaimin, Rizki Damayanti, Rizki Dian Nursita
Rizky Hikmawan, Rizki Rahmadini Nurika
Unis Sagena

Desain Cover
Si Fulan

Tata Letak
Dimaswids

Cetakan I, Desember 2023

PENERBIT
PUSTAKA PELAJAR
Celebah Timur UH. III/548 Yogyakarta 55167
Telp. (0274) 381 542, Faks. (0274) 383083
E-Mail: pustakapelajar@yahoo.com
Website: pustakapelajar.co.id

ISBN: Insya Allah, Proses

SAMBUTAN

The Indonesian Islamic Studies and International Relations Association (INSIERA)

Konflik dan perang adalah tragedi dalam kehidupan manusia terlebih hubungan antar negara. Salah satu tujuan dan ide dasar lahirnya Ilmu Hubungan Internasional adalah keinginan untuk mencegah terjadinya konflik ataupun perang dan menciptakan perdamaian serta kerjasama antara negara.

Namun sejarah mencatat, kehidupan damai tanpa perang hanya harapan kosong. Perang Dunia Pertama yang memakan korban ribuan hingga jutaan nyawa manusia, saat terhenti, ternyata tidak membuat negara-negara jera. Terbentuknya Liga Bangsa-Bangsa (LBB) terbukti tidak mampu menghentikan sengketa dan konflik kepentingan antar negara, hingga pecah Perang Dunia kedua, yang menewaskan jutaan jiwa.

Kemenangan Sekutu di tahun 1945, yang melahirkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), juga tidak efektif menghentikan perang Arab - Israel, setelah deklarasi "sepihak"

Israel sebagai sebuah negara di tanah Palestina. Tragedi penindasan hingga pembunuhan, yang dilakukan tentara Israel terhadap masyarakat Palestina, untuk merebut dan menguasai sedikit demi sedikit tanah mereka tidak berhenti hingga hari ini. Negara-negara Arab yang dahulu gigih membela Palestina, satu persatu mundur, bahkan menormalisasi dan mengakui Israel sebagai negara. Beberapa negara yang tersisa, juga tidak mampu berbuat apa-apa.

Palestina ditinggalkan berjuang sendiri, tidak ada satupun negara Arab yang berani tampil nyata membela dengan memberikan bantuan senjata. Bahkan bantuan makanan dan obat obatan sebagai simbol kemanusiaan, nyatanya tidak mudah terdistribusikan dan masuk bebas ke jalur Gaza.

Perjuangan negara-negara yang berusaha membela Palestina melalui jalur diplomasi, juga gagal dan sia-sia. Apapun resolusi untuk menghentikan perang diveto negara adidaya dan sekutunya. Dewan Keamanan PBB yang selama ini dianggap sebagai polisi dunia, nyatanya bermuka dua. Bertindak tegas terhadap negara negara "tidak berdaya", tapi tetap membela kejahatan negara-negara "asuhannya".

Apa yang menimpa rakyat dan tentara Palestina, yang dipaksa melawan kekuatan adidaya Israel dan Amerika, mengingatkan kita pada kisah Bani Israel di dalam Al-Qur'an, yang tertindas Fir'aun dan bala tentaranya, dengan

mukjizat Nabi Musa AS, Allah SWT tenggelamkan sang penguasa dzolim, ke dasar lautan bersama pasukannya yang luar biasa. Namun apa balasan yang diterima Nabi Musa as dan Nabi Harun as yang membawa misi kenabian; tidak berlangsung lama, setelah mereka diselamatkan justru kembali kepada kekafiran dan pengkhianatan dengan menjadikan anak sapi sesembahan, hanya setelah 40 hari ditinggalkan Nabi Musa untuk menerima wahyu dan perintah dari Allah SWT. Inilah karakteristik Bani Israil, yang hari ini bisa kita lihat dengan nyata mereka membombardir Gaza, membunuh ribuan nyawa tidak berdosa, baik dari para wanita lemah, dan juga anak-anak serta rakyat sipil yang tidak bersenjata.

Perjuangan bangsa Palestina hari ini, membela negara dan agama, melawan kekuatan "raksasa" Israel dan Amerika, juga mengingatkan kita kisah Thalut melawan Jalut, yang Allah SWT abadikan kisahnya dalam surat Al-Baqarah ayat 249-252. Pada ayat 249 dikisahkan, bagaimana Allah SWT menguji Thalut dan pasukannya yang dalam keadaan lelah dan haus dengan anak sungai, namun Allah SWT melarang minum dari air sungai tersebut kecuali hanya seteguk dari seciduk tangan saja. Ternyata mayoritas dari pasukan tersebut mengabaikan larangan dan minum sebanyak-banyaknya. Akibatnya pelanggaran larangan tersebut melemahkan semangat dan kekuatan perjuangan mayoritas pasukan, bahkan banyak yang menyatakan bahwa mereka tidak akan mampu melawan Jalut dengan

pasukannya yang dikenal kuat dan gagah perkasa, ungkapan ini tentu lahir dari lemahnya iman dari mayoritas pasukan. Namun, dalam kondisi ini, munculah sebagian pasukan yang memiliki keimanan yang tinggi dan kepercayaan sempurna bahwa kekuatan dan sedikitnya pasukan dan minimnya senjata bukan alasan untuk tidak memenangkan pertempuran dalam membela kemerdekaan dan kebenaran, jika Allah SWT mengizinkan. Gambaran optimisme sebagian kecil pasukan Thalut digambarkan dan diceritakan dengan ungkapan indah " قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ" yang artinya: orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah, berkata: "Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Inilah rasa optimisme, yang saat ini Allah curahkan dalam hati setiap pejuang yang membela tanah air, kehormatan dan agama mereka, demi kemerdekaan Palestina!

Kisah perjuangan Thalut melawan Jalut ditutup dengan ayat ke 251 dari surat Al-Baqarah, yang berbunyi: "فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُۥدُ جَالُوتَ وَءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُۥ مِمَّا يَشَآءُ" yang artinya "Mereka (tentara Thalut) mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah dan (dalam peperangan itu) Daud membunuh Jalut, kemudian Allah memberikan kepadanya (Daud) pemerintahan dan hikmah (sesudah meninggalnya Thalut) dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendaki-Nya". Ayat ini memunculkan rasa optimisme dan

keyakinan akan lahir dan muncul Thalut-Thalut baru, Daud-Daud baru yang akan memerdekakan Palestina dan mengusir penjajah Israel & Amerika sebagai representasi Jalut masa kini.

Dr. (Cand) Rudi Candra, LC, M.A.
Sekretaris Umum Insiera

SAMBUTAN

Institute for Global and Strategic Studies (IGSS), Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Perang yang terjadi di Gaza saat ini adalah sebuah malapetaka dunia. Pembantaian oleh Zionis Israel yang telah berlangsung 75 tahun ini hanya dapat terjadi karena pembiaran yang terus dilakukan oleh institusi politik dunia saat ini. Perserikatan Bangsa-Bangsa misalnya bahkan sejak awal telah menjadi bagian dari terbentuknya entitas penjajah Israel.

Sampai sekarang institusi ini tidak berdaya untuk membela Palestina, bahkan dalam perang yang terjadi sejak 07 Oktober 2023 lalu, banyak relawan dari UNRWA)The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) yang menjadi korban tindakan brutal Israel.

Seharusnya hal ini menjadi cambukan keras buat dunia dan kita semua, untuk lebih serius merespon penjajahan di tanah Palestina dan mencegah terjadinya pembantaian yang terjadi terus menerus.

Salah satu yang dapat dilakukan adalah mendesak reformasi PBB melalui langkah-langkah sistematis yang dilakukan oleh aliansi negara-negara pro-kemerdekaan Palestina. Hal ini tidak mustahil dilakukan sebab, mayoritas anggota PBB masih berpihak pada norma anti Penjajahan.

Gerakan non-blok sebagai wadah gerakan anti-penjajahan juga seharusnya dapat diaktifkan dan dimasif-kan kembali untuk menyuarakan nasib Palestina sampai proses dekolonialisasi Palestina berhasil dilakukan. Tentunya, langkah-langkah yang bersifat jangka pendek juga penting dilakukan seperti mendesak negara-negara yang punya kekuatan di PBB untuk menekan Israel menghentikan serangan dan memastikan bantuan-bantuan kemanusiaan dapat masuk ke Gaza dengan aman.

Dan masyarakat sipil juga bisa melakukan peran penting selain ikut mendesak para pembuat kebijakan baik domestik maupun internasional, juga dapat mengambil sikap tegas terhadap isu pembantaian dan penjajahan Palestina.

Disamping itu, perlu juga terlibat aktif melakukan edukasi ke publik agar masyarakat paham dan tidak salah paham memandang isu ini. Sebab, perang Palestina ini juga dibingkai oleh gerakan-gerakan pro-Israel untuk menggiring opini publik agar membenarkan tindakan Israel di Palestina.

Membiarkan opini pro-Israel ini bergulir akan membuat publik bingung dan akhirnya tidak atau berhenti mengambil sikap untuk membela kaum yang terjajah.

Oleh sebab itu, kami mengapresiasi usaha yang dilakukan oleh Komunitas Insiera bersama IGSS UII untuk menerbitkan kumpulan esai ini. Semoga ini menjadi wadah edukasi ke publik khususnya di Indonesia agar dapat memahami masalah lebih jernih dan selalu berpihak pada kepentingan Palestina yang terjajah.

Direktur IGSS UII

Gustrieni Putri, S.IP., M.A

PENGANTAR

Perang yang terjadi sejak 7 Oktober 2023 menyisakan luka yang sangat dalam bagi rasa kemanusiaan kita. Israel membantai masyarakat tanpa ampun, membunuhi para jurnalis, dokter, relawan kemanusiaan, memblokade bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza, dan sederetan kekejaman Israel yang dipertontonkan terhadap dunia.

Apa yang kita saksikan sekarang hanyalah bagian dari cerita panjang pendudukan dan penggusuran warga Palestina sejak tahun 1948 lalu. Jika ini tidak berupaya dihentikan, cerita akan terus berlanjut entah sampai kapan. Dan cerita-cerita pilu itu akan terus berulang setiap waktunya.

Memang yang melakukan pembantaian adalah Israel tapi dunia juga punya saham di sana dengan tidak meng-ambil langkah strategis untuk mencegah keberulangan ini. Padahal begitu banyak perjanjian internasional sudah dibentuk dengan misi perlindungan terhadap hak-hak manusia, tapi tetap saja kepentingan materiil, ekonomi dan kuasa selalu menjadi tolak ukur diatas segala-galanya.

Beruntungnya, akal sehat publik tidak bisa ditipu meski berbagai propaganda dilakukan untuk menormalisasi eksisten penjajahan Israel baik oleh Israel dan jaringan zionisnya maupun oleh Amerika Serikat bersama aliansinya.

Ini berarti bahwa peluang politik untuk memerdekakan Palestina dari penjajah Zionis masih terbuka lebar yaitu melalui politik arus bawah, politik yang digerakkan oleh kelompok-kelompok masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran dan selalu menyuarakan keberpihakan kepada Palestina.

Kumpulan tulisan yang dirangkai dalam sebuah buku ini adalah bagian dari ikhtiar Insiera bekerjasama dengan Institute for Global and Strategic Studies, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta untuk terlibat dalam jihad gagasan untuk mengopinikan dan mengedukasi publik mengenai dinamika perang yang terjadi sejak 7 Oktober 2023 lalu. Kami berharap bahwa sedikit upaya ini dapat dihitung sebagai amal-amal kebaikan untuk kemerdekaan masyarakat Palestina dan menghentikan penjajahan, pendudukan, serta kekejaman Israel.

Tim Penulis

DAFTAR ISI

I

MANUVER HAMAS DAN MITOS KECANGGIHAN MOSSAD

Pizaro Gozali Idrus

Serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023 terhadap militer kolonialis Israel tidak diragukan lagi merupakan peristiwa bersejarah dan akan dikenang oleh generasi mendatang. Badan intelijen Israel Mossad, yang selama ini dielu-elukan sebagai organisasi mata-mata tercanggih di dunia, ternyata berhasil dikelabui Hamas. Peralatan intelijen dan pengawasan Mossad yang banyak digembar-gemborkan gagal total menangkal serangan Hamas. Kecanggihan agen mata-mata zionis berubah menjadi mitos di hadapan para serdadu Al-Qassam. Dalam realitanya, Operasi Taufan Al-Aqsha berhasil melumpuhkan markas komando militer kolonial Israel di perbatasan Gaza, menghancurkan tank-tank, merampas peralatan militer, dan menewaskan ratusan para tentara, dan menyandera banyak perwira.

Tiga puluh enam jam setelah serangan Brigade Izzuddin Al-Qassam, sayap militer Hamas, Menteri Keamanan kolonial Israel Itamar Ben-Gvir akhirnya muncul di tengah publik menyerukan kehancuran total Hamas sambil mencoba mengalihkan perhatian masyarakat dari kegagalannya.

"Negara Israel sedang mengalami salah satu peristiwa tersulit dalam sejarahnya. Ini bukan waktunya untuk bertanya, menguji, dan menyelidiki," ujarnya.

Strategi militer Hamas

Penulis melihat ada dua hal di balik kesuksesan Hamas mengelabui intelijen Mossad dan militer penjajah. Ini tentu sangat menarik. Bagaimana mungkin Hamas yang hanya menguasai wilayah kecil Gaza berhasil menaklukan pasukan kolonialis Israel yang diduga polisi dunia dengan uang dan persenjataan canggihnya.

Pertama, terjadinya transformasi militer Al-Qassam. Harus diakui Hamas bukanlah gerakan Islam tradisional. Mereka telah berkembang menjadi gerakan Islam modern yang memiliki kader-kader ahli tidak hanya pada tataran keagamaan tapi juga saintis, teknokrat, dan ahli militer. Hamas memiliki beragam persenjataan yang dibangun selama bertahun-tahun. International Institute for Strategic Studies (IISS), yang berbasis di Inggris, menyebut Brigade Al-Qassam memiliki anggota sekitar 15.000. Dalam versi lain, ada yang menyebutnya 40.000 milisi. (Al Monitor,

2023). Tak hanya itu Hamas pun berhasil membuat persenjataan *made in local* seperti; drone, ranjau, peluru kendali anti-tank dan lain sebagainya. Mayoritas roketnya juga diproduksi secara lokal, meski belum sempurna secara teknologi. Meski Mossad dan intelijen Israel kerap disebut sebagai organisasi militer yang sangat unggul, fakta menunjukkan situasi sebaliknya.

Kedua, kematangan strategi militer Hamas. Majalah *Economist* menurunkan tulisan menarik yang berjudul: *Hamas's attack was an Israeli intelligence failure on multiple fronts*. Media berbasis di Inggris itu mengulas lebih jauh bagaimana kehebatan operasi militer Hamas Hamas yang berhasil melumpuhkan kekuatan militer penjajah. *Economist* mengatakan Hamas melancarkan operasi militer seperti yang tertera dalam buku teks perang. Mereka memulai serangan secara hati-hati terhadap sensor dan komunikasi militer Israel. Banyak kamera pengintai Israel menjadi sasaran penembak jitu dan berhasil dinonaktifkan oleh Hamas. Perang perangkat elektronik juga terlibat dalam operasi Hamas. Serangan komando terhadap markas besar komando Israel di Gaza selatan mengganggu komunikasinya dan mencegah para komandan mengeluarkan sinyal peringatan.

Selanjutnya, puluhan kendaraan dan ratusan personel militer Hamas bergerak menerobos pagar perbatasan yang dibangun penjajah. Serangan tersebut juga memanfaatkan apa yang disebut oleh militer sebagai perang senjata

gabungan: roket salvo besar-besaran saat fajar, pergerakan militer di darat, pesawat tempur yang menggunakan pesawat layang bertenaga, dan serangan melalui jalur laut. (*Economist*, 2023). Korban tewas pihak Israel telah mencapai 1.400 orang dan jumlah orang yang diculik dan ditahan di Gaza mencapai lebih dari 224 orang. Dalam konteks pertempuran, ini kekalahan terbesar yang dialami Israel sejauh ini dalam perang melawan Hamas.

Menariknya, ini dilakukan Hamas di tengah perang asimetris melawan pasukan kolonial, di mana menurut IISS, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) berjumlah 169.500, 126.000 di antaranya adalah tentara, mempunyai 400.000 tentara cadangan, pertahanan berteknologi sistem anti-rudal "Iron Dome", 1.300 tank, 345 jet tempur dan persen-jataan artileri, drone, dan kapal selam canggih. Namun semuanya itu kini hanya tinggal barisan angka yang sepenuhnya gagal mencegah manuver militer Hamas.

Kesombongan kolonial

Sejatinya gagalnya Mossad dalam menangkal se-rangan Hamas tidak lepas dari kesombongan kolonial yang telah mendewakan dirinya sebagai pemenang perang melawan Palestina. Hamas mengambil keuntungan dari persepsi ini yang secara bertahap melaksanakan rencana serangannya, mulai dari dari membuat roket yang ditembakkan ke kota-kota Israel hingga merobohkan pagar berduri yang memisahkan Gaza dari Israel. Profesor Hukum Internasional Queen Mary University of London,

Neve Gordon, mengatakan unit-unit intelijen beroperasi berdasarkan paradigma kolonial yang salah, yakni menganggap Hamas lemah dan kurang memiliki ketajaman strategis, sehingga mereka gagal mengidentifikasi kekuatan Hamas yang sesungguhnya. (Gordon, 2023). Beberapa pekan sebelum serangan Hamas, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sesumbar bahwa dunia Arab sudah memasuki era baru dengan melakukan rekonsiliasi dengan penjajah. Seolah-olah sudah tidak ada lagi perlawanan berarti dari kelompok kemerdekaan Palestina untuk melawan agresi Israel.

Namun, fakta yang terjadi jauh dari ucapan kepongahan Netanyahu. "Operasi Taufan Al-Aqsha" adalah cara Hamas menginterupsi dunia global bahwa perjuangan kemerdekaan Palestina belum mati di atas pesta pora normalisasi negara-negara Timur Tengah dengan kolonialis Israel, sekaligus menjadi tamparan dunia Arab yang menjalin kata damai dengan Israel. Dalam pidatonya pasca serangan, pemimpin Hamas Ismail Haniyah menegaskan kepada negara-negara Arab bahwa Israel tidak dapat memberi mereka perlindungan apapun bagi Palestina dan bangsa Arab meski ada pemulihan hubungan diplomatik baru-baru ini. (Idrus, 2023).

Di tengah keputusasaan, militer Israel kini menebar selebaran di Jalur Gaza yang isinya, siapa saja yang bisa memberi informasi mengenai keberadaan sandera yang ditahan Hamas dan pejuang lainnya akan mendapat

perlindungan dan hadiah. Selebaran itu juga mencantumkan nomor telepon yang dapat dihubungi untuk memberikan informasi. Namun warga Gaza mengumpulkan selebaran tersebut kemudian merobeknya, sebagai bentuk dukungan mereka terhadap kelompok pejuang Palestina. Hingga kini, masih belum jelas berapa lama lagi perang akan berlanjut. Namun satu hal yang pasti: Palestina telah menunjukkan kepada dunia bahwa mereka mahir dalam melemahkan kekuatan militer yang jauh lebih kuat dan lengkap.

Referensi

Lauras, Didier. (2023, Oktober 22). The Israel-Hamas military balance. Al-Monitor, https://www.al-monitor.com/originals/2023/10/israel-hamas-military-balance-0

Economist. (2023, Oktober 9). *Hamas's attack was an Israeli intelligence failure on multiple fronts. https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2023/10/09/hamass-attack-was-an-israeli-intelligence-failure-on-multiple-fronts*

Gordon, Neve. (2023, Oktober 11*). Can Netanyahu survive Hamas's attack on Israel*. Al-Jazeera. https://www.aljazeera.com/opinions/2023/10/11/can-netanyahu-survive-hamass-attack-on-israel

Idrus, Pizaro Gozali. (2023, Oktober 10). *Serangan Kilat Hamas dan Peta Baru Timur Tengah.* Republika.

https://www.republika.id/posts/46425/serangan-kilat-hamas-dan-peta-baru-timur-tenga

II

IRONI D*EFENCE STRATEGY* ISRAEL TERHADAP PALESTINA: BERTAHAN UNTUK MENJAJAH?

Unis Sagena

"Orang-orang Palestina itu sudah terbiasa diserang. Itu hanyalah repetisi, sudah berulang-ulang terjadi kok. Palestinian aja yang terlalu dramatis menanggapi serangan Israel…".

Begitu kira-kira bunyi *dark humor* komedian Mesir, Bassem Youssef, ketika diwawancarai Piers Morgan. Walau pun sarkastik di bibirnya, namun nampak pedih di matanya. Walau pun tersenyum wajahnya, namun terpancar getir di hatinya. Ketika terus dicecar, dia balik bertanya satir,"Berapa banyak lagi *Palestinian* harus mati untuk membuat Ben Shapiro happy?". Ada kesan *hopeless*, bahwa statistik yang dia tunjukkan toh tak akan mengubah pandangan (media) Barat terdapat brutalnya serangan tentara Israel selama ini ke Palestina. Mereka hanya fokus

pada peristiwa 7 Oktober 2023 itu dengan mengutuk Hamas, namun mereka lupa (atau pura-pura lupa?) pada serangan-serangan Israel sebelum-sebelumnya, yang bukan hanya di Gaza tetapi juga di wilayah lain yang tidak ada Hamas di situ. West Bank, misalnya.

Di sinilah ironi dan paradoksnya pandangan dunia terhadap peristiwa tersebut. Dilihat dari statistik, untuk peristiwa 7 Oktober itu saja, jumlah korban di pihak Palestina berkali-kali lipat dibandingkan korban pihak Israel. Berbagai kantor berita dunia menunjukkan angka jomplang: sekitaran 1,500 korban pihak Israel, 3.500 pihak Palestina. Bahkan di hari ke-22, jumlah korban pihak Palestina semakin bertambah. Walau pun kita menghindari mengambil data statistik dari media-media Arab (untuk menghindari dugaan bias), namun data media Barat pun tetap mencatat angka korban jauh lebih tinggi di pihak Palestina. Euro-med Human Right Monitor (organisasi independen yang berbasis di Jenewa), misalnya, merilis data serangan militer Israel di Gaza: korban jiwa 7.819 jiwa, 3.316 anak-anak, 1907 perempuan, 7009 warga sipil. Angka ini terus bertambah hingga hari ini (6/11/2023), CNN melansir angka 9.700 yang terbunuh di Gaza.

Laporan para jurnalis CNN menyebutkan bahwa anak-anak, wanita dan orang tua merupakan 70% dari korban tewas. Bahkan 53 staf PBB juga telah tewas sejak pertempuran dimulai, dengan 14 orang tewas dalam 24 jam terakhir, menurut pernyataan UNRWA (UN Relief Works

Agency for Palestine Refugees), lebih dari 2 juta orang di tenda-tenda pengungsian terkena dampaknya. Mereka kekurangan makanan dan air, terjangkit penyakit, bahkan para dokter rumah sakit di Gaza terpaksa bekerja dengan sumber daya yang semakin menipis. Mereka kekurangan listrik, merawat dalam kegelapan. Krisis energi di tengah krisis kemanusiaan.

Serangan Penjajahan dibalik Topeng Misi Bertahan

Strategi perang Israel terhadap Hamas itu pada hakikatnya merupakan keberlanjutan penjajahan yang telah lama berlangsung. Misi strategi bertahan menjadi topeng untuk terus mencaplok wilayah dan mengusir warga Palestina dari tanahnya, sedikit demi sedikit. Rangkaian serangan yang memporak-porandakan fisik dan psikis serta berbagai bentuk kekerasan kemanusiaan yang dilakukan secara brutal terhadap rakyat Palestina jelas menunjukkan perilaku Israel sebagai penjajah.

Serangan-serangan ke pemukiman dan fasilitas sipil tersebut dilakukan oleh pasukan militer IDF (Israel Defence Force) yang dilengkapi dengan persenjataan super canggih, berhadapan dengan kelompok Hamas yang bisa dibilang hanya Ormas. Sungguh perang yang sesungguhnya tidak berimbang *(asymmetric war)*, meskipun pada akhirnya Israel kebobolan pada peristiwa 7 Oktober itu. Selama ini, Israel selalu berdalih bahwa serangan-serangannya ke wilayah Gaza adalah bentuk mempertahankan diri (*self-*

defence). Sebagaimana slogan yang tertulis di website-nya "*Defense is our mission, security is our goal*". Namun, melihat masifnya jumlah kematian dan kerugian di sisi Palestina menimbulkan pertanyaan, gaya atau strategi perang seperti apa yang selama ini dipertontonkan oleh Israel? Apakah itu hanya tindakan taktikal-insidental di medan perang atau memang adalah strategi IDF yang sudah direncanakan sebelumnya? Mari kita cek gaya dan pola IDF selama ini berdasarkan data dan konsep untuk menjawab pertanyaan seberapa "defence-kah" IDF selama ini?

Secara konsep, strategi perang dapat dibagi dua secara garis besarnya, yaitu strategi bertahan (*defence*) dan strategi menyerang (*offence*). Carl Von Clausewitz, dalam tulisan klasiknya "On war" yang banyak dirujuk ahli strategi perang (Howard, Paret.ed, 1976), menyatakan konsep bertahan adalah:

> *"…the parriying of a blow. What is its characteristic feature? Awaiting the blow. It is this feature that turns any action into a defensive one: it is only test by which defence can be distinguished from attact in war….a battle is defensive if we await the attact-await, that is, the appearance of the enemy in front of our lines and within range. A campaign is defensive if we wait for our theater of operations to be invaded."*

Dari konsep ini, dapat diidentifikasi bahwa defensif memiliki ide-ide dasar antara lain:

1. Bersifat pasif, bukan aktif.

2. Kapan waktu menunggu? Ketika serangan musuh muncul di depan garis pertahanan.
3. Di mana lokasi menunggu? Ketika musuh berada dalam jarak jangkauan.
4. Di mana jarak jangkauannya? Di dalam wilayah operasinya sendiri ketika diserang.
5. Apa tujuan bertahan? Preservasi dan proteksi (melindungi). Bukan untuk menaklukkan.

Ide dasar strategi defensif ini kemudian memang berkembang, namun tetap masih jauh dari yang dipraktekkan IDF selama ini, walau pun berkali-kali pihak Israel menegaskan bahwa postur militernya hanyalah untuk "bertahan". Tertulis resmi pada website-nya, IDF menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk melindungi keberadaan negara Israel, kemerdekaannya, dan keamanan warga negara dan penduduknya. Misi ini menunjukkan bahwa wilayah operasionalnya berada di kawasannya sendiri yaitu residensi di mana warganya berada, atau sebuah lokasi yang masih dalam jarak jangkauannya sendiri. Tujuan utama defensif adalah untuk melindungi di kawasannya sendiri.

Nyatanya, fakta dan bukti-bukti berbicara lain, gaya IDF selama ini jelas bukan bertahan, namun bersifat ofensif (menyerang). Ironi utamanya dapat dilihat pada manuver IDF yang lebih menunjukkan sikap agresi aktif dengan cara menyerang kaum sipil Palestina, berkali-kali selama berdekade. Sangat terang Israel menunjukan langkah IDF

yang menyerang keluar dari wilayah operasinya, keluar dari jarak jangkauannya sendiri, dengan tujuan melumpuhkan Palestina secara total. Gaya itu bukan hanya pada momen 7 Oktober sahaja, namun juga pada serangan-serangan ke Gaza, West Bank, Ramallah, sebelum-sebelumnya. Bagaimana mungkin disebut bertahan jika statistik yang bertebaran di berbagai media membuktikan bahwa korban jiwa dan kerusakan justru lebih massif berada di pihak sipil Palestina, selama ini? Tujuan utama ofensif ini adalah untuk menaklukkan (*conquest*) musuh, itulah yang dilakukan IDF dengan memasuki wilayah Gaza hingga menghancurkan 39 masjid dan 3 gereja, 215 pekerja medis, 107 fasilitas kesehatan, 99 sekolah dan banyak lagi (gambar 1.).

Gambar 1.
Data statistik korban serangan IDF 7-28 Oktober 2023.

Sumber: https://euromedmonitor.org/uploads/EN%2028%20(1).png

Gaya ofensif Israel ini bukanlah cerita baru. Bukti wawancara lama para prajurit IDF, menunjukkan bahwa label "defence" Israel sesungguhnya hanyalah kedok atau topeng sahaja. Hanya *lip service* yang "jauh panggang dari api". *Namely defence, but act offensively,* kata Muhammad Ali Khalidi (2010), yang menemukan kontradiksi antara dokumen resmi IDF dengan pengakuan para prajuritnya sendiri di lapangan ("Soldiers' Testimonies: Breaking the Silence"). Pernyataan lugas dan gamblang seorang komandan militer IDF pernah difilmkan oleh televisi Israel, menginstruksikan tentaranya untuk tak perlu pikir panjang ketika menghadapi orang-orang Palestinia:

> *"I want aggression! If we suspect a building, we take down this building! If there's a suspect in one of the floors of that building, we shell it. No second thoughts. If it's either them or us, let it be them. No second thoughts. If someone approaches us, unarmed, and keeps coming despite our warning shot in the air, he's dead. No one has second thoughts. Let errors take their lives, not ours".*

Ironi ini juga bertolak belakang dari janji Human Dignity yang tertera pada website resmi IDF,"The IDF and its soldiers are obligated to preserve human dignity. All human beings are of inherent value regardless of race, faith, nationality, gender or status.". Spirit IDF itu berisi panduan prajurit untuk hanya akan menggunakan senjata dan kekuatan mereka untuk tujuan misi belaka, hanya sejauh yang diperlukan dan akan menjaga kemanusiaan mereka

bahkan selama pertempuran. Tentara IDF tidak akan menggunakan senjata dan kekuatan mereka untuk menyakiti manusia yang bukan kombatan atau tawanan perang, dan akan melakukan segala daya mereka untuk menghindari kerugian nyawa, tubuh, martabat dan harta benda mereka.

Namun, semua itu hanya deklarasi di atas kertas, nyatanya adalah instruksi komandan IDF untuk menghabisi di tempat siapa saja yang dilihatnya. Walaupun hanya seorang bocah cilik yang memegang batu, atau seorang gadis kecil yang menggenggam gunting, para prajurit itu diperintahkan untuk menembaknya,*"You see something and you're not quite sure? You shoot….we were generally instructed: if you feel threatened, shoot. They kept repeating to us that this is war and in war opening fire is not restricted."*. Mereka tak ragu menembak non-kombatan, tak heran jika korban anak-anak adalah pemandangan biasa di Palestina.

Pengakuan pelanggaran IDF itu dulu pernah disampaikan sendiri oleh wakil kepala staf IDF, Mayjen Yair Golan saat memberikan pidato pada Hari Peringatan Holocaust. Dia melihat kesamaan antara Nazi Jerman pada tahun 1930-an (yang melakukan gesida atau pembunuhan massal kaum Yahudi) dengan tentara Israel saat ini dalam hal "Signs of intolerance and violence" (Shmuel Rosner, 2016).

Jadi, kendati para petinggi IDF, para pembela Zionisme (termasuk Ben Shapiro, influencer AS), itu terus

saja mengelak, berapologi, dan menutupinya, namun sesungguhnya dunia sudah bisa melihat dan menilai dengan mata kepala sendiri. *"There is no flag large enough to cover the shame of killing innocent people"*, kata Howard Zinn.

Referensi

Clausewitz, Carl Von. (1976). *On War*. Ed.and trans.by Michael Howard and Peter Paret, Princeton, NJ: Princeton University Press. 75, 86-7, 119-20, 357-8, 528, 595-7.

Flower, Kevin, Christian Edwards, Tara John, Kareem Khadder and Abeer Salman. (2023). *IDF announces expanded ground operation in Gaza, amid communications blackout in the enclave.*

https://edition.cnn.com/2023/10/27/middleeast/israel-gaza-ground-operations-airstrike-intl/index.html

Khalidi, Muhammad Ali . (2010). The Most Moral Army in the World: The New "Ethical Code" of the Israeli Military and the War on Gaza. *Journal of Palestine Studies* Vol.39 No. 3-spring https://www.palestine-studies.org.

Rosner, Shmuel. (2016). *The Israel Defense Forces vs. the People of Israel,* https://www.nytimes.com/2016/05/12/opinion/the-israel-defense-forces-vs-the-people-of-israel.html

https://www.idf.il/en/#

https://euromedmonitor.org/uploads/EN%2028%20(1).png

III

KRISIS ZIONISME DAN MASA DEPAN NEGARA ISRAEL

Hadza Min Fadhli Robby

Tahun 1948, Zionisme berhasil mewujudkan ejawantah material dari ideologi supremasi rasialnya, yakni negara Israel. Upaya ini berhasil diwujudkan dengan *Nakba*, sebuah proses depopulasi yang melibatkan pemindahan dan relokasi lebih dari 400.000 orang dari kampung halamannya ke kamp-kamp pengungsian yang tersebar di penjuru tanah Arab (Nuseibah, 2017). Bagi seorang sejarawan Israel, Benny Morris, *Nakba* dianggap sebuah '*clean war*', sebuah peperangan yang diperlukan untuk memberikan ruang bagi orang Yahudi yang telah dipersekusi selama 2000 tahun (MEMO, 2019). Kejahatan yang terjadi selama perang tersebut dapat 'dimaklumi' demi pengembalian hak orang Yahudi untuk bermukim di 'tanah asal'nya. Pada periode 1967 hingga 1973, adanya semangat persatuan Arab sekali lagi menguji keutuhan dan kekuatan ideologi Zionisme. Di puncak persaingan antara

Amerika Serikat dan Uni Soviet saat Perang Dingin, Israel menaruh harapan pada Amerika Serikat dan dunia Barat untuk menghentikan agresi dunia Arab yang saat itu didukung oleh Uni Soviet. Sekali lagi, setelah berbagai episode konflik dengan dunia Arab, Israel makin mengukuhkan posisinya sebagai sebuah negara bangsa. Proses perdamaian yang berjalan antara dunia Arab dan Israel yang terjadi sejak 1979 hingga *Abrahamic Accord* yang belum lama ditandatangani seolah-olah memberikan impresi kepada dunia bahwa eksistensi negara Israel yang berdiri di atas tanah orang-orang Palestina yang terusir layak untuk tetap berdiri dan diakui dalam politik internasional.

7 Oktober 2023 merupakan ujian baru yang mungkin tak terlupakan bagi negara Israel. Serangan ofensif yang dilakukan oleh Hamas menimbulkan dampak yang tidak terperi bagi warga sipil Israel yang tinggal di kota-kota perbatasan Israel, terutama di Sderot dan beberapa *kibbutz* (pemukiman kolektif milik sipil) yang sempat dikuasai Hamas selama beberapa jam.

Adanya dampak signifikan ini betul-betul menohok para pemimpin rezim Zionis yang saat ini dikomandoi oleh Benyamin Netanyahu. Peristiwa yang terjadi dikala orang Yahudi merayakan Simchat Torah, atau festival akhir pembacaan Taurat memberikan dorongan yang besar bagi pemerintah Netanyahu untuk melakukan balas dendam

secara bertubi-tubi kepada masyarakat Gaza (The Nation, 2023).

7 Oktober 2023 menjadi amat berbeda, karena 7 Oktober memperlihatkan citra ajaran Zionisme yang tidak mencerminkan rasa kemanusiaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Respon ini yang mengguncang banyak orang, baik yang berada di sisi Zionis maupun melawan Zionis. Banyak yang berandai, mengapa kekejaman Zionisme begitu banal terlihat tanpa ada intervensi yang nyata dari masyarakat dunia?

Apokaliptisme, Trauma Holokaust, dan Rasialisme sebagai 'Penguat' Zionisme

Ada tiga alasan mengapa Zionisme menjadi 'benteng penguat' yang melindungi Israel dari segala tuduhan terhadapnya: apokaliptisme, trauma holokaust, dan rasialisme.

Pertama, penggunaan apokaliptisme untuk menguatkan Israel dan Zionisme terlihat amat jelas dalam perkembangan peristiwa 7 Oktober 2023. Zionisme yang awalnya muncul sebagai ideologi sekular, justru menjadi ideologi yang bernuansa agama amat kuat. Hal ini ditunjukkan pada bagaimana Benjamin Netanyahu mengutip kitab Yesaya dari Perjanjian Lama dalam melakukan justifikasi penyerangan ke Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa dia akan menjadi penggenap dari nubuatan Yesaya yang menyatakan bahwa orang Yahudi

akan berkumpul dari seluruh dunia dan menanti kehadiran Messiah yang akan membangkitkan kejayaan baru peradaban dan agama Yahudi (The Christian Post, 2023). Bahkan, salah satu frasa dalam nubuatan di kitab Yesaya menyebutkan '*Chamas*' yang mirip dengan kata 'Hamas' dan hal ini dianggap sebagai suatu yang bukan kebetulan (Bible Tools, n.d.).

Beberapa tokoh Kristen Evangelis yang pro-Zionis juga mengutip beberapa bagian lain dari Perjanjian Lama, seperti Kitab Amos, sebagai dasar untuk membenarkan tindakan Israel ke Gaza. Dalam Kitab Amos, secara rinci disebutkan nubuatan bahwa Gaza akan diserang dengan api hingga 'purinya dimakan habis' (Pareira, 2023). Hal ini makin menunjukkan bahwa kobaran api kebencian yang dinyalakan Zionisme bersumber dari penafsiran apokaliptik yang ekstrem. Akar sekularisme yang menjadi dasar Zionisme dicabut lalu digantikan dengan pemahaman keagamaan yang radikal dan supremasis sehingga wahyu dan nubuatan dalam Perjanjian Lama. Penafsiran kitab suci yang bersifat apokaliptis ini dikritisi oleh beberapa kalangan gereja, termasuk di antaranya adalah kalangan gereja Reformed di Indonesia (Nggadas, 2023).

Kedua, trauma Holokaust juga menjadi penguat Zionisme untuk membenarkan pembantaian terhadap warga Gaza dan Palestina, terlepas dari latar belakang agama dan posisi politiknya. Trauma Holokaust mengisyaratkan bahwa eksistensi bangsa Yahudi mutlak

dilindungi dengan segala cara untuk menghindari anasir serupa Nazi berkuasa dan berlaku semena-mena kepada bangsa Yahudi (Witsrich, 1997).

Sehingga, siapapun anasir yang dianggap meng-ganggu eksistensi bangsa Yahudi, maka menurut Zionis-me, anasir itu layak dilenyapkan agar tidak menjadi an-caman di masa depan. Hal ini terlihat dari pernyataan beberapa politisi Israel yang menegaskan bahwa Nakba. Penyerangan total atas Gaza dan pemusnahan Hamas dengan segala akibatnya merupakan suatu keharusan untuk memastikan "kedigdayaan" bangsa Yahudi dan terjaganya bangsa Yahudi dari ancaman kemusnahan, meskipun persepsi ancaman ini bisa jadi sumir dan dibuat-buat (Irfan, 2023).

Ketiga, rasialisme menjadi faktor yang amat kentara untuk memahami kerja Zionisme dalam menggerakkan motif politik Israel, baik dalam politik domestik maupun politik internasional. Zionisme berakar pada argumen yang amat kuat tentang supremasi rasial yang mengutamakan bangsa Yahudi yang berasal dari Eropa.

Ajaran rasial yang integral dalam Zionisme me-mungkinkan strukturisasi masyarakat Israel ke berbagai macam kelas, dimana tingkat teratas ditempati oleh Yahudi Eropa yang diikuti oleh Yahudi berwarna dari ragam asal etnis, baik itu Mizrachi, Beta Israel, dan Bnei Menasseh, serta Yahudi-Yahudi berwarna lain yang bahkan dira-gukan 'keyahudiannya' (Dayan, 1993).

Struktur ini ditopang oleh opresi terhadap etnis-etnis selain Yahudi, terutama kepada etnis Arab dan etnis asal Afrika yang non Yahudi (Massad, 2010).

Meskipun Zionisme kiri mendorong terjadinya derasialisasi selayaknya yang telah berlangsung di negara-negara Barat, namun rasialisme ini yang nyatanya menjadi senjata yang ampuh untuk memperkuat dominasi etnis Yahudi atas etnis-etnis lainnya di Israel (Tatour, 2016). Terlebih dengan adanya dominasi dari Zionisme kanan ala Netanyahu dan ajaran supremasi Yahudi ultra-kanan yang dahulu diprakarsai oleh Meir Kahane, Zionisme mendesak etnis yang tidak murni untuk memikirkan kembali haknya untuk hidup dengan layak dan bermartabat di Israel.

Kuasa Barat dan Dukungan Tanpa Syarat pada Israel

Salah satu hal yang dapat dilihat secara kentara dalam agresi Israel kali ini adalah kuasa Barat yang amat kentara. Kuasa Barat, terutama Amerika Serikat, Britania Raya, dan Perancis seolah memberikan garansi dan dukungan tanpa batas pada Israel. Adanya garansi ini perlu dilihat pada dua aspek.

Pertama, ada *guilt complex* yang dialami oleh peradaban Barat dalam kaitannya dengan sejarah interaksi mereka dengan Yahudi (Feingold, 1989). *Guilt complex* ini dialami oleh kebanyakan peradaban Barat karena sejarah peradaban Barat merupakan sejarah panjang persekusi dan

peminggiran komunitas Yahudi. Komunitas Yahudi dianggap sebagai 'masalah' dan 'benalu' dalam masyarakat Barat yang didirikan atas dasar ajaran filsafat Yunani dan teologi Kristen (Berger, 1993). Terjadinya persekusi yang akhirnya berujung pada *holocaust* inilah yang membuat Barat merasa memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa etnis Yahudi akan terlindungi. Inilah yang membuat Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan mengatakan bahwa Barat memiliki utang yang besar kepada Yahudi (Presidency of the Republic of Turkiye, 2023).

Kedua, pengamanan kontrol geopolitik menjadi penting untuk memastikan agar negara-negara Barat, Amerika Serikat beserta aliansinya, tidak mudah tergerus pengaruhnya di kawasan Timur Tengah. Adanya vakum kuasa di Timur Tengah setelah terjadinya Perang Sipil Suriah memungkinkan peran Rusia yang mulai meningkat di kawasan tersebut. Episode serangan Israel ke Gaza menjadi konsideran baru bagi Amerika Serikat dan negara-negara Barat untuk mengokohkan kembali posisinya di Timur Tengah (Wahhab, 2019).

Kesimpulan: Israel, Negeri Khayalan yang Ditopang Kekerasan

Negeri Israel muncul dari adanya impian, khayalan, dan harapan yang dibangun oleh para Zionis yang mendambakan tanah air bagi orang Yahudi untuk terbebas

dari ancaman persekusi dan pengusiran. Namun, sejak awal pendirian Israel, negeri 'harapan' ini malah menjadi tanah dimana persekusi dan pengusiran tetap terjadi pada bangsa Palestina, bangsa yang semestinya mendapatkan hak atas tanah dan hak hidup di tempat yang mereka sudah tinggali bertahun-tahun. Hal ini membuktikan bahwa Israel adalah sebuah ironi sejarah. Penyelamatan bangsa Yahudi yang terusir hanya akan mungkin terjadi dengan pengusiran bangsa Arab yang merupakan masyarakat asli di tanah tersebut. Tanpa adanya introspeksi yang mendalam kedepan, Israel akan tetap menjadi ironi sejarah yang melanggengkan kekerasan bagi yang liyan. Israel adalah "negeri khayalan" yang hanya bisa berdiri dengan sokongan kuasa hegemoni yang lalim serta penafsiran yang tak sahih dari wahyu ilahi. Tanpa hal tersebut, Israel akan runtuh dan tumbang dengan sendirinya.

Referensi

Berger, R. J. (1993). The "Banality of evil" reframed: The social construction of the "Final Solution" to the "Jewish problem." The Sociological Quarterly, 34(4), 597–618. https://doi.org/10.1111/j.1533-8525.1993.tb00108.x

Bible Tools. (n.d.). What the Bible says about Chamas. https://www.bibletools.org/index.cfm/fuseaction/Topical.show/RTD/cgg/ID/5265/Chamas.htm

Dayan, A. (1993). The debate over Zionism and racism: An Israeli view. Journal of Palestine Studies, 22(3), 96–105. https://doi.org/10.2307/2537573

Feingold, H. L. (1989). Who shall bear guilt for the Holocaust: The human dilemma. Bystanders to the Holocaust, Volume 1, 121–142. https://doi.org/-10.1515/9783110968705.121

Irfan, A. (2023, August 16). Why Palestinians could be facing another Nakba. The Nation. https://www.-thenation.com/article/world/palestine-second-nakba/

Middle East Monitor. (2019, January 14). Benny Morris says Nakba was "very clean war." https://www.middlee-astmonitor.com/20190114-benny-morris-says-nakba-was-very-clean-war/

Nuseibah, M. (2017, June 1). The second Nakba: Displacement of Palestinians in and after the 1967 occupation - June 1967, an endless six-day war. Orient XXI. https://orientxxi.info/magazine/the-second-nakba-displacement-of-palestinians-in-and-after-the-1967-occupation,1875

Pareira, J. (2023, October 21). Janji Tuhan hancurkan Gaza tertulis Dalam Kitab Amos Perjanjian Lama. Rajawali News. https://www.rajawalinews.id/internasional/40310582059/janji-tuhan-hancurkan-gaza-tertulis-dalam-kitab-amos-perjanjian-lama

Presidency of the Republic of Turkiye. (2023). "Gaza is not only an issue for those struggling to survive there, but for all of Us" . Presidency Of The Republic Of Turkey : "Gaza is not only an issue for those struggling to survive there, but for all of us." https://www.tccb.-gov.tr/en/news/542/149911/-gaza-is-not-only-an-issue-for-those-struggling-to-survive-there-but-for-all-of-us-

Tatour, L. (2016, July 1). The Israeli left: Part of the problem or the solution? A response to Giulia Daniele. Bristol University Press. https://doi.org/10.1080/23269995.-2016.1199474

The Christian Post. (2023, October 26). Netanyahu: Defeating Hamas will make prophecy of Isaiah a reality. https://www.christianpost.com/news/-netanyahu-defeating-hamas-will-make-prophecy-of-isaiah-a-reality.html

The Nation. (2023, October 16). Why Hamas chose October 7 to launch bloodiest attack on Israel. nationthailand. https://www.nationthailand.com/world/middle-east-africa/40031775

Wahhab, H. (2019, June 23). US power vacuum in the Middle East: What next?. Global Risk Insights. https://globalriskinsights.com/2019/06/us-power-middle-east/

Wistrich, R. S. (1997). Israel and the holocaust trauma. Jewish History, 11(2), 13–20. https://doi.org/-10.1007/bf02335674

IV

POLITIK DALAM NEGERI ISRAEL - NETANYAHU - DAN PERANG ISRAEL- GAZA 2023

Mohamad Rezky Utama

Banyak orang yang melihat konflik antara Israel dengan Palestina dengan melihat Israel sebagai satu negara, sementara Palestina terdiri dari beberapa faksi yang berbeda. Namun, pada kenyataannya, Israel terdiri dari beberapa faksi yang memiliki pandangan yang berbeda dan tidak hanya berasal dari masyarakat Yahudi, namun juga masyarakat Arab. Begitu juga dengan perkembangan konflik di Gaza. Sampai akhir Oktober 2023, perang ini sudah mengakibatkan lebih dari 8000 (Aj Labs 2023). Dan dari kedua sisi, ada pihak-pihak yang menginginkan perang untuk terjadi, seperti koalisi Netanyahu di Israel dan Hamas di Palestina. Akan tetapi, ada beberapa bagian dari masyarakat Israel dan Palestina yang masih menginginkan perdamaian dan penyelesaian konflik nirkekerasan. Keadaan ini menimbulkan pertentangan antara

Netanyahu dengan beberapa kalangan masyarakat di Israel.

Netanyahu, yang dianggap gagal dalam mengantisipasi serangan kejutan Hamas, Salah satu kalangan yang merasa keberatan adalah kalangan Yahudi agamis di Israel. Rabbi Elhanan Miller berpendapat bahwa apa yang sedang dilakukan oleh Netanyahu adalah bentuk dari menjaga hubungan public yang baik pada kalangan agamis di Israel (Abushamala 2023). Beberapa kali, Netanyahu mengutip dan menggunakan kata-kata yang berasal dari Taurat selama perang yang sedang terjadi. Beberapa diantaranya, dikutip oleh Abushamala (Abushamala 2023), Netanyahu mengungkapkan "ingatlah apa yang Amalek telah lakukan padamu … kita ingat, kita melawan." Dan pada kesempatan lainnya, dia juga mengatakan

> "dengan kekuatan kita yang terpadu, kepercayaan yang mendalam pada kebenaran kita, dan kekelahan Israel, kita akan memenuhi nubuat Yesaya 60:18, 'Tidak aka nada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu; engkau akan menyebutkan tembokmu *Selamat* dan pintu-pintu gerbangmu *Pujian*.'"

Kita dapat mengamati kejadian ini sebagai salah satu cara yang dilakukan Netanyahu untuk menjaga kepercayaan kalangan agamis yang mendukungnya pada pemilu sebelumnya. Netanyahu merangkul kalangan Zionis agamis-bedakan dengan Yahudi *Heredi* yang sering

tidak setuju dengan Zionisme dan pembentukan negara Israel-untuk membentuk pemerintahan yang sekarang. Salah satu partai yang dicoba untuk dirangkul adalah partai yang diketuai oleh Itaman Ben-Gvir, Otzma Yehudit. Partai tersebut adalah partai yang memiliki ideologi Zionisme, anti-Arab, dan Supremasi Yahudi yang beranggotakan orang-orang Ortodoks Israel. Ketuanya, Itaman Ben-Gvir juga sering melakukan provokasi untuk melakukan ibadah di pelataran Al-Aqsa yang sebenarnya tidak sesuai dengan hukum yahudi yang melarang orang Yahudi untuk beribadah di sana karena kesuciannya.

Sementara itu, beberapa pihak di Israel, utamanya dari kalangan liberal dan kalangan Arab mulai tidak menyukai cara-cara Netanyahu bereaksi dalam perang. Menurut Dialog Center (Calli 2023), 56% masyarakat Israel percaya bahwa perdana menteri Netanyahu harus mengundurkan diri dengan dua puluh delapan persen pemilih partai-partai koalisi memiliki sudut pandang serupa. Sebanyak 86%, suatu angka yang banyak, dari responden, dengan 79% pendukung koalisi, mengatakan bahwa serangan mendadak dari Gaza adalah kegagalan kepemimpinan negara. Dan sebanyak 92% menganggap bahwa perang membawa kecemasan. Sementara itu, hampir semua responden (94%) percaya bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab atas kekurangan persiapan keamanan di wilayah selatan Israel, dengan 75% responden mengatakan pemerintah Israel sekarang-koalisi Netanyahu-memiliki

tanggung jawab yang lebih utama atas kejadian ini. Lebih lanjut lagi, 53% responden menginginkan pengunduran diri Menteri Pertahanan, Yoav Gallant.

Sebenarnya, krisis kepercayaan antara masyarakat Israel dengan Netanyahu sudah berlangsung semenjak tahun 2020 ketika warga Israel harus melakukan pemilu berkali-kali. Rangkaian pemilu tersebut terjadi karena jumlah kursi dalam Knesset belum cukup untuk membuat pemerintahan di Israel. Pemerintahan sempat dipimpin oleh Naftali Bennett, seorang perdana menteri Israel dari partai HaYamin HaHadash yang pernah menggabungkan partai-partai Arab, seperti Partai Ra'am dalam pemerintahannya. Akan tetapi, koalisi tersebut tidak berumur panjang karena golongan Arab menganggap bahwa Naftali Bennett gagal menjamin ketertiban di Al-Aqsa pada tahun yang sama dengan tahun terpilihnya.

Selanjutnya, pemerintahan Israel sempat dipimpin oleh Yair Lapid dari partai Yesh Atid yang berideologi tengah-kiri sebelum kembali ke tangan Benjamin Netanyahu. Kepemimpinan Yair Lapid dapat dikatakan memberikan sedikit ruang kestabilan karena tidak terlalu banyak gejolak yang terjadi di Israel dan Palestina. Meskipun demikian, Yair Lapid yang juga didukung oleh kalangan Liberal tidak terlalu banyak mencurahkan waktunya untuk mengurus nasib orang-orang Palestina yang berada di bawah dudukan Israel.

Setelah kepemimpinan kembali ke tangan Netanyahu yang memanfaatkan perolehan suara dari 87% Pemukim Yahudi di Tepi Barat (McKerman 2022). Netanyahu membentuk koalisi dengan partai-partai sayap kanan dan Zionis dan membentuk keberanian Netanyahu untuk bereaksi pada serangan Hamas pada Oktober 2023. Di sini kitab isa melihat bahwa setelah kericuhan di Pelataran Masjid Al-Aqsa, masalah keamanan dan kedaulatan negara menjadi masalah yang lebih diutamakan oleh Pemukim Israel.

Dari pemaparan di atas, kesimpulannya adalah reaksi Netanyahu terhadap serangan Hamas di wilayah selatan Israel tidak terlepas dari dinamika politik domestik yang terjadi di Israel. Dengan membentuk koalisi berbasis konservatif, Netanyahu memberikan angin segar pada janji-janji tanah yang dijanjikan. Ketika banyak masyarakatnya yang menginginkan dia mundur dari jabatannya karena dianggap tidak cakap dalam mengatasi serangan Hamas dan menyelesaikan perang, Netanyahu menggunakan retorika Taurat dan kepercayaan Yudaisme untuk menjaga masyarakat pendukung koalisinya untuk tetap memiliki sudut pandang agamis sayap kanan dalam untuk tetap mendukungnya. Namun, cepat atau lambat, kepemimpinan Netanyahu dapat menjadi rapuh jika perang semakin merugikan perekonomian dan kehidupan masyarakat Israel.

Referensi

Abushamala, Rania. 2023. “Israel’s Netanyahu Seeks to Salvage Damaged Image with Religious References, Says Israeli Rabbi.” AA. 2023. https://www.aa.-com.tr/en/world/israels-netanyahu-seeks-to-salvage-damaged-image-with-religious-references-says-israeli-rabbi/3037948.

Aj Labs. 2023. “Israel-Gaza War in Maps and Charts: Live Tracker | Israel-Palestine Conflict News | Al Jazeera.” Al Jazeera. 2023. https://www.aljazeera.com/-news/longform/2023/10/9/israel-hamas-war-in-maps-and-charts-live-tracker.

Calli, Muhammed Enes. 2023. “56% of Israelis Believe Netanyahu Should Resign at End of Conflict with Palestine: Poll.” Anadolu Agency. 2023. https://-www.aa.com.tr/en/middle-east/56-of-israelis-believe-netanyahu-should-resign-at-end-of-conflict-with-palestine-poll/3017237.

McKerman, Bethan. 2022. “Netanyahu Thanks Voters as Rightwing Bloc Extends Israeli Election Lead | Israel | The Guardian.” The GUardian. 2022. https://www.-theguardian.com/world/2022/nov/02/benjamin-netanyahu-thanks-voters-as-exit-poll-puts-him-ahead-in-israel-election.

V

KEJAHATAN PERANG OLEH HAMAS?

Fajri Matahati Muhammadin

Di tengah berita tentang tewasnya ribuan korban sipil termasuk anak-anak dan tenaga medis serta hancurnya bangunan-bangunan termasuk rumah sakit dan tempat ibadah di Gaza dalam beberapa hari ini akibat kebiadaban serangan Israel, santer juga berita tentang kejahatan-kejahatan perang yang kononnya dilakukan oleh HAMAS. Di antaranya adalah penculikan terhadap beberapa warga Israel, tembakan roket ke wilayah sipil di Israel, menggunakan penduduk Gaza sebagai 'perisai manusia', dan lain sebagainya.

Kalau melihat skala kejahatan perang yang dituduhkan kepada HAMAS, pun kita terima semua klaimnya, sangat kecil dibandingkan apa yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina. Dalam presedennya, biasanya kita lebih memfokuskan diri pada pihak yang jelas paling besar kejahatan perangnya. Misalnya, kita jarang membicarakan kejahatan perang pihak sekutu dibandingkan oleh pihak

Nazi dalam Perang Dunia II. Atau, kejahatan perang pihak Bosnia dibandingkan pihak Yugoslavia dan Serbia dalam perang Yugoslav. Atau, bahkan, kejahatan perang pihak Indonesia dalam perang mempertahankan kemerdekaan pasca 1945. Bukan karena menafikan apa yang buruk, tapi prioritas perhatian tentu harus ditujukan pada pihak yang telah melakukan kejahatan yang jauh lebih besar skalanya. Apalagi kalau pihak tersebut masih terus melakukannya, terlebih jika skala kejahatannya masih terus meningkat. Maka ketika banyak pihak seakan menafikan keburukan-keburukan luar biasa yang telah dilakukan oleh Israel tapi begitu semangatnya mengangkat dugaan kejahatan-kejahatan perang oleh HAMAS, maka prioritas mereka perlu dipertanyakan. Tapi, demi "keadilan", mari kita bahas sedikit tentang tuduhan kejahatan-kejahatan perang oleh HAMAS ini. Sebab, meskipun tidak terlalu mendapatkan atensi, sebagian militer Bosnia pun harus menjalani dakwaan pidana oleh *the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia* bersama-sama dengan militer Yugoslavia dan Serbia juga.

Salah satu tuduhan kejahatan perang kepada HAMAS adalah kasus penyanderaan sekitar dua ratus warga Israel oleh pasukan HAMAS. Memang betul bahwa penyan-deraan atau *hostage-taking* adalah sebuah kejahatan perang, sebagaimana tertuang dalam Pasal 8(2)(a)(viii) Statuta Roma 1998. Pasal tersebut dipaparkan lebih lanjut di sebuah dokumen terpisah yang disebut dengan ICC

Elements of Crime yang menyebutkan bahwa orang yang disandera haruslah merupakan "orang yang berstatus dilindungi". Status tersebut mencakup antara lain warga sipil dan militer yang sudah menyerah. Meskipun, tentunya, dapat diargumentasikan bahwa militer yang sudah menyerah bukanlah "sandera" melainkan tawanan perang.

Tuduhan lain adalah serangan roket ke Rumah Sakit Al-Ahli. Sebagian telah mengecam Israel atas serangan tersebut, tapi sebagian lain mengklaim bahwa ia adalah roket dari pejuang Palestina yang gagal terbang jauh dan tidak sengaja terjatuh ke Rumah Sakit tersebut. Penting dicatat bahwa ada sebagian yang menuduh pelakunya adalah Hamas, ada pula yang menuding kelompok lain yaitu "Islamic Jihad". Sebenarnya, aneh juga tuduhan ini. Di satu sisi, ada beberapa pakar yang mencoba melakukan beraneka analisis yang mencoba menjelaskan bahwa roket tersebut ditembakkan oleh pihak Palestina dan bukan Israel (ada pula yang menjelaskan sebaliknya). Di sisi lain, sulit untuk tidak *su'udzon* pada Israel. Telah diberitakan oleh banyak sumber misalnya New York Times (2023) dan *the World Health Organization* (2023) bahwa Rumah Sakit Al-Ahli sudah mendapatkan peringatan berulang kali oleh Israel untuk evakuasi karena mau diserang. Ketika kemudian betul diserang tidak lama setelah peringatan tersebut, masa tiba-tiba pelakunya Hamas? Apalagi, bukan

pertama kalinya Israel jelas menyerang Rumah Sakit dan ternyata juga bukan terakhir kalinya.

Tapi, dalam tulisan ini kita sementara kita anggaplah memang betul teori yang mengatakan roket tersebut ditembakkan oleh Hamas. Jika kita anggap sasaran Hamas adalah musuh (pasukan Israel) sehingga bukan bermaksud menyerang rumah sakit, maka sebenarnya dapat dikatakan bahwa kesalahan HAMAS berakar dari ketidakakuratan dan kelemahan teknologi roket-roket yang dimiliki. Hal ini terkait dengan serangan roket yang tidak meleset tapi tetap meluncur ke Israel, pun jika ia dimaksudkan mensasar posisi militer Israel, tapi dapat dikatakan sangat sembrono untuk menembakkan roket-roket yang setidakakurat itu ke pasukan Israel yang dekat dengan pemukiman sipil Israel juga.

Maka sekurang-kurangnya hal ini bisa masuk pada kejahatan perang menurut Pasal 8(2)(b)(iv) Statuta Roma yang pada intinya menyasar target yang sah tapi sembrono sehingga serangan sangat berpotensi turut mengenai warga dan objek sipil. Sedangkan apabila sengaja, ia dapat tergolong kejahatan perang menurut Pasal 8(2)(b)(i) yaitu sengaja menyerang warga sipil, atau Pasal 8(2)(b)(ii) yaitu sengaja menyerang objek sipil.

Tuduhan terakhir yang kita bahas adalah tentang perisai manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8(2)(b)(xxiii), intinya kejahatan perang ini adalah jika sebuah pasukan memanfaatkan keberadaan warga sipil atau

objek dilindungi lainnya, supaya musuh ragu untuk menyerang objek militer di wilayah tersebut. Dengan kata lain, berlindung di balik objek sipil. Di sini, Hamas dituduh menempatkan posisi-posisi militernya di wilayah-wilayah Gaza yang sangat padat penduduk sehingga Israel 'terpaksa' menyerang wilayah sipil untuk bisa mensasar pasukan Hamas. Mungkin masih banyak yang dapat dibahas, tapi keterbatasan *space* menghalangi itu.

Akan tetapi, apabila memang "adil" yang diinginkan, maka perlu kita cermati dengan lebih teliti tuduhan-tuduhan di atas. Penting dipahami bahwa istilah "kejahatan perang" atau War Crime adalah sebuah terminologi khusus untuk pelanggaran-pelanggaran berat terhadap Hukum Humaniter Internasional atau HHI (Dörmann, Doswald-Beck, dan Kolb, 2004). Sedangkan HHI adalah, sederhananya, hukum yang mengatur perilaku para pihak dalam sebuah konflik bersenjata (Solis, 2010). Harus diakui perbuatan-perbuatan HAMAS di atas zahirnya nampak melanggar HHI, tetapi perlu dilakukan tinjauan lebih dalam atas hal tersebut dari sudut maksud dan tujuan HHI yang berbasis perjanjian-perjanjian internasional. Pasalnya, jiwa inti pada suatu penafsiran suatu perjanjian internasional adalah dengan mempertimbangkan maksud dan tujuannya (Villiger, 2009).

HHI sendiri memiliki tujuan asal untuk mengurangi dampak buruk dari konflik bersenjata yang sudah terlanjur terjadi (Sassoli dan Bouvier, 2006). Akan tetapi, pihak-

pihak yang bertikai tentunya memiliki kebutuhannya sendiri. Dalam perang, banyak yang dipertaruhkan. Sebagian berperang karena kerakusannya. Akan tetapi, bukan sedikit yang berperang demi mempertahankan kelangsungan hidup bangsanya. Terkadang mereka berperang demi memperjuangkan kemerdekaan dari penjajah.

Apabila hukum mengatur sedemikian terlalu ketat sampai sulit bermanuver apalagi sampai merugikan, apa ada yang mau menjalaninya?

Karena itulah, pada pondasinya HHI harus menyeimbangkan atau bahkan "bermain tarik tambang" antara mendorong perilaku kombatan yang se-manusiawi mungkin dan mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan militer (Muhammadin dan Afla, 2023). Bersama dengan kewajiban-kewajiban yang diembankan pada para pihak yang bertikai, ada juga kompromi realistis. Kompromi ini semakin rumit apabila ditinjau dari kondisi perang yang asimetris, yaitu ketika ada ketimpangan yang sangat eksponensial antara para pihak yang bertikai. Palestina adalah salah satu contoh asimetri yang sangat jelas. Para pejuangnya mungkin cuma sekian ribu personel, persenjataan terbatas, tidak punya kendaraan lapis baja, tidak punya angkatan laut apalagi udara. Dana jelas sangat tipis, terutama Gaza kondisinya kelaparan dan minim air serta listrik, dan wilayahnya praktis terkepung Israel sehingga bantuan keluar masuk amat terbatas. Bisa punya

roket ala kadarnya dan senjata api pas-pasan pun sudah luar biasa.

Di sisi lain, Israel dengan ratusan ribu personel aktif dan jutaan pasukan cadangan, memiliki persenjataan dan teknologi yang sangat canggih didukung dengan kendaraan lapis baja, angkatan laut dan udara, yang bisa menyerang Palestina dari jarak sangat jauh dan sangat destruktif. Belum lagi suntikan dana triliunan US$, aliansi dari negara-negara adidaya dunia, serta akses tidak terbatas ke sumberdaya dari negara-negara maju lainnya. Ditambah lagi, akses sumberdaya ke Palestina pun dicengkeram oleh mereka. Kendali atas air, misalnya, telah menjadi salah satu instrumen kolonial yang lama dibangun oleh Israel (Nijim, 1990). Terutama di Tepi Barat hingga sekarang, entah sudah berapa warga Israel merampas rumah milik penduduk Palestina yang tidak berdaya membalas apapun.

Dengan ketimpangan kekuatan yang sangat besar ini, bukan hanya dari segi potensi kekuatan melainkan juga cengkeraman riil dan fisik Israel atas wilayah Palestina sekarang, Hamas tidak memiliki peluang untuk melawan dengan cara yang fair.

Dengan lebih lima ribu warga Palestina yang ditahan oleh Israel secara serampangan, belum menghitung yang dibunuh, belum menghitung sekian ratus ribu warga Paletsina yang rumahnya dirampas di Tepi Barat, tentu perlu memutar otak panjang untuk mencari cara

membebaskan mereka. Sedangkan Hamas berpengalaman menukar satu sandera Israel (Kopral Gilad Shalit) dengan dibebaskannya seribu lebih warga Palestina yang ditahan tahun 2011. Kali ini, Hamas ingin memiliki "alat tukar" untuk membebaskan semua warga Palestina yang ditahan oleh Israel (Aljazeera, 2023).

Sedangkan tembakan roket Hamas yang sangat tidak akurat sehingga sering meleset ke pemukiman sipil, atau sengaja karena tidak mampu mengarahkan ke markas militer Israel, atau malah gagal meluncur jauh dan (menurut sebagian teori) jatuh ke rumah sakit Al-Ahli, tentunya akan sangat terhindarkan andaikan Hamas memiliki persenjataan yang lebih canggih lagi. Akan tetapi, rasanya logis menduga bahwa, andaikan Hamas mampu memiliki persenjataan yang lebih canggih, pastilah ia sudah menggunakannya. Terakhir tentang perisai manusia, agak pelik juga masalah ini. Sebagaimana dilansir oleh NBC News (2023), Gaza adalah wilayah yang sangat padat. Barangkali ke manapun Hamas meletakkan posisi-posisi militernya, selalu akan dekat dengan pemukiman sipil. Kecuali ke laut, tentunya, atau ke langit.

Maka dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, kita harus merenungkan beberapa hal: apakah seharusnya tahanan Palestina sabar saja menunggu kebaikan hati Israel membebaskan? Jika Hamas memang belum bisa punya senjata super canggih dan lokasi aman untuk meletakkan

posisi militer, apakah berarti mereka tidak berhak melawan penjajah mereka?

Sebenarnya dalam konsep Kejahatan Perang ada perwujudan kompromi yang saya jelaskan sebelumnya. Dalam membuktikan Kejahatan Perang pada Pasal 8(2)(b)(iv) Statuta Roma di atas, salah satu unsurnya adalah kerusakan non-kombatan yang tidak proporsional dibandingkan kebutuhan militer. Hal ini mencakup mempertimbangkan situasi kondisi riil lapangan sesuai pertimbangan komandan pasukan (Dörmann, Doswald-Beck, dan Kolb, 2004). Selain itu, duress dan pembelaan terhadap diri atau orang lain dapat menjadi pengecualian terhadap kejahatan (pemaaf dan justifikasi) sesuai Pasal 30 Statuta Roma.

Tapi, masalahnya, Hamas sudah mendapatkan cap terburuk: "ekstrimis Islam". Prejudis kuno yang sudah lama dipakai misalnya oleh media barat Barat khususnya New York Times (1945) yang melabeli pejuang kemerdekaan Indonesia pada Perang Surabaya tahun 1945 sebagai *Moslem Fanatics*. Taktik ini tentu memiliki wajah dan konteks yang baru, tapi muaranya sama: mendelegitimasi pejuang kemerdekaan. Konferensi Asia dan Afrika tahun 1955 mewakili gerakan dekolonisasi yang masif termasuk di akademia hukum internasional (eds. Eslava, Fakhri, & Nesiah, 2017). Dekolonisasi dan kemerdekaan adalah dua kata yang sejatinya bermakna sama. Gerakan ini berpijak

pada afirmasi terhadap pihak-pihak lemah dalam asimetri ekstrim akibat kolonialisme.

Maka pertanyaan paling penting yang kita harus renungkan: apakah Hamas, gerakan yang paling mampu melakukan perlawanan riil melawan penjajah di Palestina, tidak berhak atas afirmasi ini?

Referensi

A Sudden Blast, Then Carnage in a Hospital Courtyard. (2023). The New York Times. https://www.nytimes.com/-2023/10/18/world/middleeast/gaza-hospital-deaths-aftermath.html

Al Attar, M. (2013). Reframing the "universality" of international law in a globalizing world. *McGill Law Journal*, *59*(1), 95–139.

Dormann, K., Doswald-Beck, L., & Kolb, R. (2004). *Elements of War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court*. Cambridge University Press.

Eslava, L., Fakhri, M., & Nesiah, V. (2017). *Bandung, Global History, and International Law: Critical Pasts and Pending Futures*. Cambridge University Press.

Hamas says it has enough Israeli captives to free all Palestinian prisoners. (2023). Aljazeera. https://www.aljazeera.com/news/2023/10/7/hamas-says-it-has-enough-israeli-captives-to-free-all-palestinian-prisoners

Moslem Fanatics Fight in Surabaya: Religious Leaders in Charges Against Tanks--New Peril Is Feared in Batavia.

(1945). New York Times. https://www.nytimes.com/1945/11/20/archives/moslem-fanatics-fight-in-surabaya-religious-leaders-in-charges.html

Muhammadin, F. M., & Afla, A. M. (2023). Hukum Internasional dan Konflik Bersenjata. In F. M. Muhammadin (Ed.), *Hukum Internasional*. Buku Belaka.

Nijim, B. K. (1990). Water resources in the history of the Palestine-Israel conflict. *GeoJournal*, *21*, 317–323.

Sassoli, M., & Bouvier, A. A. (2006). *How Does Law Protect In War?* (Vol. 1). The International Committee ofthe Red Cross.

Solis, G. D. (2010). *The Law of Armed Conflict: International Humanitarian Law in War*. Cambridge University Press.

Villiger, M. E. (2009). *Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties*. Martinus Nijhoff Publishers.

WHO statement on attack on Al Ahli Arab Hospital and reported large-scale casualties. (2023). World Health Organization. https://www.who.int/news/item/17-10-2023-who-statement-on-attack-on-al-ahli-arab-hospital-and-reported-large-scale-casualties

Wu, J., Murphy, J., & Chiwaya, N. (2023). *The Gaza Strip's density, visualized*. NBC News. https://www.nbcnews.com/specials/gaza-strip-map-density-israel-hamas-conflict/index.html

VI

PREVENTIVE DIPLOMACY DALAM PERANG DI GAZA TAHUN 2023

Rizki Rahmadini Nurika

Konflik antara Israel dengan Palestina kembali bereskalasi sejak adanya serangan dari Kelompok Pejuang Palestina, Hamas, pada 7 Oktober 2023, berupa ribuan roket yang diluncurkan dari Jalur Gaza ke wilayah Israel. Aksi tersebut menuai reaksi keras dari pemerintah Israel karena dinilai sebagai serangan paling mengerikan yang dirasakan oleh Israel dalam 50 tahun terakhir (Jo, 2023). Pemerintah Israel kemudian melakukan serangan balasan terhadap Hamas dengan membombardir Gaza tanpa henti, serta diikuti dengan pemutusan akses listrik dan komunikasi di wilayah itu.

Perang di Gaza berakibat pada meningkatnya krisis kemanusiaan. Angka kematian penduduk semakin bertambah setiap harinya, baik penduduk yang berwarga Palestina, maupun warga asing dari Italia, Ukraina, dan Amerika Serikat (Al-Mughrabi & Williams, 2023). Di sisi

lain, ketersediaan makanan, air, bahan bakar, tempat tinggal yang aman, dan layanan kesehatan juga semakin terbatas (United Nations University, 2023). Krisis kemanusiaan ini kemudian menarik perhatian masyarakat internasional. Aksi dukungan terhadap Palestina bergejolak di berbagai belahan dunia, tidak hanya di negara yang mayoritas warganya adalah Muslim, tetapi juga yang Non-Muslim. Mereka mengecam serangan Israel ke Gaza karena dinilai terlalu brutal dan membabi buta, mengingat bahwa serangan tersebut seharusnya ditujukan hanya kepada Hamas, tetapi nyatanya justru turut menyasar para penduduk Palestina yang tidak bersalah.

Reeskalasi konflik Israel-Palestina membutuhkan suatu upaya *preventive diplomacy*. Menurut Boutros Ghali, *preventive diplomacy* adalah tindakan untuk (1) mencegah munculnya pertikaian (*prevention*), (2) mencegah pertikaian bereskalasi menjadi konflik (*non-escalation*), dan (3) mencegah perluasan konflik (*containment of conflict*) (Ghali, in Norkus, 2006). Dari ketiga jenis *preventive diplomacy*, yang paling relevan dengan konteks perang di Gaza adalah jenis yang ketiga. Jenis yang pertama dan kedua menjadi kurang relevan karena untuk konteks perang di Gaza, pertikaian sudah muncul dan sudah bereskalasi menjadi konflik, bahkan hingga mencapai titik klimaks dari konflik, yaitu perang. Jika mempertimbangkan krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza, maka sesuai dengan tujuannya, *preventive diplomacy* dapat diharapkan sebagai upaya untuk

segera menghentikan penderitaan penduduk Palestina yang tidak bersalah dan mengakhiri penggunaan kekuatan militer dalam konflik.

Preventive diplomacy dapat dilakukan melalui 4 agenda, yaitu *official negotiation*, *conflict mediation*, *intelligence gathering*, dan *confidence-building measures*. Jika *preventive diplomacy* pada era sebelum Perang Dingin hanya dapat dilakukan oleh kepala negara, maka *preventive diplomacy* pada era kontemporer justru tidak hanya dilakukan oleh aktor negara, tetapi juga berbagai organisasi dan bahkan individu di seluruh dunia (Djibom, 2008). Dalam konteks perang di Gaza, keempat agenda *preventive diplomacy* tersebut sebenarnya telah diupayakan baik oleh aktor negara maupun aktor non-negara. Namun, hingga akhir Oktober 2023, hanya 2 dari 4 agenda tersebut yang tampak menunjukkan perkembangan positif. Sedangkan, 2 agenda sisanya belum menunjukkan perkembangan signifikan, sehingga upaya *preventive diplomacy* belum dapat dilakukan secara komprehensif.

Pertama, *official negotiation*. Dalam agenda ini, sebelumnya Hamas telah memiliki inisiatif untuk menawarkan negosiasi kepada pemerintah Israel. Pendiri Hamas, Sheikh Ahmed Yassin, setuju untuk bernegosiasi dengan pemerintah Israel jika pemerintah Israel terlebih dahulu mengakui hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan hak untuk kembali ke tanah mereka (Foster, 2023). Dalam perang di Gaza sejak 7 Oktober 2023 pun,

Hamas juga telah menawarkan negosiasi kepada pemerintah Israel untuk melepaskan penduduk Israel yang menjadi tawanan Hamas (Mohanna, 2023). Terdapat sekitar 220 penduduk Israel yang ditawan oleh Hamas dalam perang tersebut. Meskipun demikian, pemerintah Israel secara tegas menolak segala tawaran negosiasi yang diajukan oleh Hamas (Gadzo, Shankar, & Marsi, 2023). Mereka berkomitmen untuk tidak melakukan negosiasi apapun dengan Hamas, dan akan mencari cara tersendiri untuk membebaskan para tawanan tersebut (Keller-Lyn, 2023).

Kedua*, conflict mediation*. Beberapa negara berinisiatif untuk menawarkan diri sebagai pihak ketiga dalam peperangan antara Hamas dengan Israel. Turki adalah salah satunya. Turki, yang memiliki hubungan lama dengan Hamas, mendesak kedua pihak untuk menahan diri dan melindungi warga sipil Israel dan Gaza. Selain itu, Turki juga tengah melakukan pendekatan kepada Hamas untuk membebaskan warga Israel yang menjadi tawanan mereka (Zulfikar, 2023). Selain Turki, upaya mediasi juga dilakukan oleh Qatar dan Mesir. Berkat peran dari kedua negara tersebut, Hamas bersedia untuk melepaskan 2 warga Israel yang menjadi tawanan mereka. Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran dari Qatar yang melakukan komunikasi secara intens dengan Hamas selama beberapa hari. Kedekatan antara Qatar dengan Hamas menjadi salah satu peluang bagi Qatar untuk memainkan perannya sebagai mediator (Fahim, 2023).

Ketiga, *intelligence gathering*. Di tengah peperangan antara Hamas dengan Israel yang masih berlangsung, 15 negara yang menjadi anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) bertemu untuk membahas resolusi yang terbaik dalam konflik antara Israel dan Palestina. Namun, negosiasi di antara mereka mengalami *deadlock*. Rusia mengajukan draf resolusi yang mendorong gencatan senjata. Draf ini disetujui oleh 5 anggota dan ditolak oleh 4 anggota DK PBB, sehingga tidak dapat dilanjutkan. Dalam hal ini, Amerika Serikat menolak karena dalam draf tersebut tidak menyatakan kelompok militan Hamas Palestina sebagai "teroris". Selain Rusia, Amerika Serikat juga mengajukan draf resolusi yang mendorong penanganan krisis kemanusiaan di Gaza. Draf yang diajukan oleh Amerika Serikat pun gagal karena ditolak dengan hak veto dari Tiongkok dan Rusia. Mereka menilai bahwa draf tersebut hanya menuntut adanya jeda kemanusiaan atau jeda perang, tanpa mengharuskan adanya gencatan senjata secara penuh. Hak veto itu juga merupakan akibat dari pernyataan Amerika Serikat tentang hak Israel dalam membela diri (Ahdiat, 2023). Hingga pada 27 Oktober 2023, Majelis Umum PBB menyetujui Resolusi Gencatan Senjata Israel-Hamas demi alasan kemanusiaan, dan menuntut akses bantuan ke Jalur Gaza serta perlindungan bagi warga sipil. Resolusi ini dirancang oleh negara-negara Arab, kemudian disetujui oleh 120 suara,

sedangkan 45 suara abstain, dan 14 negara tidak menyetujui, termasuk Israel dan Amerika Serikat (Matthews, 2023). Majelis Umum PBB melakukan pemungutan suara setelah DK PBB mengalami kegagalan dalam mengambil tindakan. Resolusi tersebut tidak menyebutkan nama Hamas, tetapi menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat bagi semua warga sipil yang ditawan secara ilegal dan menuntut keselamatan dan perlakuan manusiawi, serta mengutuk serangan terhadap warga sipil Palestina dan Israel (Sandi, 2023).

Keempat, *confidence building-measures*. Berbagai upaya *confidence-building measures* telah dilakukan oleh komunitas internasional dengan melakukan pendekatan secara personal baik ke pihak Hamas maupun pihak pemerintah Israel. Pertimbangan terhadap aspek kemanusiaan menjadi hal yang paling disoroti untuk membuat kedua belah pihak meletakkan senjatanya. Selama periode 7-25 Oktober 2023, perang di Gaza telah menimbulkan sekitar 8000 korban jiwa dan 24.700 korban luka dari Israel dan Palestina (Ahdiat, 2023). Namun, besarnya ambisi Hamas maupun pemerintah Israel telah membuat keduanya mengesampingkan aspek kemanusiaan dan lebih memilih untuk memenangkan peperangan itu.

Referensi

Ahdiat, A. (2023). Perang Israel-Palestina Tewaskan 8000 Orang, DK PBB Masih Berdebat. Retrieved October 27,

2023, from https://databoks.katadata.co.id/data-publish/2023/10/26/perang-israel-palestina-tewaskan-8000-orang-dk-pbb-masih-berdebat

Al-Mughrabi, N., & Williams, D. (2023). Israel on War Footing, Hamas Threatens to Kill Captives. Retrieved October 23, 2023, from https://www.reuters.com/-authors/nidal-al-mughrabi/

Djibom, J. (2008). An Analysis of Hammarskjöld's Theory of Preventive Diplomacy, 1–51. Retrieved from http://cdn.peaceopstraining.org/theses/djibom.pdf

Fahim, K. (2023). In Gaza War, Qatar Revisits Role as Regional Mediator. Retrieved October 27, 2023, from https://www.washingtonpost.com/world/2023/10/21/qatar-gaza-hostages-american/

Foster, Z. (2023). Israel Rejected Peace with Hamas on Five Occasions. Retrieved October 25, 2023, from https://inkstickmedia.com/israel-rejected-peace-with-hamas-on-five-occasions/

Gadzo, M., Shankar, P., & Marsi, F. (2023). Israel-Gaza War Updates: Hamas Says Israel Refused Offer to Free 2 Hostages. Retrieved October 26, 2023, from https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2023/10/20/israel-gaza-war-live-hamas-releases-two-american-captives-from-gaza

Jo, B. (2023). Siapa Pejuang Hamas di Palestina & Mengapa Menyerang Israel? Retrieved October 23, 2023, from

https://tirto.id/sejarah-pejuang-hamas-palestina-alasannya-menyerang-israel-hari-ini-gQRd

Keller-Lyn, C. (2023). Hanegbi: Israel Won't Negotiate with Hamas on Hostages Now, Will Remove It from Power. Retrieved October 27, 2023, from https://www.times-ofisrael.com/hanegbi-israel-wont-negotiate-with-hamas-on-hostages-now-will-remove-it-from-power/

Matthews, B. (2023). Majelis Umum PBB Setujui Resolusi untuk Gencatan Senjata di Gaza. Retrieved October 28, 2023, from https://www.voaindonesia.com/a/majelis-umum-pbb-setujui-resolusi-untuk-gencatan-senjata-di-gaza-/7330799.html

Mohanna, N. (2023). Israel Refuses to Negotiate on Release of Hostages, Hamas Says. Retrieved October 26, 2023, from https://www.thenationalnews.com/mena/palestine-israel/2023/10/25/israel-refusing-to-negotiate-on-release-of-hostages-hamas-says/

Norkus, R. (2006). A Conceptual Framework of Conflict Prevention. *Iai*, (December), 23–24.

Sandi, F. (2023). Daftar 120 Negara Sepakat Gencatan Senjata Israel-Hamas. Retrieved October 28, 2023, from https://www.cnbcindonesia.com/news/20231028175621-4-484495/daftar-120-negara-sepakat-gencatan-senjata-israel-hamas

United Nations University. (2023). UNU Statement on the Israel-Gaza Crisis. Retrieved October 23, 2023, from

https://unu.edu/announcement/unu-statement-israel-gaza-crisis

Zulfikar, L. S. (2023). Erdogan Perintahkan Negosiasi untuk Akhiri Konflik Hamas-Israel di Gaza. Retrieved October 27, 2023, from https://rejogja.republika.co.id/berita/s2eoe6291/erdogan-perintahkan-negosiasi-untuk-akhiri-konflik-hamasisrael-di-gaza

VII

BABAK BARU KONFLIK PALESTINA-ISRAEL: URGENSITAS DAN EFEKTIVITAS SUARA NEGARA-NEGARA ISLAM DALAM PENYELESAIAN KONFLIK

Rizki Damayanti

Konflik Palestina-Israel memasuki babak baru. Diawali dengan aksi kelompok *Harakat al-Muqawamah al-Islamiyyah* (Hamas), yang menghujani wilayah Israel dengan roket pada Sabtu 7 Oktober 2023, Israel kemudian menyatakan perang dan mulai meluncurkan serangan balasan. Selama 7-25 Oktober 2023, babak baru konflik Palestina-Israel ini telah menimbulkan sekitar 8.000 korban jiwa dari kedua belah pihak.

Beberapa negara Islam, seperti Iran, Arab Saudi, dan Turki, termasuk juga Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, telah memberikan reaksi kecaman dan menyatakan bahwa serangan Israel ke

wilayah Gaza merupakan wujud ketidakadilan terhadap rakyat Palestina, sehingga komunitas internasional harus menyikapinya dari sudut pandang moral dan kemanusiaan. Meskipun mayoritas suara Islam ini menyatakan dukungan kepada otoritas Palestina, tetapi faktanya efektivitas suara negara-negara ini dalam menyikapi babak baru konflik Palestina-Israel berbeda-beda dan bisa jadi rumit. Hal ini dikarenakan masing-masing negara mempunyai kepentingan, pendekatan, dan tingkat pengaruhnya dalam konflik, sekaligus mempunyai aspek positif dan negatif dalam keterlibatannya.

Iran misalnya, hanya tiga hari setelah serangan besar-besaran Hamas terhadap Israel, Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei tidak hanya memuji operasi Hamas dengan sangat keras, tetapi juga menegaskan bahwa mereka yang meragukan bahwa ini adalah "hasil karya" rakyat Palestina "*do not know the Palestinian nation and are miscalculating*" ("tidak mengenal bangsa Palestina dan salah perhitungan"). Terkait hal ini, meskipun tidak ada bukti konklusif yang secara langsung mengarah kepada Iran, keberhasilan serangan Hamas yang diatur dengan cermat dan ditandai dengan tingginya koordinasi, telah membuat banyak pihak berspekulasi bahwa Iran terlibat. Iran sendiri, pada tanggal 15 Oktober 2023, melalui Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian, menyampaikan pesan kepada Israel melalui sekutunya bahwa jika mereka tidak menghentikan kekejaman di Gaza, maka

Iran tidak bisa hanya menjadi pengamat." Sayangnya, hanya beberapa jam kemudian, misi Iran di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melunak dan mengeluarkan pernyataan yang menekankan bahwa jika Israel "tidak berniat menyerang Iran, kepentingannya, dan warganya, maka Iran tidak akan melakukan intervensi dalam konflik ini." Dua hari kemudian, pada tanggal 17 Oktober 2023, Khamenei mengeluarkan peringatan keras kepada Israel, dengan menyatakan, "Jika kejahatan rezim Zionis terus berlanjut, umat Islam dan kekuatan perlawanan akan menjadi tidak sabar, dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka." Sikap dan pernyataan Iran yang tampaknya saling bertentangan ini menunjukkan inkonsistensi Iran dalam pendekatannya terhadap krisis Gaza. Iran dinilai berupaya mendapatkan poin propaganda dari krisis ini dengan berupaya menghindari terjadinya perang yang lebih luas. Dalam konteks ini, keterlibatan langsung Iran dalam perang dengan Israel berpotensi mengundang intervensi Amerika Serikat (AS), yang dipandang akan mengakibatkan kerugian besar bagi Iran, terutama dapat mengakibatkan hilangnya komando dan kendali, bahkan berpotensi menyebabkan keruntuhan pemerintahan.

Turki melalui pernyataan Presiden Recep Tayyip Erdogan, mengutuk blokade dan pemboman Israel di Jalur Gaza yang terkepung, dan menyebutnya sebagai pembantaian. Erdogan menyatakan bahwa perang sekalipun memiliki "moralitas". Namun pengeboman Israel di Gaza

telah sangat melanggar moralitas tersebut, bahkan dinyatakan sebagai tragedi kemanusiaan. Turki secara tegas mengumumkan bahwa prioritas negaranya adalah mendorong gencatan senjata segera dan Turki akan melakukan upaya untuk membangun landasan bagi konferensi perdamaian internasional. Erdogan juga mendesak negara-negara di Amerika, Eropa, dan kawasan lain untuk mengambil sikap yang adil dan berdasarkan pertimbangan kemanusiaan. Turki memandang, membiarkan konflik ini tidak terselesaikan akan menimbulkan konflik baru yang lebih kejam. Sikap Turki ini sekaligus menunjukkan dukungan yang konsisten bagi Palestina, dan berbeda dengan Uni Eropa (UE) juga AS, Turki tidak menganggap Hamas sebagai organisasi "teroris".

Arab Saudi juga mengecam operasi darat Israel di Gaza dan menyerukan gencatan senjata segera. Arab Saudi bahkan memperingatkan AS bahwa invasi Israel ke Gaza dapat menjadi bencana besar, dimana para pejabat Arab Saudi menggambarkan serangan Israel terhadap Gaza sebagai pukulan yang berpotensi menghancurkan stabilitas di Timur Tengah. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengatakan bahwa mereka mengutuk "setiap operasi militer darat yang dilakukan oleh Israel di Jalur Gaza karena ancamannya terhadap kehidupan warga sipil Palestina." Kementerian Luar Negeri Arab Saudi juga mendesak masyarakat internasional untuk memikul tanggung jawabnya dalam

menjamin gencatan senjata segera berdasarkan resolusi PBB, dimana Majelis Umum PBB menyetujui resolusi yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan. Pangeran Mohammed dalam pembicaraannya dengan Presiden AS Joe Biden, menegaskan pentingnya upaya menuju perdamaian berkelanjutan antara Israel dan Palestina segera setelah krisis mereda. Pangeran Mohammed juga menekankan kebutuhan mendesak untuk menghentikan operasi militer dan kembali ke proses perdamaian untuk memastikan bahwa rakyat Palestina mendapatkan hak-hak mereka yang sah. Meskipun demikian, dukungan yang dinyatakan oleh Arab Saudi ini dalam konteks ditujukan kepada rakyat Palestina dan tidak menyebutkan "negara Palestina".

Indonesia secara tegas mengutuk serangan di Gaza yang telah mengakibatkan penderitaan rakyat dan semakin banyaknya korban sipil, termasuk perempuan dan anak-anak. Presiden Joko Widodo mengutuk serangan Israel terhadap Rumah Sakit Baptis Al-Ahli yang melanggar hukum kemanusiaan internasional. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang ikut menghadiri pertemuan luar biasa para Menteri Luar Negeri Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Jeddah, juga menyatakan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam ketika korban sipil terus bertambah dan menyaksikan ketidakadilan yang terus terjadi terhadap rakyat Palestina. Indonesia bersama OKI menyampaikan pesan yang kuat kepada dunia untuk menghentikan eskalasi konflik, menghentikan tindakan kekerasan, fokus

pada masalah kemanusiaan, dan menyelesaikan akar permasalahan yaitu pendudukan Israel di wilayah Palestina. Indonesia juga meminta para pemimpin dunia membangun solidaritas global untuk menyelesaikan permasalahan Palestina secara adil dengan memperhatikan parameter internasional yang telah disepakati. Indonesia berjanji akan terus menyampaikan pentingnya penyelesaian konflik Palestina-Israel di berbagai forum internasional.

Suara negara-negara Islam yang secara mayoritas menyatakan dukungan bagi Palestina ini, sayangnya, efektivitasnya sangat bervariasi dan bergantung pada berbagai faktor politik, diplomatik, dan regional. Dalam hal ini, peran dan urgensitas suara negara-negara Islam ini dapat bersifat konstruktif dalam beberapa hal, namun juga menghadirkan tantangan dalam mencapai resolusi konflik yang komprehensif dan langgeng. Suara Islam memang memainkan peran penting dalam mengadvokasi hak-hak warga Palestina, meningkatkan kesadaran tentang konflik, dan mempengaruhi respon regional dan internasional. Namun, penyelesaian konflik pada akhirnya akan bergantung pada pendekatan multifaset yang melibatkan upaya diplomasi, kerja sama internasional, dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Khusus untuk Indonesia, suara Indonesia dalam mengadvokasi penyelesaian konflik Palestina-Israel pada dasarnya adalah suara moral dan diplomatis. Meskipun hingga saat ini Indonesia

belum mampu memainkan peran optimal dalam menyelesaikan konflik di antara pihak-pihak yang terlibat, tetapi dukungan Indonesia yang konsisten terhadap perjuangan Palestina, akan menambah suara global yang mengupayakan penyelesaian yang damai dan adil.

Referensi

"Indonesia Condemns Attacks in Gaza", https://setkab.go.id/en/indonesia-condemns-attacks-in-gaza/

Kasim, Samar L., "Saudi Arabia Slams Israeli Ground Operation in Gaza, Calls for Immediate Truce", https://www.aa.com.tr/en/middle-east/saudi-arabia-slams-israeli-ground-operation-in-gaza-calls-for-immediate-truce/3036225.

Kelly, Kate, "Saudi Arabia Warns U.S.: Israeli Invasion of Gaza Could Be Catastrophic", https://www.nytimes.com/2023/10/27/world/middleeast/saudi-arabia-israel-us-invasion.html

Shahidsaless, Shahir, "Decoding Iran's Position on the Gaza War", https://www.stimson.org/2023/decoding-irans-position-on-the-gaza-war/

"Turkey's Erdogan Calls Israeli Siege and Bombing of Gaza a 'Massacre", https://www.aljazeera.com/news/-2023/10/11/turkeys-erdogan-calls-israeli-siege-and-bombing-of-gaza-a-massacre

VIII

PALESTINA DALAM PASIFNYA DUNIA ISLAM

Ramdhan Muhaimin

Pemerintah Indonesia berhasil mengevakuasi satu keluarga WNI yang terdiri dari 4 orang keluar dari Jalur Gaza *(Gaza Strip)* (Ulya, 2023), wilayah yang saat ini sedang di bombardir militer zionisme Israel. Dalam keterangan-nya, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menjelaskan bahwa proses evakuasi satu keluarga WNI tersebut sangat sulit. Beberapa kali upaya menge-luarkan mereka dari wilayah perang di Gaza harus dibatal-kan (Toriq Aqua, 2023). Total ada 10 WNI yang tinggal di Gaza. Pemerintah Indonesia masih terus berupaya meng-evakuasi sisanya untuk keluar dari Gaza (Toriq Aqua, 2023; Ulya, 2023), sebagai implementasi amanah konstitusi dan tujuan politik luar negeri RI.

Bukan hanya Indonesia, sejumlah negara asing juga berupaya menyelamatkan warganya untuk keluar dari wilayah konflik Timur Tengah, khusunya Gaza dan Israel. Karena peperangan Palestina menghadapi Israel telah

meluas ke Suriah dan Lebanon. Kelompok Houthi di Yaman bahkan juga ikut terjun dalam peperangan ini mendukung Palestina (Cahyani, 2023; Deutche Welle, 2023). Jerman mengirim 1000 tentara elitnya ke Syprus, pulau di Laut Mediterania tidak jauh dari pantai Palestina. Dalam keterangan resmi Pemerintah Jerman, pengerahan pasukan tersebut dalam rangka pengevakuasian warganya dari wilayah konflik di Timur Tengah. Juga untuk anti-sipasi lain sebagai akibat dari eskalasi yang tidak terkendali di kawasan (MSN, 2023). Amerika Serikat lebih dulu telah mengirimkan tentara dan dua kapal perang induknya yaitu USS Dwight Eisenhower dan USS Gerald Ford ke Laut Mediterania. Sebanyak 900 tentara AS dikirimkan untuk dukungan terhadap 40.000 tentaranya yang sudah tersebar di basis militer mereka di Timur Tengah (Haley Britzky, 2023; Jacob Knutson, 2023). Inggris, Rusia, dan China juga tidak ketinggalan mengerahkan kapal-kapal perangnya ke dekat wilayah konflik di Timur Tengah dengan motif kepentingan nasional masing-masing terkait eskalasi perang Palestina-Israel yang terus meningkat .

Evakuasi Warga Gaza, Siapa Bertanggung Jawab?

Sementara sejumlah negara sibuk berupaya menge-luarkan warga negaranya keluar selamat bukan hanya dari Palestina dan Israel, lalu bagaimana dengan warga Palestina sendiri yang terjebak di Gaza? Bagaimana dengan hak asasi mereka untuk hidup dan merdeka? Siapa yang

harus bertanggung jawab untuk mengevakuasi mereka dari wilayahnya yang saat ini digempur Israel? Dan siapa yang seharusnya bertanggung jawab menghentikan kebrutalan militer zionisme?

Peperangan Palestina menghadapi Israel telah berlangsung 25 hari sejak serangan mendadak HAMAS *(Harakah Al Muqawwamah Al Islamiyah/Gerakan Perlawanan Islam)* pada 7 Oktober 2023. Korban meninggal dari pihak Palestina sudah menembus angka 9000 jiwa per 3 November 2023. Sebanyak 3000 lebih diantaranya adalah wanita dan anak-anak. Lebih dari 22 ribu lainnya terluka, dan 2000 orang lainnya masih hilang (IMEMC News, 2023). Ratusan ribu bangunan infrastruktur di Gaza hancur oleh serangan udara Israel, termasuk fasilitas rumah sakit, sekolah, universitas, tempat ibadah, tempat tinggal, dan gedung-gedung lainnya.

Tidak ada wilayah Gaza yang aman dari serangan brutal militer Israel. Wilayah utara Gaza menjadi wilayah paling parah dan hancur akibat serangan-serangan Israel. Warga Gaza tidak dapat lari menyelamatkan diri mereka dari wilayah yang sudah di-*border* oleh Israel dengan tembok setinggi 8-9 meter dan ketebalan 1 meter serta memanjang hingga 700 km. Banyak warga Gaza yang lari ke Selatan menuju Rafah yang menjadi pintu perbatasan dengan wilayah Sinai, Mesir. Tapi pintu Rafah sering ditutup pemerintah Mesir dengan alasan keamanan. Tidak saja itu, Israel bahkan memutus aliran listrik, air, dan gas

ke wilayah Gaza. Akibatnya, ketakutan dan kengerian yang dialami warga Gaza bertumpuk-tumpuk. Apa yang terjadi di Gaza, bukan saja disebut peperangan tidak seimbang *(asimetris war)* melawan kolonialisme (Donnelly et al., 2018; Gawerc, 2018), tapi lebih tepat disebut sebagai pembantaian, genosida *(genocide)* (Nijim, 2023), dan pembersihan etnik *(ethnic cleansing)* (Sulejmani, 2019).

Jika ada pasukan penjaga perdamaian *(Peace Keeping Force)* PBB di Palestina, mungkin saja eskalasi konflik seperti yang berlangsung saat ini bisa tidak terjadi. Maka otomatis, korban sipil bisa dihindarkan. Bukankah PBB saat ini telah menempatkan *Peace Keeping Force* di 12 titik konflik di dunia, diantaranya seperti Libanon, Sudan, Sahara Barat, Kongo, Afrika Tengah, Mali, Haiti, dan Libya? (UN Peacekeeping, 2023). Tidakkah peperangan dan pelanggaran kemanusiaan yang terjadi di Palestina justru lebih berat dari konflik-konflik lain di belahan bumi lainnya? Bukankah masalah di Palestina juga persoalan kemanusiaan? Mengapa pelanggaran kemanusiaan yang jelas di depan mata masyarakat dunia bertahun-tahun tapi tidak mampu menggerakkan PBB untuk menempatkan pasukan perdamaian di sana? PBB sebagai organisasi internasional yang menerima mandat keamanan dunia dan Hak Asasi Manusia, seharusnya memiliki resolusi prerogatif untuk menekan peperangan. Bahkan sejak konflik pertama kali terjadi tahun 1948 dan 1956, PBB seharusnya sudah menempatkan pasukan perdamaiannya di sana. Sayangnya

kenyataan berbicara lain. Ada oligarki politik global di PBB. Skala konflik di bumi Palestina dipandang spesial dan rumit. Meskipun agresi Israel terus terjadi setiap hari, sedangkan dunia hanya menyaksikan tanpa aksi nyata untuk menghentikan dan menghukum Israel. Kolonialisme yang berlangsung di tanah Palestina sepertinya memang diciptakan dan dijaga untuk kepentingan politik global kekuatan-kekuatan besar di kawasan (Byman & Moller, 2016; Murden, 2002).

Tanpa bermaksud mengecilkan makna bantuan kemanusiaan yang mengalir untuk warga Palestina, akan tetapi bantuan tersebut seakan memberi arti lain bahwa dukungan dan bantuan dunia untuk Palestina hanya untuk memperkuat psikologis mereka dalam menghadapi tekanan, penjajahan, penindasan, agresi, dan penyerangan yang dilakukan Israel. Sementara dunia membiarkan panggung drama pembantaian di Palestina tetap berlangsung, sambil memberi dua bentuk dukungan kepada dua pihak yang berkonflik. Satu dukungan logistik kemanusiaan diberikan kepada pihak yang lemah agar mereka bisa bertahan menghadapi serangan. Sedangkan satu bentuk dukungan lainnya diberikan kepada pihak yang kuat agar mereka terus memberi serangan. Dan dunia hanya menonton. Jika memang demikian keadaannya yang diinginkan, maka evakuasi warga Gaza tinggallah harapan. Palestina ditinggalkan, dan warganya dibiarkan survive dan berjuang sendirian.

Dimana OKI dan Liga Arab?

Gambaran yang terjadi pada masyarakat Gaza Palestina sangat menyayat sanubari kemanusiaan. Demonstrasi *Free Palestine* terjadi di banyak negara dari Asia, Eropa, hingga Amerika. Tokoh-tokoh *public figure* dunia juga banyak yang mengekspresikan keprihatinan dan dukungannya bagi rakyat Palestina melalui sosial media. Gerakan-gerakan dukungan yang berlangsung hampir tiap pekan bahkan dalam bentuk pemboikotan restoran cepat saji di beberapa negara. Di wilayah Dagestan Rusia, warga setempat merazia penumpang pesawat asal Israel di bandara. Pemerintah China menghapus nama Israel dan menggantinya dengan Palestina pada situs peta digital di aplikasi Baidu. Pemerintah Bolivia di Amerika latin memutus hubungan diplomatik dengan Israel. Pemerintah Chechnya dan Iran mengirim relawannya untuk membantu peperangan melawan Israel. Di beberapa negara Barat, demonstran *Free Palestine* yang mayoritas berakhir ricuh dengan kelompok pro-Israel yang minoritas. Hingga Direktur HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Craig Mokhiber pun terpaksa mundur karena merasa tidak berhasil mendorong PBB untuk menghentikan Israel (Goodman, 2023). Artinya, gelombang dukungan terhadap Palestina mengalir dari minggu ke minggu. Gelombang tekanan semakin besar sampai masuk ke dalam Sidang Umum PBB yang mengeluarkan resolusi gencatan senjata.

Akan tetapi, Israel tetap tidak peduli untuk melanjutkan operasi pembantaiannya ke wilayah Gaza yang terisolasi.

Tapi yang menyayat hati lebih perih lagi adalah 'diamnya' negeri-negeri Islam yang tergabung di Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan Liga Arab atas apa yang terjadi di Jalur Gaza. Masyarakat muslim dunia bertanya-tanya, apa yang dilakukan negeri-negeri Arab dan OKI untuk menghentikan operasi militer Israel. Tidak satupun negeri-negeri muslim yang mengirimkan tentara dan kapal perangnya ke wilayah dekat Palestina, setidaknya untuk siaga dan memberikan efek gertak terhadap Israel agar menghentikan serangannya di Jalur Gaza. Berbeda justru dengan beberapa negara non-muslim seperti Jerman, AS, Rusia, Inggris, hingga China yang mengerahkan kekuatannya ke dekat wilayah konflik.

Apakah penderitaan di tanah Palestina dimana Baitul Maqdis berada harus dibenturkan dengan kepentingan nasional masing-masing negara anggota OKI? Ataukah keselamatan rakyat Palestina dan tanahnya tidak masuk dalam ruang lingkup kepentingan nasional negeri-negeri muslim? Apakah para pemimpin negeri-negeri muslim baru akan benar-benar bergerak dan menunjukkan kekuatannya ketika Masjidil Aqsha benar-benar menjadi sasaran tembak rudal-rudal Israel? Bukankah justru OKI dibentuk tahun 1969 adalah karena peristiwa pembakaran Masjidil Aqsha oleh kaum zionis?

OKI didirikan pada 25 September 1969 di Rabat, Maroko, sebagai reaksi atas peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsha oleh Israel pada 21 Agustus 1969 (OIC, 2022). Pembakaran tersebut menimbulkan kemarahan dan keprihatinan di kalangan umat Islam dan negara-negara Arab. Namun dalam perkembangannya OKI justru membangun tujuan lebih luas lagi dalam kerja sama dan solidaritas negara-negara anggota di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama, termasuk komitmen OKI untuk menghormati Piagam PBB dan hak asasi manusia. Dengan jumlah anggota sebanyak 57 negara, OKI menjadi organisasi internasional terbesar kedua setelah PBB. Hal yang dipertanyakan kemudian adalah, bagaimana komitmen dan strategi OKI dalam melindungi Masjidil Aqsha agar pembakaran dan perusakan tidak terjadi lagi, serta masyarakat Palestina di sekitar Masjidil Aqsha terjamin keamanan dan keselamatannya.

Wajar jika umat Islam saat ini banyak yang mempersoalkan eksistensi OKI dan Liga Arab. Sebab sejak peristiwa pembakaran pertama kali oleh zionis tahun 1969, keamanan Masjidil Aqsha hingga saat ini justru masih terancam dan berulang kali dirusak. Pembangunan kemakmuran dan keadilan rakyat Palestina pun tidak terwujud. OKI hanya menjadi forum perhimpunan para pemimpin negeri muslim untuk membahas masalah-masalah yang hanya berkaitan dengan kerjasama pembangunan diantara di anggotanya saja, tapi tidak terdengar

bagaimana peta jalan yang nyata untuk mewujudkan Palestina yang benar-benar merdeka dan berdaulat.

Referensi

Byman, D., & Moller, S. B. (2016). The United States and the Middle East: interests, risks, and costs. In *J. Suri, &B. Valentino, Sustainable Security …*. tobinproject.org. https://tobinproject.org/sites/default/files/assets/Byman & Moller - The United States and the Middle East_0.pdf

Cahyani, D. R. (2023). *Perang Meluas, Hizbullah Hujani Markas Militer Israel dengan Roket*. Tempo.Com. https://dunia.tempo.co/read/1792075/perang-meluas-hizbullah-hujani-markas-militer-israel-dengan-roket

Deutche Welle. (2023). *Perang Israel-Hamas: Serangan Meluas, Bantuan Masuk Gaza*. Deutche Welle. https://www.dw.com/id/perang-israel-hamas-serangan-meluas-bantuan-masuk-gaza/a-67181027

Donnelly, S., Manon, M., & Westfälische, W. (2018). *The Israel-Palestine Conflict : An Asymmetric Struggle*.

Gawerc, M. I. (2018). Building solidarity across asymmetrical risks: Israeli and palestinian peace activists. *Research in Social Movements, Conflicts and Change*, *42*(March), 87–112. https://doi.org/10.1108/-S0163-786X20180000042004

Goodman, A. (2023). *"Text-Book Case of Genocide": Top U.N. Official Craig Mokhiber Resigns, Denounces Israeli Assault*

on Gaza | Democracy Now! Democracy Now. https://www.democracynow.org/2023/11/1/craig_mokhiber_un_resignation_israel_gaza

Haley Britzky. (2023). *900 US troops have deployed or are deploying to Middle East amid heightened tensions*. CNN. https://edition.cnn.com/2023/10/26/politics/us-troops-deploying-middle-east/index.html

IMEMC News. (2023). *UN Report: 280 Palestinians Killed Overnight, Total of 8,850 since 10/7*. IMEMC News. https://imemc.org/article/un-report-280-palestinians-killed-overnight-total-of-8805-since-10-7/

Jacob Knutson. (2023). *40,000 U.S. troops in the Middle East: What to know*. AXIOS. https://www.axios.com/-2023/10/31/american-troops-middle-east-israel-palestine

MSN. (2023). *Germany prepared to deploy over 1,000 troops to the Middle East*. Msn. https://www.msn.com/en-us/news/world/germany-prepared-to-deploy-over-1000-troops-to-the-middle-east/ar-AA1iZTLZ

Murden, S. (2002). *Islam, the Middle East, and the new global hegemony*. Lynne Rienner Publishers. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=14EwkJh2G4UC&oi=fnd&pg=PP11&dq=global+interest+middle+east&ots=ZHxx8K8ins&sig=Uhgja-OLh_ed2QgjQnhk0xTHplY

Nijim, M. (2023). Genocide in Palestine: Gaza as a case study. *The International Journal of Human Rights*, *27*(1), 165–200. https://doi.org/10.1080/13642987.2022.2065261

OIC. (2022). *Organisation of Islamid Cooperation*. https://www.oic-oci.org/page/?p_id=52&p_ref=26&lan=en

Sulejmani, D. (2019). *Ethnic cleansing and colonization in the case of Historical Palestine : comparative analysis from 1948 to today Scientific paper*. *12*.

Toriq Aqua. (2023). *Pemerintah Ceritakan Sulitnya Mengevakuasi WNI dari Jalur Gaza Palestina, Bukan Cuma Indonesia*. Tribun News. https://jatim.tribunnews.com/2023/11/03/pemerintah-ceritakan-sulitnya-mengevakuasi-wni-dari-jalur-gaza-palestina-bukan-cuma-indonesia

Ulya, F. N. (2023). *Kemenlu Berhasil Evakuasi 4 WNI Keluar dari Palestina, Saat Ini Berada di Kairo*. Kompas. https://nasional.kompas.com/read/2023/11/03/10471741/kemenlu-berhasil-evakuasi-4-wni-keluar-dari-palestina-saat-ini-berada-di#

UN Peacekeeping. (2023). *United Nations Peacekeeping*. UN Peacekeeping. https://peacekeeping.un.org/en

IX

KRISIS PALESTINA-ISRAEL: INDONESIA BISA APA?

Prihandono Wibowo

"If every Muslim throws a bucket of water on Israel, Israel will be washed away"

-Ayatullah Ruhullah Khomeini-

"The usurper [Zionist] regime is coming to an end."

-Ayatullah Ali Khamenei-

Oktober 2023 merupakan bulan yang istimewa bagi perjuangan bangsa Palestina sekaligus bulan yang tragis bagi nasib bangsa Palestina. Pada bulan ini, kelompok pejuang Hamas berhasil menerobos masuk wilayah Israel, melakukan serangan mendadak, termasuk menyerang pos militer Israel, sekaligus menewaskan dan menyandera personel militer negara Zionis tersebut. Dikabarkan bahwa Hamas juga dapat menguasai sebagian kawasan di sekitar Jalur Gaza yang Tengah dikuasai Israel untuk beberapa waktu. Media-media internasional juga melaporkan bahwa

serangan mengejutkan Hamas ini ibarat seperti serangan Yom Kippur yang mematahkan mitos superioritas militer dan intelijen Israel. Analisis juga menyebutkan bahwa Hamas telah mempersiapkan serangan selama beberapa tahun serta dapat mengecoh intelijen Israel sehingga institusi intelijen negara Zionis tersebut tidak dapat mengantisipasi serangan kelompok pejuang Hamas.

Di lain pihak, Israel segera merespon serangan mendadak dari Hamas. Negara Zionis tersebut menganggap bahwa serangan mendadak pada Oktober 2023 ini ibarat peristiwa terorisme 11 September 2001 yang dilancarkan kelompok Al Qaeda kepada AS. Karena itu, Israel melakukan serangan balasan kepada Hamas di Jalur Gaza. Basis serangan balasan adalah melalui serangan udara. Selain itu, hingga tulisan ini dibuat, Israel mempersiapkan pasukan daratnya, untuk skenario invasi darat dengan klaim "membersihkan" Jalur Gaza dari cengkraman teroris Hamas. Namun celakanya, serangan-serangan balasan Israel turut menghancurkan tempat-tempat sipil seperti gedung tempat tinggal masyarakat, masjid, gereja, rumah sakit, dan titik-titik lain di Jalur Gaza yang dituding sebagai kawasan basis Hamas. Serangan Israel yang tidak proporsional tersebut menewaskan dan mencederai ribuan rakyat sipil di Jalur Gaza. Serangan ini diperparah dengan aksi blokade Israel terhadap akses listrik, air, makanan, energi, dan bantuan terhadap Jalur Gaza. Data dari liveumap.com juga memperlihatkan terdapat peningkatan

eskalasi antara rakyat Palestina di Tepi Barat dengan pasukan Israel di wilayah pendudukan tersebut. Beragam komunitas di dunia internasional mengkritik blokade maupun aksi serangan dan kekerasan Israel terhadap rakyat Palestina.

Ancaman Instabilitas Regional

Menyikapi berbagai kritikan, Israel menekankan bahwa pihaknya tidak memusuhi masyarakat di Jalur Gaza. Namun menuding bahwa Hamas menggunakan kawasan padat sipil sebagai tameng pelindung dari serangan balik Israel. Israel juga berargumen bahwa pihaknya telah memperingatkan rakyat sipil Jalur Gaza untuk pergi ke kawasan selatan yang dianggap aman. Namun demikian, argumen Israel tidak cukup meredakan kemarahan dunia internasional. Berbagai kelompok perlawanan di Timur Tengah seperti Hasd Saabi di Irak, kelompok Houthi di Yaman, serta kelompok Hizbullah di Lebanon, mendeklarasikan ancaman bersenjata kepada negara Zionis tersebut. Kelompok Hizbullah mengklaim menghancurkan tank tempur, peralatan pengintaian, dan menewaskan tentara Zionis di kawasan perbatasan Israel-Lebanon. Pendukung Hashd Al Saabi di Irak menunggu fatwa dari Ayatullah Sistani untuk pergi ke Gaza melawan Israel. Kataib Sayyid al Shuhada di Irak mengancam akan menyerang pangkalan militer AS di Irak. Sedangkan kelompok Houthi mengancam akan menyerang kapal-kapal milik Israel dan AS

yang melintasi laut di sekitar Yaman. Belakangan terjadi serangan drone dan misil terhadap pangkalan militer dan kapal perang AS di kawasan tersebut.

Iran, melalui pernyataan Rahbar, Ayatullah Khamenei menyatakan bahwa tidak akan ada seorang pun yang dapat menghentikan kelompok-kelompok perlawanan mengadakan perlawanan jika kejahatan Israel terus berlangsung (khamenei.ir, 2023). Sebaliknya, negara besar seperti AS menyiagakan kapal induknya ke kawasan Mediterania. Selain itu, Menlu AS, menyatakan bahwa kapal penjelajah dan kapal perusak sedang menuju kawasan tersebut. AS juga memberi bantuan perlengkapan militer dan amunisi kepada Israel. Selain tegas mendukung Israel dalam melawan Hamas, AS juga memperingatkan Iran untuk tidak terlibat dalam tensi terbaru antara Palestina-Israel. Inggris, sekutu AS dan Israel, turut mengerahkan kapal perang dan pesawat pengintai di kawasan Laut Mediterania. Sama dengan AS, Inggris berkomitmen mendukung Israel melawan Hamas yang dianggap sebagai kelompok teroris. Yang menarik, pergerakan pasukan militer juga dilakukan China. Negeri Tirai Bambu tersebut menyiagakan 6 kapal tempurnya di kawasan Timur Tengah seiring dengan eskalasi Palestina-Israel (Dang, 2023).

Artinya, krisis Palestina-Israel sangat erat kaitannya dengan percaturan geopolitik global. Jika eskalasi ini terus berkembang, maka krisis Palestina-Israel akan menuju pada konflik regional. Ancaman ini terjadi di Tengah

kondisi politik global masih belum stabil akibat dilanda perang berkepanjangan antara Rusia melawan Ukraina. Hal ini akan membuat stabilitas dan perdamaian dunia akan terganggu kembali.

Apa yang dapat dilakukan Indonesia ?

Indonesia tentu tidak dapat berdiam diri dalam krisis Palestina-Israel seperti yang terjadi saat ini. Alasannya, Indonesia memiliki konstitusi untuk menghapuskan segala bentuk penjajahan di atas dunia. Begitu pula kebijakan dan pernyataan tegas Presiden Soekarno yang menganggap Israel sebagai entitas penjajah juga menjadi inspirasi bagi dukungan Indonesia terhadap Palestina dari masa ke masa. Selain itu konstitusi Indonesia juga mengamanatkan negara untuk berperan aktif dalam mewujudkan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan. Dalam tataran praktis, Indonesia kemungkinan besar juga tidak ingin terimbas dampak konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah, seperti kenaikan harga minyak global.

Sejauh ini, Indonesia telah mengambil tindakan aktif untuk merespon perkembangan terbaru dalam konflik Palestina-Israel. Misalnya, pada Oktober 2023, Presiden Joko Widodo mendorong peredaan konflik Palestina dan Israel untuk mencegah tragedi kemanusiaan yang lebih besar. Presiden Joko Widodo juga menuntut penyelesaian fundamen konflik antara Palestina dan Israel sesuai dengan standar yang disetujui oleh PBB. Presiden Joko Widodo

juga mengecam serangan Israel terhadap properti sipil, seperti rumah sakit (Setkab, 2023). Menlu RI juga mengkritisi kekerasan yang dilakukan Israel serta mendorong peredaan situasi krisis. Menlu RI juga mendesak DK PBB untuk dapat berperan banyak dalam penyelesaian krisis Palestina-Israel (kemlu.go.id, 2023). Beragam pernyataan dukungan terhadap Palestina dan kritikan terhadap Israel tersebut diikuti oleh tindakan nyata oleh Indonesia. Dilaporkan bahwa Menlu Retno Marsudi berkomunikasi dengan berbagai negara serta organisasi internasional, seperti OKI dan PBB, dengan tujuan menghentikan kekerasan, mendorong gencatan senjata, menjamin akses ke bantuan kemanusiaan, dan menyelesaikan fundamen konflik Palestina-Israel (kemlu.go.id, 2023).

Pengiriman TNI ?

Bagi sebagian pihak, langkah diplomatik Indonesia dianggap tidak mencukupi. Alasannya langkah-langkah diplomatik dipandang tidak efektif dalam menghentikan aksi militer Israel. Selain itu, pada faktanya, Israel mendapat bantuan peralatan militer dan amunisi dari negara kuat semacam AS. Karena itu, beberapa kelompok dalam negeri Indonesia mendesak pemerintah untuk menggunakan instrumen militer pula dalam menyikapi krisis Palestina-Israel. Terdapat dua macam aspirasi. Ada kelompok yang mendesak Indonesia mengirim TNI sebagai sebagai pasukan perdamaian. Namun terdapat

kelompok lain yang menuntut penggunaan TNI untuk membela Palestina, sekaligus berhadapan dengan Israel sebagai yang dianggap sebagai kekuatan penjajah.

Namun demikian, pengiriman militer dipastikan bukan menjadi opsi bagi pemerintah Indonesia. Pertama, Indonesia tidak memiliki instrumen *deterrence* dan *compellence* untuk "menakuti" Israel. Kedua, orientasi geopolitik Indonesia dan visi militernya lebih bersifat defensif ketimbang ofensif. Apalagi institusi TNI lebih banyak berkonsentrasi pada urusan-urusan domestik dibandingkan urusan geopolitik global. Bahkan ketika urusan domestik tersebut jauh dari sektor pertahanan negara, seperti halnya TNI terlibat dalam konflik Rempang dan konflik agraria di dalam negara. Ketiga, praktik politik luar negeri Indonesia lebih mengutamakan metode dan strategi diplomatik. Terlebih di era Presiden Joko Widodo, Indonesia mempersepsikan diri sebagai negara *middle power* Asia yang pengaruh diplomatiknya terus meningkat di dunia global. Persepsi ini secara eksplisit tercermin dari pernyataan Joko Widodo pada pidato Sidang Tahunan 16 Agustus 2023 di Gedung DPR/MPR (Setuningsih, 2023).

Keterbatasan Strategi Indonesia

Tidak banyak yang dapat dilakukan Indonesia. Indonesia hanya memiliki strategi yang terbatas dalam penyelesaian krisis Palestina-Israel. Di satu sisi, konstitusi Indonesia menuntut agar negara bersikap bebas dan aktif

dalam percaturan politik internasional dengan tujuan menciptakan ketertiban dan perdamaian dunia. Di sisi lain, Indonesia hanyalah negara *middle power* yang tidak punya instrumen *deterrence* dan *compellence* yang efektif. Menerjunkan instrumen militer ke Palestina sama sekali bukan opsi yang dapat diambil oleh Indonesia. Karena itu, diplomasi menjadi satu-satunya pilihan bagi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia, khususnya dalam konteks krisis Palestina-Israel. Dengan demikian pilihan Indonesia memang hanya dapat terbatas pada langkah diplomatik, selain mengeluarkan pernyataan, himbauan, kritikan, serta pemberian bantuan kemanusiaan. Dalam praktiknya selama ini, di berbagai forum internasional, Indonesia hanya dapat mendorong peredaan konflik, upaya gencatan senjata, dan mendorong solidaritas terhadap Palestina. Sekat-sekat nasionalisme turut membatasi Indonesia untuk dapat bertindak lebih "radikal" dalam membela Palestina. Hal ini juga dilakukan Indonesia dalam merespon krisis Palestina-Israel terbaru pada Oktober 2023.

Faktanya, adalah bahwa beragam upaya diplomasi oleh berbagai negara telah dilakukan dari tingkat bilateral, regional, hingga internasional, namun tetap tidak dapat menyelesaikan masalah konflik antara Palestina dan Israel. Israel kerap mengabaikan beragam resolusi penyelesaian Palestina-Israel. Terlebih di berbagai organisasi internasional, Israel memiliki dukungan dari negara besar semacam AS. AS pun aktif memveto setiap usulan usulan

perdamaian. Israel juga secara konsisten menggunakan instrumen militernya dalam menghadapi perjuangan kebebasan Palestina.

Opsi tindakan yang dapat diambil oleh Indonesia dalam penyelesaian krisis Palestina-Israel memang terbatas. Karena itu, Indonesia perlu memikirkan strategi-strategi diplomatik baru yang dianggap lebih efektif dalam membela Palestina sekaligus melawan Israel. Hal ini terkonfirmasi oleh pernyataan Menlu Retno Marsudi yang menyatakan bahwa penyelesaian masalah Palestina-Israel tidak dapat dilakukan secara *business as usual*.

Dengan segala keterbatasannya dalam membela Palestina, Indonesia harus menunjukkan konsistensinya dalam membela Palestina. Indonesia tidak layak mengulang preseden masa lalu ketika rezim Orde Baru dengan menjalin hubungan rahasia dengan Israel. Pada era rezim tersebut, Indonesia menyelenggarakan operasi rahasia bersandi Operasi Alpha. Dalam operasi tersebut, Indonesia membeli 32 pesawat tempur A-4 Skyhawk dari Israel serta melatih beberapa pilot TNI di negara Zionis tersebut. Pada Orde Baru pula, Indonesia pernah mendatangkan agen intelijen Israel untuk melatih aktivitas intelijen di Indonesia (Conboy, 2004). Pada awal era reformasi, rezim pemerintahan Abdurrahman Wahid juga pernah mewacanakan pembukaan hubungan dagang dengan Israel. Tidak layak bagi Indonesia untuk berhubungan dengan negara penjajah yang masih eksis di dunia modern.

Sebaliknya, keterbatasan bukan berarti tidak dapat bertindak tegas. Di tengah keterbatasannya, Indonesia perlu mencoba alternatif untuk dapat bersikap lebih tegas dalam krisis Palestina-Israel. Setidaknya, misalnya, Indonesia dapat berkomentar secara tegas untuk mempertanyakan keabsahan eksistensi Zionis Israel sebagai sebuah negara. Mungkin para pemimpin Indonesia perlu belajar dari para pemimpin Republik Islam Iran yang secara konsisten mengeluarkan pernyataan-pernyataan tegas terkait perlawanan terhadap Israel sekaligus pembelaan terhadap Palestina.

Referensi

Conboy, K. (2004). *INTEL: Inside Indonesia's Intelligence Service*. Jakarta: Equinox Publishing.

Dang, Y. (2023, Oktober 19). *China PLA stationed up to 6 warships in Middle East over past week amid rising tensions from Israel-Gaza war: reports*. Retrieved from scmp.com: https://www.scmp.com/news/china/military/article/3238536/6-chinese-warships-present-middle-east-over-past-week

kemlu.go.id. (2023, Oktober 25). *Indonesia Desak Dewan Keamanan PBB Segera Hentikan Perang di Gaza*. Retrieved from kemlu.go.id: https://www.kemlu.go.id/portal/id/read/5422/berita/indonesia-desak-dewan-keamanan-pbb-segera-hentikan-perang-di-gaza

kemlu.go.id. (2023, Oktober 18). *Transkripsi Press Briefing Menlu RI Terkait Perkembangan Situasi Di Gaza Jeddah, 18 Oktober 2023*. Retrieved from kemlu.go.id: https://-www.kemlu.go.id/portal/id/read/5394/siaran_pers/transkripsi-press-briefing-menlu-ri-terkait-perkembangan-situasi-di-gaza-jeddah-18-oktober-2023

khamenei.ir. (2023, Oktober 17). *The usurper Zionist regime must be prosecuted*. Retrieved from khamenei.ir: https://english.khamenei.ir/news/10210/The-usurper-Zionist-regime-must-be-prosecuted

Setkab, H. (2023, Oktober 19). *Pernyataan Presiden RI terkait Tindak Kekerasan di Gaza, Palestina, di Riyadh, Arab Saudi, 19 Oktober 2023*. Retrieved from setkab.go.id: https://setkab.go.id/pernyataan-presiden-ri-terkait-tindak-kekerasan-di-gaza-palestina-di-riyadh-arab-saudi-19-oktober-2023/

Setuningsih, N. &. (2023, Agustus 16). *Kutip Lembaga Australia, Jokowi Sebut Indonesia Negara "Middle Power" di Asia*. Retrieved from kompas.com: https://nasio-nal.kompas.com/read/2023/08/16/12571511/kutip-lembaga-australia-jokowi-sebut-indonesia-negara-middle-power-di-asia

X

HEGEMONI ISRAEL DAN UPAYA KONTER-HEGEMONI PIHAK PRO-PALESTINA

Khairul Munzilin

Peristiwa penyerangan Hamas menembus pertahanan Israel pada 7 Oktober 2023 menjadi babak baru bagi Isu konflik antara Palestina dan Israel. Meskipun saat ini posisi Palestina dan Israel tidak berubah dengan dominasi dan hegemoni Israel atas Palestina, namun peristiwa 7 Oktober menghadirkan banyak kejutan baru yang memungkinkan menjadi celah bagi kubu pemenangan Palestina untuk melakukan konter-hegemoni. Semenjak 1948, Palestina selalu dalam masa pesimistis dengan rundungan keras Israel tanpa memiliki kekuatan untuk melakukan self-defense yang berarti. Berbagai kompilasi respon pasca peristiwa 7 Oktober memiliki dampak yang cukup signi-fikan yang memungkinkan akan kehadiran suasana yang optimistis dalam perjuangan Palestina. Tulisan ini akan terdiri dari beberapa bagian: (i) Hegemoni dan dominasi Israel dalam penyerangan ke Gaza, (ii) Konter-Hegemoni

terhadap dominasi Israel, (iii) Tawaran peluang untuk penyelesaian konflik?

1. Hegemoni dan Dominasi Israel dalam Penyerangan ke Gaza

Dua minggu pasca peristiwa 7 Oktober 2023, Israel telah meluncurkan bom ke Gaza lebih banyak disbandingkan bom yang diluncurkan oleh Amerika di Afghanistan selama 1 tahun penuh (Kazancı, 2023). Brutalitas Israel seakan mengejar momentum untuk menyerang Gaza sekuat tenaga dalam lindungan istilah '*self-defense*.' Persenjataan Israel telah meluluh lantakkan wilayah Gaza, dengan menargetkan rumah warga, sekolah, rumah ibadah, rumah sakit bahkan hingga mengincar kamp penampungan tempat pengungsi berlindung. Ribuan nyawa sipil terbunuh, dan wilayah Gaza berubah menjadi medan perang tanpa perlawanan yang berarti seakan tidak cukup bagi Israel untuk menghentikan serangan mereka.

Namun, selain itu yang harus menjadi perhatian lebih bahwa dunia internasional seakan menormalisasi tindakan brutal Israel di di wilayah Gaza, Palestina. Perbedaan sikap actor dominan internasional yang cenderung double-standard terpampang jelas di depan public internasional. Ribuan nyawa masyarakat sipil Gaza yang melayang dan pelanggaran berbagai hukum internasional oleh Israel masih belum cukup untuk memindahkan keberpihakan

mereka untuk Palestina. Peristiwa ini seakan pembenaran Genosida secara terbuka oleh Israel terhadap warga Gaza.

Clare Daly, politikus Irlandia dan anggota Parlemen Uni Eropa, dalam pidatonya menolak mosi Parlemen Uni Eropa, menyatakan bahwa: "*It is a crime against humanity, it is not humanitarian crisis. Long Live Palestine, Long Live Gaza*" (European Parliament, 2023). Clare mengungkapkan kemarahannya terhadap sikap Uni Eropa yang cenderung diam dalam kasus Palestina. Diamnya actor dominan dunia dalam kasus Palestina adalah tragedi yang telah diprediksi oleh Noam Chomsky pada 2014 silam. Ia menuturkan: "*Part of the tragedy of the Palestinians is they have no international supports*" (Hossain, 2023).

John Mearsheimer dan Stephen Walt-ilmuwan politik internasional-telah menjelaskan terkait bagaimana pengaruh Israel dalam mempengaruhi kebijakan internasional melalui kedekatannya dengan Amerika dalam buku mereka berjudul 'The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy.' Buku ini membenarkan bahwa Israel memiliki dominasi dan hegemoni yang besar dalam perpolitikan internasional. setelah bagian ini pembahasan akan menjelaskan seputar usaha dominasi dan hegemoni Israel di dunia internasional serta dampaknya yang meliputi beberapa hal terkait: pelanggaran hukum internasional, standar ganda masyarakat barat, *ethnic-cleansing* (Genosida) terhadap warga Gaza oleh Israel, kriminalisasi terhadap protester

pro-Palestina, dan usaha hegemonisasi Israel melalui media.

Penyimpangan Hukum Internasional, Standar Ganda, Genosida, dan Hegemoni dalam Media

Istilah hokum tumpul ke atas dan tajam ke bawah tidak hanya terjadi di negara oligarki, namun juga di lingkungan internasional yang anarki. *International law applies equally to everyone* telah berubah menjadi *international law applies unequally to some*. Kenyataan ini tergambarkan sangat jelas dalam dua peristiwa besar yang mendapatkan perlakuan yang berbeda. Hukum internasional digunakan untuk membela dan memberikan keadilan untuk masyarakat Ukraina yang mendapat tekanan dari Rusia. Namun, keberadaan hukum internasional menjadi tidak terasa saat dihadapkan pada kasus konflik Palestina dan Israel. Hypocrisy dalam aplikasi hukum internasional, dan posisinya yang tak berdaya dalam menghadapi actor dominan internasional, tergambarkan dengan tiada reaksi untuk pelanggaran oleh Israel seperti: pendudukan di Palestina semenjak tahun 1949, penggunaan senjata yang dilarang dalam peperangan (bom fosfor putih), pembunuhan warga sipil, wanita hingga anak-anak, pembunuhan wartawan, penghacuran bagunan esensi seperti rumah sakit, rumah ibadah, bahkan tempat pengungsian. Sekilas hukum internasional terlihat sangat mulia, mempromosikan perdamaian, mempromosikan

perdamaian secara universal, kerjasama dan keadilan antar bangsa. Namun apabila digali lebih dalam, narasi yang berbeda akan muncul (Ahmad, 2023).

Perlakuan berbeda tidak hanya di depan hukum internasional, namun juga oleh beberapa aktor negara barat yang dominan. Praktik standar ganda oleh aktor-aktor ini bukanlah hal baru, dengan muka tebalnya, mereka telah berulang kali menerapkan standar ganda dalam berbagai isu internasional. Keberpihakan yang tidak rasional dan sering kali cenderung berdasarkan pertimbangan identitas antara kawan dan lawan. Keputusan berdasarkan insting namun berusaha ditutup dengan berbagai alasan untuk pembenaran. Bukti yang cukup jelas bahwa Uni Eropa tidak ragu untuk mengutuk Rusia yang memutus listrik Ukraina, namun diam saat Israel yang tidak hanya memutus listrik, lebih daripada itu memutus air, makanan hingga bahan bakar. Semua kebutuhan esensi untuk hidup telah dihentikan oleh Israel, namun aktor-aktor dominan barat masih enggan untuk sekedar mengucapkan kata kutukan sebagaimana yang biasa mereka lakukan.

Peristiwa 7 oktober menjadi momentum bagi Israel untuk melegitimasi tindakan mereka dalam melakukan Genosida ataupun *ethnic-cleansing* terhadap warga Palestina. Ada beberapa gejala (symptom) yang terjadi sebelum Genosida dilaksanakan oleh eksekutor, dan gejala ini terlihat jelas dalam tindakan Israel. Terdapat beberapa persamaan antara tindakan Israel dan tindakan yang

diambil oleh pelaku Genosida dalam sejarah umat manusia. Mereka membuat argumen yang dapat membenarkan tindakan mereka dalam melakukan violence. Seperti upaya menyamaratakan seluruh masyarakat yang ditarget. Dalam kasus ini seperti menganggap semua masyarakat Gaza adalah sama. Tindakan mematikan dan memutuskan listrik, air, obat-obatan, internet, bahan bakar hingga makanan adalah upaya penyamarataan anggapan bahwa seluruh masyarakat adalah sama.

Pihak opresor ataupun pelaku genosida seringkali memberikan terror kepada masyarakat yang ditargetkan secara paksa dan menggunakan upaya militer. Tidak hanya dengan cara pembunuhan warga sipil, namun juga paksaan untuk mengosongkan suatu wilayah. Sikap ini terlihat jelas dalam tindakan Israel yang melakukan '*Expanding operation*' di Gaza. Selain itu, self-defense selalu menjadi alasan dibalik genosida. Pelaku genosida pada umumnya menggunakan alasan *self-defense* sebagai upaya pembenaran tindakan mereka dalam membunuh populasi suatu masyarakat. dalam hal ini pun, *self-defense* selalu menjadi tameng Israel dalam melakukan serangan ke Palestina dalam jumlah yang berlebihan. Kesamaan terakhir bahwa usaha labelisasi terhadap manusia dengan istilah binatang merupakan bentuk usaha normalisasi dalam perlakuan yang tidak setara (menghilangkan hak sebagai manusia padanya). Sejarah menunjukkan bahwa Genosida (ethnic-cleansing) selalu dimulai dengan

penghilangan sisi kemanusiaan pada objek terkait. Penggunaan istilah *Human-Animal* oleh Menteri pertahanan Israel secara tidak langsung merupakan sikap yang berusaha melegalisasi pembunuhan terhadap mereka yang dilabeli dengan istilah ini. Sebagaimana Nazi melabeli kaum yahudi Jerman dengan tikus (Hodzic, 2023).

Penjajah dengan sumberdaya yang lebih baik dan lebih banyak dibandingkan mereka bangsa yang terjajah, memiliki power lebih dalam mengorkestrasikan opini public dan memainkan narasi pemberitaan. Selama ini Israel telah berusaha keras dalam membuat framework bahwa Palestina memang pantas di ratakan, dihabiskan dan dibunuh secara masal. Hal ini dilakukan agar masyarakat internasional menormalisasi tindakan Israel dalam membumihanguskan Gaza, sehingga tercipta kondisi '*ruling by consent*.' Membuat frame siaran, mengundang tokoh yang sesuai skenario, dan menggiring pembahasan yang diinginkan adalah beberapa cara yang kerap dilakukan. Hal yang kerap dilakukan media barat dalam menggiring opini seperti menggunakan '*game of condemn*.' Seperti contoh, media barat selalu menanyakan narasumber pro-palestina terkait apakah mereka mengutuk aksi yang dilakukan oleh Hamas, baik CNN, BBC, bahkan hingga youtuber Inggris Pier Morgan yang pro-Israel. Dalam acara wawancara Pier Morgan dengan tokoh pro Palestina, mereka cenderung disudutkan karena membela Palestina. Namun ketika tokoh yang diundang

adalah pro-Israel, dia sekana memberikan karpet merah bagi mereka untuk mengeluarkan pendapat tanpa interupsi yang berarti.

Pasca peristiwa 7 Oktober, Israel telah melakukan usaha untuk mengontrol opini internasional secara masif dan terstruktur. Dalam video yang dirilis oleh akun resmi Al Jazeera di platform Instagram dan Tiktok, Khalid Majzoub dalam analisis '*Fact Check*' yang dibuat oleh Al Jazeera, mengungkapkan bahwa Israel telah melakukan propaganda secara massif melalui tayangan iklan di social media seperti: game anak2, platform X dan Youtube. Melalui Analisa menggunakan Analytics tool, journalist Inggris Sophia Smith Galer mengeluarkan data bahwa tujuan utama iklan propaganda Israel semenjak 7 Oktober hingga 21 Oktober adalah Perancis, Jerman, inggris dan Amerika. Menurut penelusuran Sophia, Menteri luar negeri Israel menghabiskan sekitar 7.1 juta US Dolar hanya untuk menayangkan iklan propaganda di youtube (Majzoub).

2. Konter-Hegemoni Terhadap Dominasi Israel

Antonio Gramsci menyatakan bahwa "dimana ada kekuasaan, di sana muncul perlawanan terhadapnya" (Siswati, 2017). Perjuangan Palestina sejatinya adalah perjuangan untuk melakukan perubahan sosial. Yaitu perjuangan untuk meyakinkan internasional bahwa di era modern ini masih terjadi penjajahan yang dibiarkan,

perjuangan untuk meyainkan dunia bahwa saat ini sedang terjadi ethnic-cleansing dengan tanpa satupun actor negara yang berani ikut campur tangan untuk menghentikan secara fisik. "*The Palestinian struggle is not just a struggle against occupation, apartheid and colonialism; it is a struggle against imperialism*" (Ahmad, 2023).

Perubahan zaman melalui digital disruption memberikan pengaruh besar dalam mendorong liberalisasi informasi internasional. Di era digital informasi tersebar dengan bebas dan membebaskan koordinir informasi dari satu arah tanpa koreksi. Saat ini masyarakat memiliki kedaulatan lebih besar dalam mengontrol informasi yang beredar. Bahkan negara adidaya seperti Amerika dan perusahaan informasi besar dunia bisa mendapat koreksian oleh masyarakat umum jika kedapatan menyebarkan informasi hoax. Contoh nyata terlihat jelas dalam kasus hoax-terkait pembunuhan 50 bayi warga Israel - yang dilemparkan oleh Biden mendapat koreksian oleh masyarakat dan kemudian dikoreksi oleh Gedung putih Amerika.

Penyebaran informasi secara bebas dan massif secara tidak langsung membuka mata masyarakat internasional terkait ketidakadilan kondisi Gaza di bawah dominasi Israel. Perlawanan terhadap ketidakadilan ini muncul di berbagai belahan dunia yang tidak hanya dari masyarakat muslim, namun juga dari masyarakat dengan latar belakang yang beragam. Sebagai contoh bahwa protes yang terjadi di negara pendukung Israel yaitu Amerika,

protester yang merupakan masyarakat Yahudi Amerika berusaha mendesak Kongres Amerika untuk mendorong terjadinya gencatan senjata di Gaza (Al Jazeera , 2023). Kekuatan people power tidak hanya bersifat protes fisik turun ke jalan, namun juga berupa perang informasi di dunia maya. Perang propaganda terjadi di berbagai media sosial seperti Instagram, Twitter (X), hingga Tiktok. Namun demikian, masyarakat yang melakukan protes perang Israel di Gaza, mendapatkan tindakan kriminalisasi structural dari berbagai pihak. Serangan balik ini menimpa mahasiswa di Universitas Harvard, pengunjuk rasa di Perancis, dan berbagai daerah lainnya (Al Jazeera, 2023).

Konter-hegemonik juga terlihat dalam pergerakan intelektual organik. Banyak ilmuwan terkemuka dunia hadir dengan tidak ragu untuk mengemukakan kekeliruan yang terjadi dalam konflik Palestina-Israel. Diantaranya seperti Norman Finkelstein, ilmuwan politik Amerika keturunan Yahudi yang mengkhususkan diri dalam studi Holocaust dan konflik Israel-Palestina. Dalam berbagai kesempatan, Finkelstein tidak ragu untuk membela Palestina dan menunjukkan kemunafikan negara dominan dunia. Sebagaimana yang ia pernah katakana: "Israel selalu mengelak dari tanggungjawab, jangan percaya kata-kata yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika, Inggris dan terutama Israel" (Macannuco, Underhill, & Fiori, 2023).

Dalam pertimbangan objektif dan Rasional, seharusnya tidak dapat dibantah bahwa Israel adalah pelaku

kejahatan perang sejati sehingga tidak layak untuk mendapat pembelaan. Mereka yang mengimani akan hal ini tidak akan bertahan lama dalam kubu ataupun lingkungan yang berpihak pada pelaku kejahatan perang. Sebagai contoh bahwa pejabat Departemen Luar Negeri Amerika mengundurkan diri atas penanganan konflik Israel-Hamas yang dilakukan pemerintahan Biden (Paget, 2023).

Organisasi Internasional dominan dunia semenjak peristiwa 7 Oktober telah mulai menunjukkan posisinya pada kemanusiaan. PBB yang selama ini cenderung bersikap diam dalam kasus Palestina, dibawah kepemimpinan Antonio Guterres telah bersikap proaktif dalam keterlibatan dalam kasus ini. Pada tanggal 24 Oktober (Guterres, 2023), Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengeluarkan statement dalam pidatonya yang terbilang cukup objective pada fakta dan berpihak pada kemanusiaan hingga membuat Perwakilan Israel untuk PBB tersinggung dan meminta Sekjen PBB untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Beriringan dengan itu, Israel yang merasa tersudut juga menolak untuk mengeluarkan visa kunjungan ke Israel untuk perwakilan PBB, Martin Griffiths, Pimpinan urusan Humanitarian PBB (Carroll, 2023).

Selain itu, organisasi Human Right Watch internasional juga secara tegas menunjukkan keberpihakan pada kemanusiaan meskipun dihadapan actor

internasional dominan. Pada tanggal 25 Oktober 2023, Direktur Executive Human Right Watch, Tirana Hassan memberikan pidato kepada Sub-komite Hak Asasi Manusia Parlemen Eropa, pidatonya menyinggung posisi Uni Eropa yang melakukan aksi double standard. Dia mengatakan bahwa ketika double standard terekspos, motif dari Uni Eropa dipertanyakan, dan kredibilitasnya pun menjadi merosot (Hassan, 2023).

3. Tawaran Peluang Untuk Penyelesaian Konflik?

Akan sangat berbahaya jika memutuskan untuk mendukung maupun menolak suatu hal dan/atau suatu golongan dengan tanpa pertimbangan, dan hanya melandaskan pembuatan keputusan dari hal-hal seperti identitas, nafsu, amarah, rasa suka, dan dogma yang tersebar dalam masyarakat dengan tanpa dasar. Jika menggunakan rasional akal sehat, data yang terpercaya, mengolah informasi secara objektif, maka akan sangat mudah untuk melihat kepada siapa kita harus berpihak dalam tragedy okupasi Palestina. Namun menjadi tidak mudah karena harus berlawanan dengan aktor dominan dan hegemony internasional.

Hal pertama yang harus dilakukan adalah menghentikan penyerangan atau dengan kata lain adalah gencatan senjata. Melakukan gencatan senjata menjadi sangat penting dalam suasana perang yang berat sebelah karena berbagai bantuan lain akan menjadi percuma apabila

masyarakat sipil yang tidak bersalah terus menjadi korban dari gempuran senjata yang tidak mengenal korban. Selain itu, Amerika yang memiliki pengaruh terhadap Israel, dan menjadi satu-satunya negara yang didengarkan oleh Israel, dapat memainkan peran penting dalam mempengaruhi Israel. Dengan fakta ini, mendorong Amerika untuk bersikap lebih humanis dapat menjadi solusi Pereda konflik yang berkepanjangan ini.

Selanjutnya, perundingan harus mengantikan opsi perang yang selama ini berlangsung. Namun menemukan 'penengah' yang adil, tidak bias dan memiliki komitmen untuk netral merupakan masalah tersendiri dalam penyelesaian konflik ini. Perundingan harus bersifat adil dan setara, tidak timpang yang menguatkan satu pihak dan melemahkan pihak lainnya. Konflik ini hanya bisa terselesaikan apabila seluruh pihak yang terlibat dapat dipertemukan dan bersedia untuk berkompromi. Perundingan harus memberikan ruang bagi entitas politik yang tidak diinginkan sekalipun, jika memang entitas itu termasuk bagian penting dalamnya. sehingga organisasi Hamas yang bagi pihak berlawanan disebut sebagai organisasi teroris juga harus menjadi pihak yang terlibat dalam perundingan.

Untuk melihat konflik ini dengan tujuan perdamaian, maka hal yang harus dilakukan adalah melihat dengan posisi yang benar. Mengubah perspektif dalam melihat isu ini secara biner yaitu antara 'Good' dan 'Evil' menjadi hal

utama yang pertama yang harus dilakukan. Karena melihat dengan pandangan biner akan berdampak sangat berbahaya dalam membentuk persepsi tertentu. Sehingga dengan persepsi ini mereka yang dianggap 'Good' seakan bebas melakukan apapun yang mereka inginkan. Dan mereka yang dianggap 'evil' seakan dapat di diperlakukan dengan tindakan apapun, bahkan hingga membinasakan mereka.

Referensi

Siswati, E. (2017). ANATOMI TEORI HEGEMONI ANTONIO GRAMSCI. *JURNAL TRANSLITERA*, EDISI 5/ 11-33.

Guterres, A. (2023, Oktober 24). *Secretary-General's remarks to the Security Council - on the Middle East*. Retrieved from United Nation Web Site: https://www.un.org/-sg/en/content/sg/speeches/2023-10-24/secretary-generals-remarks-the-security-council-the-middle-east%C2%A0

Carroll, R. (2023, Oktober 25). *UN's António Guterres calls for immediate ceasefire to end 'epic suffering' in Gaza*. Retrieved from The Guardian Web Site: https://www.theguardian.com/world/-2023/oct/24/un-calls-for-immediate-ceasefire-to-end-epic-suffering-in-gaza

Hassan, T. (2023, Oktober 25). *Tirana Hassan's address to the European Parliament's Subcommittee on Human Rights -*

October 25, 2023. Retrieved from Human Right Watch Web site: https://www.hrw.org/news/2023/10/25/-tirana-hassans-address-european-parliaments-subcommittee-human-rights-october-25

Haq, S. N., & Calzonetti, C. (2023, Oktober 25). *Queen Rania of Jordan accuses West of 'glaring double standard' as the death toll rises in besieged Gaza*. Retrieved from CNN Web site: https://edition.cnn.com/2023/10/24/middleeast/queen-rania-jordan-amanpour-interview-intl/index.html

Smith, A. (2023, Oktober 25). *After she was freed, Israeli hostage offered a handshake to her Hamas captor*. Retrieved from NBC News Web site: https://www.nbcnews.com/news/world/israeli-hostage-handshake-hamas-rcna121852

Hossain, M. (2023, Oktober 26). *Jewish voices of reason: How dissenting voices view the Israel-Palestine conflict*. Retrieved from The Business Standard Web site: https://www.tbsnews.net/features/panorama/jewish-voices-reason-how-dissenting-voices-view-israel-palestine-conflict-726886

European Perliament. (2023, Oktober 19). *Verbatim report of proceedings*. Retrieved from European Perliament Web site: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2023-10-19-ITM-014-02_EN.html

Kazancı, H. (2023, Oktober 13). *Israel drops 6,000 bombs in Gaza in 6 days, nearly matching US total in Afghanistan in*

1 year: Report. Retrieved from AA News Web site: https://www.aa.com.tr/en/middle-east/israel-drops-6-000-bombs-in-gaza-in-6-days-nearly-matching-us-total-in-afghanistan-in-1-year-report/3017833

Macannuco, L., Underhill, J., & Fiori, G. (2023, Oktober 24). *Dr. Norman Finkelstein talks to UMass*. Retrieved from Massachusetts Daily Colegian Web site: https://dailycollegian.com/2023/10/dr-norman-finkelstein-talks-to-umass/

Paget, S. (2023, Oktober 20). *State Department official resigns over Biden administration's handling of Israel-Hamas conflict*. Retrieved from CNN Web site: https://edition.cnn.com/2023/10/19/politics/state-department-official-resigns-israel-gaza/index.html#:~:text=Josh%20Paul%2C%20who%20said%20he,continued%20lethal%20assistance%20to%20Israel."&text="Let%20me%20be%20clear%2C"%20Paul%20wrote.

Ahmad, W. (2023, Oktober 17). *The mask is off: Gaza has exposed the hypocrisy of international law*. Retrieved from Aljazeera Web site: https://www.aljazeera.com/opinions/2023/10/17/the-mask-is-off-gaza-has-exposed-the-hypocrisy-of-international-law

Hodzic, R. (2023, Oktober 20). *There are common points between the Gaza war and the Bosnian genocide*. Retrieved

from Aljazeera Web site: https://www.aljazeera.com/opinions/2023/10/20/there-are-common-points-between-the-gaza-war-and-the-bosnian-genocide

Majzoub, K. (2023). Fact Check. *https://www.instagram.com/reel/Cylkqais527/*. Instagram, @khalidmajzoubofficial.

Al Jazeera . (2023, Oktober 19). *Jewish activists arrested at US Congress anti-Israel protest amid Gaza war*. Retrieved from Al Jazeera Web site: https://www.aljazeera.com/news/2023/10/19/jewish-activists-arrested-at-us-congress-sit-in-calling-for-gaza-ceasefire

Al Jazeera. (2023, Oktober 20). *The Take: The backlash to supporting Palestine*. Retrieved from Aljazeera Web site: https://www.aljazeera.com/podcasts/2023/10/20/the-backlash-to-supporting-palestine

XI

RESONANSI DUKUNGAN TERHADAP GAZA VS SENSOR DI JAGAT MAYA

Rizki Dian Nursita

Pada tanggal 25 Oktober 2023, *Aljazeera Plus* telah mengunggah video singkat di platform Instagram yang berisi kesaksian seorang wanita lansia Israel bernama Yocheved Lifshitz yang ditahan oleh Hamas sejak tanggal 7 Oktober 2023. Video tersebut menayangkan pemulangan Lifshitz yang dilakukan oleh Hamas dimana mereka saling berjabat tangan. Lifshitz pada *pers conference* yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2023 mengaku bahwa selama ditahan Lifshitz dan para sandra lainnya telah diperlakukan dengan baik dan dipenuhi segala kebutuhannya. Sejumlah orang telah mencoba untuk membagikan video tayangan singkat yang telah disukai lebih dari dua puluh ribu pengguna Instagram tersebut melalui fitur *story*. Namun demikian, cerita tersebut tidak dapat dibagikan dengan alasan bahwa konten tersebut simbol, pujian, ataupun dukungan terhadap organisasi berbahaya.

Tentu saja, ini bukan satu-satunya konten yang berkaitan dengan konflik terkini yang terjadi di Gaza, Palestina yang dihapus oleh platform media sosial yang berada di bawah Meta Platforms, Inc. tersebut. Seiring dengan gelombang dukungan yang diberikan terhadap pengguna media sosial global terhadap Palestina, tidak sedikit konten yang dipublikasi oleh figur publik atau selebriti baik nasional maupun internasional atau masyarakat pada umumnya yang menyuarakan dukungan terhadap Palestina dihapus karena dianggap melanggar ketentuan Instagram. Terlebih lagi, media alternatif seperti @eye.on.palestine yang saat itu memiliki sekitar enam juta pengikut (The New Arab Staff, 2023b) sempat dibekukan selama beberapa hari oleh platform tersebut. Pemblokiran demi pemblokiran diberlakukan bagi akun-akun yang serupa seperti @palestine.pixel dan @eye.on.palestine2 dan sejumlah akun yang lainnya.

Sejumlah sensor dan pembatasan yang terjadi di tengah-tengah resonansi gelombang dukungan terhadap Palestina adalah hal yang tidak dapat diabaikan. Hal ini menimbulkan sejumlah pertanyaan bagi penulis. Seberapa besar peminatan publik global terhadap konten yang berkaitan dengan Palestina, mengapa *censorship* diberlakukan oleh platform media sosial yang dikelola oleh Meta, dan bagaimana kita melihat fenomena tersebut dalam perspektif kemanusiaan. Tulisan ini mencoba untuk menjelaskan ketiga pertanyaan tersebut.

Tren '*Free Palestine*' dan Pemberlakuan Sensor

Peminatan terhadap konten yang berkaitan dengan Palestina mengalami peningkatan dalam sejak pasca penerobosan tembok perbatasan Gaza pada tanggal 7 Oktober 2023. Hasil pencarian melalui Google Trends menunjukkan bahwa dalam satu bulan terakhir, pencarian konten yang berkaitan dengan frasa *'Free Palestine'* mengalami peningkatan pada tanggal 9 Oktober 2023 yaitu setelah Israel melakukan bombardir yang menewaskan lebih dari 700 orang rakyat Gaza dan pemberlakuan blokade total yang menyebabkan terhalangnya akses terhadap bantuan kemanusiaan seperti pasokan air, makanan, bantuan kesehatan, dan bahan bakar (Rasheed et al., 2023).

Tren *'Free Palestine'* kembali mengalami peningkatan dan mencapai puncaknya (untuk skor 0-100) pada tanggal 18 Oktober 2023, tepatnya setelah misil diluncurkan yang menyebabkan total *death toll* bertambah hingga mencapai lebih dari 3000 jiwa dan hancurnya Rumah Sakit *Ahlyl Arabi* di Gaza (Ibrahim & Stepansky, 2023). Hal yang sama juga berlaku dengan tren konten yang berkaitan dengan *'Free Gaza'* yang sama-sama mencapai puncaknya pada tanggal 9 Oktober 2023 dan 18 Oktober 2023. Hasil pencarian melalui *Google Trends* juga menunjukkan bahwa tren pencarian kedua frasa kunci tersebut paling banyak ditemukan di Maladewa, Tunisia, Mauritania, Malaysia, Qatar, Brunei, dan Lebanon.

Penggunaan sejumlah tagar #*FreePalestine* dan #*IstandWithPalestine* juga kerap digunakan oleh publik global untuk menyuarakan dukungannya terhadap Palestina. Konten yang berkaitan dengan Hamas telah diulang sebanyak 2,5 juta kali dan sempat menjadi tren di media X dan #*FreePalestine* menjadi tagar yang trending di sejumlah negara, termasuk salah satunya Indonesia. Konten yang berkaitan dengan #*FreePalestine* di Instagram sudah di*post* sebanyak 5 juta kali (tidak termasuk dengan komentar) sedangkan di Tiktok konten yang berkaitan dengan #*FreePalestine* sudah disaksikan lebih dari 20 milyar *total views.*

Di tengah-tengah perkembangan pencarian ataupun gelombang aktivisme di media sosial, sejumlah pembatasan atau *censorship* telah diberlakukan oleh beberapa platform media sosial ternama. Instagram dan Facebook misalnya, telah memberlakukan *shadow-banning* terhadap akun-akun yang membagikan kondisi terkini di Gaza, konten yang menampilkan korban genosida yang dilakukan oleh Israel, atau konten mengandung dukungan terhadap Hamas. Sejumlah post juga tidak dapat dibagikan dikarenakan dianggap melanggar menyebarkan konten tentang organisasi berbahaya (teroris). Hal yang sama juga dilakukan oleh platform lainnya seperti X, Tiktok, dan YouTube yang telah memberlakukan *ban* terhadap konten atau akun yang berkaitan dengan Hamas (The New Arab Staff, 2023a).

Sensor yang telah diberlakukan mengakibatkan protes yang dilayangkan oleh empat puluh delapan organisasi masyarakat di dunia kepada platform media sosial yang melakukan pemblokiran secara sepihak, salah satunya adalah 7amleh the Arab Center for Social Media Advancement, sebuah lembaga swadaya masyarakat kerap menyuarakan hak digital untuk orang-orang Palestina dan masyarakat di Jazirah Arab. Namun demikian, hingga tulisan ini dibuat sejumlah platform tersebut belum memberikan klarifikasi berkaitan dengan sensor yang terjadi (Siddiqui et al., 2023).

Mengapa Sensor Diberlakukan?

Pemberlakuan sensor berkaitan dengan konten yang berkaitan dengan Palestina, Gaza, dan Hamas sebenarnya bukan hal yang benar-benar di media sosial. Pada krisis yang terjadi di Gaza tahun 2021, Meta pernah memberlakukan sensor yang berkaitan dengan krisis di Gaza, bahkan untuk konten yang sebenarnya tidak terlalu berkaitan. Instagram pernah melakukan hal yang serupa memberlakukan algoritma yang membuat jumlah tontonan terhadap konten yang berkaitan dengan krisis Gaza sangat rendah sehingga kurang mendapatkan perhatian dari publik secara global (Hassan, 2021) dan secara aneh memberlakukan pemblokiran terhadap konten yang berkaitan dengan Masjidil Aqsha. Whatsapp juga pernah melakukan pemblokiran terhadap jurnalis yang berbasis di Gaza dan

pemaksaan yang nampak seperti sebuah bug yang menjadikan jutaan orang mengikuti laman Facebook yang mendukung Israel (Mac, 2021).

Pelbagai kilah kerap digunakan oleh Meta untuk merasionalisasi sensor. Di antaranya adalah karena algoritma Meta hanya fokus untuk menyediakan konten kepada orang-orang yang terdekat dan menghindari dampak negatif dari konten yang tersebar secara meluas, atau dalih konten yang disajikan telah melanggar *Community Guidelines*; mengandung informasi berbahaya atau dukungan terhadap teroris.

Lantas, apakah dalih tersebut adalah alasan sebenarnya yang menjadikan Meta memberlakukan sensor? Tentu tidak. Sensor yang kerap dilakukan oleh Meta terhadap konten yang berkaitan dengan krisis di Palestina atau dukungan terhadap Palestina disebabkan adanya miskonsepsi dan bias di internal Meta terhadap Islam dan Timur Tengah. Dalam wawancara yang dilakukan oleh Buzzfeed kepada Mai ElMahdy, mantan pegawai Facebook atau saat ini Meta yang ditugaskan di bidang moderasi konten dan manajemen krisis, ElMahdy menyampaikan bahwa perspektif Meta terhadap Timur Tengah sangatlah berkiblat ke Amerika *(US-centric).* Misalnya, revolusi di Mesir tahun 2011 yang sedikit banyak dipengaruhi oleh keberadaan media sosial dianggap sesuatu yang berbahaya dan harus dikontrol, bahkan sempat terdapat usulan agar

frasa *"Allahuakbar"* dianggap melanggar ketentuan karena identik dengan terorisme (Mac, 2021).

Alasan kedua adalah karena kebebasan dalam berpendapat adalah hal yang tidak jelas baik secara konsep maupun prakteknya. Pada postingan di salah satu laman menu Meta pada tahun 2018, Meta menjelaskan bahwa Meta tidak terikat dengan hukum internasional yang berkaitan dengan HAM. Namun demikian, Meta menjadikan Pasal 19 dari *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* sebagai rujukan dalam membangun regulasinya (Allan, 2018). Merujuk pada pasal tersebut, sensor dapat dilakukan apabila konten yang dibagikan berbahaya atau konten tersebut mengancam keamanan nasional, kesehatan, dan moral masyarakat (Allan, 2018).

Tentu saja, penilaian terhadap apa yang dianggap sebagai konten berbahaya sangatlah subyektif. Negara-negara di Barat yang seringkali memproklamirkan diri sebagai negara yang sangat menjunjung tinggi demokrasi dan kebebasan dalam berpendapat seringkali menunjukkan standar ganda apabila pendapat atau informasi yang disebarluaskan bertentangan dengan kepentingan mereka. Dalam dua dekade terakhir, Amerika Serikat kerap mengkritik *censorship* yang diberlakukan oleh Pemerintah Tiongkok terhadap warga negaranya dan juga sejumlah platform media sosial ataupun konten yang berasal dari luar yang dianggap melanggar HAM. Sensor yang diber-

lakukan oleh Pemerintah Tiongkok juga kerap mendapatkan rapor merah dari LSM internasional seperti *Human Rights Watch (HRW)* dan *Amnesty International.* Lantas, bagaimana dengan *censorship* terhadap konten yang berkaitan dengan Palestina? Tentu saja kritik dan rapor merah tersebut tidak berlaku. Bahkan dunia tidak dapat berkutik atas pembantaian yang menewaskan para jurnalis Al Jazeera beserta keluarganya di Gaza.

Dampak Dari Pemberlakuan Sensor

Pemberlakuan sensor tidak hanya berdampak pada terhambatnya konten yang berisi dukungan terhadap Palestina di jagad maya. Persebaran informasi yang berkaitan dengan kondisi terkini di Gaza yang dibatasi di media sosial ditambah pemutusan akses listrik dan jaringan justru membuat krisis menjadi semakin parah. Para *humanitarian worker* dan aktivis akan kesulitan untuk mengidentifikasi kebutuhan bantuan kemanusiaan di Gaza. Penggalangan bantuan menjadi terhambat. Hal ini telah terjadi mengingat bahwa sejumlah platform di bawah Meta juga membekukan akun dan menghilangkan konten yang murni digunakan untuk tujuan kemanusiaan.

Pemberlakuan sensor juga menyebabkan fungsi masyarakat sipil Gaza sebagai *citizen journalist* juga terhambat. Rakyat Gaza kesulitan untuk melaporkan kondisi terkini berkaitan dengan jumlah korban dan tingkat keparahan dari serangan yang dilakukan oleh Israel;

misalnya, penggunaan bom fosfor, pembombardiran warga sipil, perusakan fasilitas publik dan kemanusiaan sejatinya melanggar hukum humaniter internasional. Di samping itu, bagi masyarakat di luar Gaza, pemberlakuan sensor juga akan menghambat kontak terhadap keluarga atau kerabat di Gaza kemungkinan terdampak oleh bombardir. Korban di Gaza terus meningkat hingga mencapai kurang lebih 8000 jiwa pada tanggal 30 Oktober 2023 (Pietromarchi & Siddiqui, 2023).

Kegentingan ini semestinya cukup menjadi *concern* bagi para platform besar media sosial untuk menghentikan sensor demi mencegah korban yang semakin berjatuhan. Namun, terlepas dari apakah para platform tersebut akan terus memberlakukan sensor atau tidak. Resonansi dukungan terhadap Gaza akan terus menggema. Pada akhirnya, akun-akun yang mengalami *shadow-banning* akan terus hadir dengan akun yang lain. Postingan yang berisi dukungan bagi Gaza hadir dalam berbagai bentuk komentar yang membajak konten yang berisi dukungan terhadap Israel, *stitch,* komedi *satire,* dan berbagai bentuk lainnya yang kiranya tidak terpengaruh oleh algoritma moderasi konten.

Referensi

Allan, R. (2018, August 9). Hard Questions: Where Do We Draw the Line on Free Expression? *Meta*. https://-about.fb.com/news/2018/08/hard-questions-free-

expression/

Hassan, L. (2021). Palestinians Claim Social Media "Censorship" Is Endangering Lives. *Wired*. https://www.wired.com/story/palestinians-claim-social-media-censorship-is-endangering-lives/

Ibrahim, A., & Stepansky, J. (2023, October 18). *Israel-Hamas war updates: Regional tensions soar as Israel bombs Gaza | Israel-Palestine conflict News | Al Jazeera*. https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2023/10/18/israel-hamas-war-live-limited-gaza-aid-deal-agreed-between-us-and-egypt

Mac, R. (2021, May 27). *Amid Israeli–Palestinian Violence, Facebook Employees Are Accusing Their Company Of Bias Against Arabs And Muslims*. BuzzFeed News. https://www.buzzfeednews.com/article/ryanmac/facebook-employees-bias-arabs-muslims-palestine

Pietromarchi, V., & Siddiqui, U. (2023, October 30). *Israel-Hamas war live: Hamas releases video of captives calling for swap | Israel-Palestine conflict News | Al Jazeera*. https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2023/10/30/israel-hamas-war-live-palestinian-death-toll-gaza-rises-above-8000

Rasheed, Z., Rowlands, L., & Regencia, T. (2023, October 9). *Israel-Hamas war updates: Israeli bombing rocks Gaza through the night*. https://www.aljazeera.com/-news/liveblog/2023/10/9/israel-hamas-war-live-news-israel-orders-complete-siege-of-gaza-strip

Siddiqui, P., Dixit, P., & Siddiqui, U. (2023, October 24). *'Significant censorship' of Palestine on social media sparks outcry*. https://www.aljazeera.com/features/2023/-10/24/shadowbanning-are-social-media-giants-censoring-pro-palestine-voices

The New Arab Staff. (2023a, October 16). *Instagram, TikTok "shadow ban" pro-Palestine users, reports*. Https://-Www.Newarab.Com/; The New Arab. https://www.newarab.com/news/instagram-tiktok-shadow-ban-pro-palestine-users-reports

The New Arab Staff. (2023b, October 26). *Instagram suspends Palestinian account amid censorship fears*. Https://-Www.Newarab.Com/; The New Arab. https://www.newarab.com/news/instagram-sus-pends-palestinian-account-amid-censorship-fears

XII

BUKAN PENGUASA, TAPI PUBLIK HARUS MENGAMBIL ALIH UPAYA PEMBEBASAN PALESTINA

Hasbi Aswar

Sejak tanggal 7 sampai 25 Oktober 2023, Israel tidak ada tanda-tanda menghentikan genosida massal terhadap warga Gaza Palestina. Ini genosida dan pelanggaran hukum internasional yang mendapatkan dukungan Elit politik dunia. Sementara berbagai negara sampai hari ini hanya sibuk bolak balik mengecam, dan menuntut PBB agar melerai dan mencari cara agar bantuan kemanusiaan bisa masuk ke Gaza. Padahal saat ini yang sangat dibutuhkan oleh warga Gaza bukan bantuan kemanusiaan tapi penghentian agresi brutal tentara Zionis.

Perang Gaza ini memberikan beberapa pesan global terhadap warga dunia. **Pertama**, dunia harus memperhatikan nasib Gaza secara serius. Bukan sekedar pernyataan peduli kemudian membantu membangunkan rumah

sakit, rumah, sekolah dan bantuan makanan, serta obat-obatan.

Semua bantuan kemanusiaan tidak akan punya arti jika, akar persoalan warga Gaza tidak dihentikan sama sekali. Sama persis jika ada orang yang lagi dipukuli preman, kemudian kita datang menawarkan minuman, makanan, dan tempat istirahat bagi mereka. Apa artinya itu, jika setelah istirahat harus digebuk lagi sampai berdarah-darah. Bantuan itu hanyalah *panasea* atau mengobati gejala luar atau simtomatis saja. Padahal masalahnya ada pada tindakan kekerasan yang harusnya dicegah dan dihentikan.

Saat Hamas dan pejuang Palestina menyerang Israel pun. Saya kira, tujuannya bukan ingin menghancur leburkan Israel. Secara logika mana mungkin kelompok pejuang menghancur leburkan entitas penjajah yang didukung negara-negara besar, dan "dibiarkan" negara-negara sekitar Gaza - Palestina.

Serangan 07 Oktober 2023 dan jatuhnya ribuan korban menurut saya adalah pesan kuat para pejuang kepada dunia bahwa:

"setiap hari ada orang-orang yang terus terancam di Gaza dan Tepi barat"

" mereka harus hidup dengan senjata tentara dan pemukim Yahudi yang dipersenjatai"

"rumah-rumah warga Palestina bergiliran dirampas oleh pemukim Yahudi"

“anak-anak remaja dipukuli”
“orang-orang tua dihinakan”.
“setiap hari mereka berdoa dan berteriak meminta dukungan pada dunia”
“tapi jawaban dunia hanyalah semakin mendekat dan beramah-tamah dengan Israel”

Serangan ke wilayah Israel akhirnya menjadi kesimpulan para pejuang bahwa itu satu-satunya cara untuk memaksa dunia memperhatikan Gaza secara serius terhadap genosida dan penggusuran sistematis warga Palestina dari tanahnya sendiri. Sebab jika hanya teriak-teriak, demo, dan postingan di media sosial. Dunia sudah kebal dan tidak peduli terhadap Gaza.

Yang jadi masalah besar buat kita adalah, haruskah warga Gaza Palestina, melakukan serangan teror dulu ke Penjajah Israel, dan dibalas dengan genosida kemudian dunia baru mengarahkan pandangannya ke Palestina. Itu pun juga hanya setengah hati: menghentikan perang dan membantu urusan kemanusiaan. Setelah itu, kehidupan sehari-hari warga Gaza terulang kembali: terancam oleh tentara dan warga Zionis, terusir, teraniaya dan terbunuh.

Perang Gaza ini juga memberikan pesan **kedua** kepada dunia, bahwa berbagai upaya institusi internasional termasuk negara-negara yang ada untuk memberikan solusi terhadap Palestina tidak bisa diharapkan. Bahkan hanya menjadi alat politik semata: untuk kepentingan bisnis atau akses ekonomi, atau kepentingan

akses senjata ke Amerika Serikat, Eropa, dan Israel atau bisa juga kepentingan politik domestik baik stabilitas atau politik elektoral.

Kita bisa melihat bagaimana kesungguhan Amerika, Prancis, Inggris, Jerman, dan Kanada misalnya yang mendukung Israel habis-habisan. Bahkan Antony J. Blinken, Menteri Luar Negeri Amerika sendiri berkunjung ke Israel memberikan dukungan moral hanya lima hari setelah serangan dimulai (Pamuk, 2023); Presiden Biden langsung gerak mengusulkan peningkatan bantuan senjata buat Israel sebanyak 14,3 miliar dolar (Reuters Staff, 2023); serta kapal perang AS langsung diarahkan ke Laut Mediterania untuk memberikan dukungan dan perlindungan terhadap Israel (Copp, 2023).

Ini adalah bentuk nyata dan jelas dan yang paling rasional terhadap sesuatu yang dianggap perlu dan layak dilindungi.

Kita juga bisa melihat bagaimana respons barat terhadap agresi Rusia ke Ukraina. Rusia dianggap ilegal dan melanggar kedaulatan Ukraina. Respons barat jelas dalam bersikap terhadap Ukraina yaitu mendukung Ukraina secara militer, bersikap tegas terhadap Rusia melalui berbagai embargo, bahkan Amerika mengancam negara-negara lain yang berani mendukung Rusia (BBC News, 2022). Saat Rusia mendukung referendum di Luhansk dan Donetsk tahun 2022, AS dan Uni Eropa

mengecam dan menganggap hasilnya tidak sah atau palsu (dw.com, 2022).

Sikap AS dan barat ini sikap yang memang seharusnya diambil, saat mereka yakin bahwa Rusia adalah agresor, penjajah dan perampas kedaulatan Ukraina.

Nah sebaliknya, jika kita melihat sikap dunia Islam dan negara-negara yang anti-Israel. Adakah yang berani bertindak serupa dan mengambil langkah proporsional?.

Jika kita melihat sikap barat terhadap Rusia dalam perang Ukraina maka, yang semestinya dilakukan oleh negara-negara pro kemerdekaan Palestina terhadap Israel dalam situasi perang yang terjadi saat ini adalah :

1. Negara-negara Muslim misalnya melalui OKI mendeklarasikan kecaman terhadap Israel, dan menghentikan semua bentuk Kerja sama dengan Israel yang sedang berjalan.
2. Negara-negara seperti Turki, Mesir, Yordania, Lebanon, dan Suriah misalnya menyatakan bahwa jika Israel tidak berhenti melakukan agresi dan tidak mau menghentikan penjajahan maka, semua akses darat, laut dan udara Israel akan ditutup sehingga semua proses ekspor impor Israel tidak bisa dilakukan.
3. Negara-negara anggota OKI, mengirimkan tentara ke perbatasan Israel disertai ultimatum kepada Israel dan negara-negara pendukung Israel.

4. Negara-negara anggota OKI mengultimatum AS dan negara-negara barat pendukung Israel bahwa semua bentuk Kerja sama ekonomi, investasi, kerjasama kontra terorisme, pangkalan militer, termasuk jalur-jalur pipa minyak baik darat maupun laut akan di*stop* atau dibatasi jika AS terus mendukung Israel atau tidak mau menekan Israel.
5. Negara-negara Muslim juga akan menolak solusi dua negara sebagai sesuatu hal yang mustahil terjadi antara penjajah dan terjajah (logika Referendum Donetsk dan Luhansk Ukraina 2022).

Dapat dipahami bahwa ada logika dominasi kuasa dalam hubungan antara dunia Islam dan negara-negara besar barat di balik ketidaklogisan sikap dunia Islam dalam perang ini. Yang lebih disayangkan, tidak ada upaya dunia Islam untuk lepas dari belenggu dominasi itu dan mencoba untuk menyejajarkan kapasitas politiknya. Sehingga tidak ada harapan yang tersisa bagi Palestina kecuali hanya kepada perlawanan sipil global.

Perlawanan Sipil untuk Pembebasan Palestina

Secara kuantitas, dukungan masyarakat dunia terhadap nasib Palestina tetap menjadi mayoritas. Beberapa aksi dari berbagai belahan dunia selama perang Oktober ini mengkonfirmasi hal tersebut. Ini menjadi penanda besar bahwa, upaya pembebasan Palestina selalu mendapatkan dukungan publik. Publik dunia hanya butuh momentum

agar muncul tokoh-tokoh atau elit-elit politik yang memimpin publik pro-Palestina untuk bersama-sama membebaskan Palestina. Namun sembari mempersiapkan dan menantikan itu terjadi. Beberapa langkah bisa digunakan untuk memperjuangkan nasib Palestina saat ini.

Pertama, melakukan aksi demonstrasi dalam skala global untuk menekan kekuasaan dan mendominasi opini bahwa Israel sedang melakukan kesewenang-wenangan. Semakin banyak publik yang terlibat akan semakin memperkuat daya desak kepada para pemimpin di setiap negara. Beberapa demonstran di berbagai negara sudah melakukan itu, bahkan kalangan Yahudi Amerika datang langsung ke Gedung putih untuk menekan pemerintahan Biden (Tait, 2023). Aksi-aksi lebih keras memang dapat dilakukan khususnya oleh negara-negara yang bisa terlibat langsung seperti di Amerika Serikat. Aksi juga sudah terjadi di Israel oleh warga-warganya sendiri yang merasa terancam dan sadar bahwa tidak ada untungnya mendukung pemerintahnya sendiri karena hanya akan menghasilkan kebencian dan berdampak "teror" tanpa henti oleh masyarakat Palestina terhadap Israel (Johnston & Helm, 2023).

Kedua, audiensi ke pemangku kebijakan juga penting dilakukan untuk meminta dukungan dan mendesak mereka agar mau bersikap tegas terhadap isu penjajahan dan genosida Israel terhadap Palestina. Jika mereka menolak maka, setidaknya publik sudah dapat menilai

bahwa memang penguasa tidak bisa terlalu banyak diharapkan. Ini juga dalam rangka meningkatkan kesadaran pihak elit penguasa untuk mau berpikir, peduli, dan terlibat aktif terhadap isu global bukan sekedar memikirkan kepentingan politik elektoralnya semata.

Kedua, edukasi publik harus tiap waktu dilakukan baik melalui media sosial, tulisan opini media massa, diskusi publik baik langsung maupun daring untuk menyampaikan informasi yang benar ke publik terhadap kondisi yang sedang terjadi. Ini mendesak dilakukan sebab, media-media pro-Israel tiap detik menciptakan narasi yang meminggirkan perjuangan Palestina dan melegitimasi genosida Israel.

Ketiga, Boikot adalah salah satu cara yang banyak diserukan saat ini untuk merespons Tindakan Israel. Ini juga sebenarnya bisa efektif jika dilakukan secara bersama-sama dan tepat sasaran. Tapi harus dipastikan bahwa yang diboikot memang berdampak langsung pada Israel dan negara-negara pendukung Israel agar memiliki daya tekan yang kuat. Sebab jika tidak begitu, bisa jadi akan jadi bumerang yang merugikan anak-anak bangsa sendiri. Boikotnya bukan hanya pada produk-produk yang berhubungan dengan Israel tapi juga dengan produk-produk barang, jasa, atau investasi yang berhubungan dengan negara-negara pendukung Israel.

Keempat, kekuatan tokoh agama khususnya para ulama adalah salah satu faktor penentu yang bisa

memobilisasi publik untuk terus aktif melakukan tekanan terhadap kekuasaan agar mampu mengambil sikap tegas terhadap Israel. Khususnya di negara-negara Arab, fatwa-fatwa ulama penting untuk mengkonsolidasi opini publik agar dapat menekan pemerintah untuk mau bertindak tegas pada Israel dan Amerika Serikat.

Untuk kerja-kerja jangka Panjang gerakan sipil dunia untuk pembebasan Palestina, ini terkait dengan mengkondisikan agar politik dan elit-elit politik negara-negara Muslim pada khususnya menjadi pemimpin yang mau bersikap logis dalam menghadapi isu penjajahan Israel. Caranya adalah mengkondisikan proses pemilihan pemimpin atau sistem pemerintahan dalam negeri dipimpin oleh orang-orang yang punya semangat perubahan dan sejalan kata dan perbuatan. Ini kerja-kerja politik jangka panjang. Tapi jika publik, rakyat konsisten dan bersatu, tidak ada yang mustahil untuk bisa diraih.

Referensi

BBC News. (2022, January 27). What are the sanctions on Russia and are they hurting its economy? *BBC News*. https://www.bbc.com/news/world-europe-60125659

Copp, T. (2023, October 12). *The US is moving quickly to boost Israel's military. A look at what assistance it's providing*. AP News. https://apnews.com/article/israel-hamas-

military-navy-carrier-e648c53dc53a46e2e12950784ea5e8d2

dw.com. (2022, September 27). *US, NATO condemn 'referendums' as voting ends-DW-09/27/2022*. https://www.dw.com/en/ukraine-us-nato-condemn-kremlin-staged-referendums-as-voting-ends/a-63250664

Johnston, H., & Helm, T. (2023, October 29). *Israeli protesters demand ceasefire as Netanyahu vows 'long and difficult' war*. The National. https://www.thenationalnews.com/mena/palestine-israel/2023/10/29/israeli-protesters-demand-ceasefire-as-netanyahu-vows-long-and-difficult-war/

Pamuk, H. (2023, October 12). Blinken tells Netanyahu in Israel: U.S. will 'always be there'. *Reuters*. https://www.reuters.com/world/us-secretary-state-blinken-lands-israel-2023-10-12/

Reuters Staff. (2023, October 20). Biden to seek $60 billion for Ukraine, $14 billion for Israel—Source. *Reuters*. https://www.reuters.com/article/usa-congress-fuding-biden-idAFKBN31J2DD

Tait, R. (2023, October 16). Jewish groups rally at White House urging Biden to push for Gaza ceasefire. *The Guardian*. https://www.theguardian.com/world/-2023/oct/16/ifnotnow-jewish-voice-for-peace-protest-groups-white-house-biden

XIII

‘PEPESAN KOSONG’ SOLUSI DUA NEGARA

Ramdhan Muhaimin

Serangan mendadak kelompok perjuangan Palestina, HAMAS (*Harakah Al Muqawwamah Al Islamiyah*), ke wilayah Israel pada 7 Oktober 2023 lalu memicu pertempuran panjang dengan tentara zionis. Hingga hari ke 20 per 27 Oktober 2023, Kementerian Kesehatan Palestina dan Organisasi HAM Internasional menyebutkan korban di pihak Palestina sudah menembus angka 7000 orang yang sebagian besar adalah wanita dan anak-anak, korban luka 18.000 orang, dan masih hilang lebih dari 1600 orang. Sementara di Israel korban mencapai 1400 orang (ABC News, 2023; IMEMC News, 2023). Eskalasi perang terus meningkat, memanas, dan melebar di kawasan karena keterlibatan banyak aktor baik yang mendukung perjuangan HAMAS, maupun yang membela Israel. Para pemimpin dunia dan pengamat politik internasional khawatir peperangan kali ini yang disebut terbesar sejak

Perang Yom Kippur tahun 1975 akan memicu Perang Dunia Ketiga (Ron Elving, 2023).

Mengapa perang kembali pecah di bumi Palestina? Juru bicara HAMAS Khaled Qadomi mengatakan kepada Al Jazeera bahwa operasi militer HAMAS ke Israel sebagai tanggapan atas semua kekejaman yang dihadapi rakyat Palestina selama beberapa dekade (Aljazeera, 2023). Pembiaran dunia terhadap penjajahan yang berlangsung di Palestina mendorong rakyat Palestina harus memilih jalan dan sikap tegasnya sendiri tanpa bergantung pada harapan dari negara-negara lain, terutama dunia Islam dan dunia Arab. Apalagi 'Solusi Dua Negara *(Two State Solution)'* yang dikampanyekan sejak 75 tahun lalu, hingga saat ini masih belum terealisasi. Palestina tidak juga merdeka, bahkan seakan dipersulit untuk merdeka. Sementara secara bersamaan, negara zionis Israel dengan mudahnya berdiri pada 1948 atas bantuan Inggris, Eropa, dan Amerika Serikat, dan semakin kuat dari masa ke masa.

Resolusi 'Kolonialisme' Solusi Dua Negara

Solusi Dua Negara *(Two State Solution)* adalah substansi resolusi nomor 181 yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa *(United Nations)* pada tahun 1947 dengan nama resmi Resolusi Pembagian Palestina *(Partition on Palestine)* (Britannica, 2023). Resolusi ini mengusulkan pembagian wilayah Palestina menjadi dua negara, satu wilayah untuk pendatang Yahudi dan satu wilayah lainnya

bagi warga Arab, dengan Jerusalem sebagai wilayah administratif internasional di bawah kontrol PBB. Resolusi ini kemudian menjadi landasan bagi pembentukan negara Israel dengan dukungan Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan Eropa.

Pada awalnya resolusi ini ditolak Palestina dan negara-negara Arab. Pendirian negara zionis Israel setahun kemudian memicu perang antara negara-negara Arab dengan Israel. Palestina dan negara-negara Arab menolak resolusi tersebut dan menyebutnya sebagai resolusi kolonialisme karena beberapa hal. ***Pertama,*** resolusi sepihak Barat**.** Resolusi 181 dikeluarkan PBB tanpa dilakukan konsultasi ataupun meminta persetujuan rakyat Palestina. Resolusi dikeluarkan atas desakan Inggris dan Amerika Serikat sebagai negara pemenang Perang Dunia yang menerima mandat dari PBB untuk wilayah Palestina. Tidak heran jika resolusi ini disebut sebagai resolusi yang memberi jalan bagi penjajahan baru *(new colonialism).*

Kedua, migrasi pemukim Yahudi. Pasca Perang Dunia Pertama, imigrasi Yahudi ke Palestina yang didukung Inggris dan masyarakat Yahudi internasional meningkat tajam. Bagi sebagian besar orang Palestina, kedatangan imigran Yahudi ke wilayahnya sebagai kolonisasi. Resolusi memberi legalisasi dan justifikasi terhadap migrasi Yahudi besar-besaran.

Ketiga, ketidakadilan pembagian wilayah. Bukan saja rakyat Palestina diabaikan dalam dalam proses resolusi ini,

tapi Resolusi 181 tersebut justru memberikan 55% wilayah Palestina kepada orang Yahudi, sedangkan warga Palestina sendiri hanya menempati tanah pribuminya 45%. Padahal jauh sebelum Perang Dunia, masyarakat Yahudi adalah minoritas di Palestina, dan mereka hidup rukun dengan komunitas Islam dan Kristen selama berabad-abad.

Perang, Perundingan dan Perubahan Paradigma 'Two State Solution'

Konsepsi dua negara yang semula diputuskan dalam resolusi PBB tahun 1947 mengalami evolusi konseptual dan paradigmatik terutama secara signifikan setelah perang tahun 1967. Wilayah yang dikuasai Israel justru bertambah setelah perang enam hari tersebut.

Pada Resolusi PBB No 181 tahun 1947, mengusulkan pembagian Palestina menjadi dua negara, yakni 55% wilayah diberikan kepada imigran Yahudi dari Eropa, dan 45 % diserahkan kepada warga Arab. Sementara kompleks kota tua Yerusalem sebagai wilayah internasional di bawah kontrol PBB.

Pada tahun 1964, kelompok perlawanan Fatah mendirikan Palestine Liberation Organization (PLO) atau Organisasi Pembebasan Palestina. Tujuannya, untuk merealisasikan pembentukan negara Palestina. Organisasi ini diakui dunia internasional, dan menjadi representatif Palestina dalam perundingan dengan Israel. Akan tetapi tidak lama setelah didirikan, tiga tahun kemudian di 1967

pecah perang Arab dengan Israel. Dalam perang itu, Israel justru berhasil merebut wilayah Tepi Barat, Jalur Gaza, Yerusalem Timur, Semenanjung Sinai, dan Dataran Tinggi Golan. Setelah perang berakhir, Israel hanya mengembalikan Semenanjung Sinai kepada Mesir dengan perjanjian kedua negara. PBB kemudian mengeluarkan resolusi baru nomor 242 tahun 1967 untuk 'mengakomodasi' perubahan geopolitik dimana Israel berhasil memenangkan Perang Enam Hari dari Yordania, Mesir, dan Suriah. Artinya, konsepsi Dua Negara *(Two State)* yang berlaku tidak lagi berdasarkan Resolusi tahun 1947.

Resolusi 242 tahun 1967 menunjukkan tidak saja kekalahan negeri-negeri Arab dalam memperjuangkan Palestina, tapi juga ketidakberdayaan dalam upaya diplomasi multilateral serta perpecahan diantara mereka. Meskipun mandat resolusi memerintahkan agar Israel menarik mundur militernya dari Tepi Barat, Gaza, dan Dataran Tinggi Golan, tapi kenyataanya setelah itu, dan melalui diplomasi yang dibantu AS dan Eropa, luas wilayah Israel justru bertambah. Dunia Arab dan Islam lambat laun melupakan resolusi PBB no 181 sebelumnya. PLO pun tidak berdaya.

Enam tahun kemudian di tahun 1973 pecah Perang Yom Kippur yang dimulai oleh serangan mendadak Mesir ke Israel. Seperti pada perang sebelumnya, Israel kembali memenangkan peperangan setelah mendapat bantuan dari AS. Kekalahan bertubi-tubi negara-negara Arab terhadap

Israel yang dibantu AS, telah memaksa mereka berada dalam posisi dilema keamanan yang tinggi sehingga mengambil opsi untuk 'meninggalkan' Palestina demi kepentingan nasional masing-masing. Sebab setelah serangkaian kekalahan yang terjadi pada perang 1948, 1956, 1967, dan 1973, AS menggelar peta jalan damai *(road map of peace)* antara PLO Palestina, negeri-negeri Arab dan Israel pada tahun 1979 (Camp David), 1993 (Oslo 1), dan 1995 (Oslo 2). Salah satu substansi keseluruhan dari perjanjian-perjanjian itu adalah memberi jalan secara bertahap bagi terbentuknya pemerintahan Palestina.

Namun seiring dengan berlangsungnya perundingan-perundingan itu, Israel terus mengokohkan eksistensinya dengan melakukan perluasan wilayah secara paksa. Kebebasan Israel menganeksasi wilayah Palestina mendapatkan perlindungan dari AS yang selalu memveto resolusi PBB atas pelanggaran yang dilakukan Israel. Sejak 1945, tercatat AS mengeluarkan veto 46 kali atas resolusi PBB dalam rangka membela Israel (Suhartono, 2023). Artinya, konsepsi dua negara *(two state solution)* berdasarkan Resolusi no 424 tahun 1967 pun menjadi semakin tidak relevan karena tiga hal. *Pertama*, sikap Israel yang terus meluaskan wilayahnya. *Kedua*, veto AS yang selalu membela Israel dan mencegah berdirinya negara Palestina. Dan *ketiga*, ketidakberdayaan diplomasi PLO atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Israel.

Rangkaian perang dan perundingan antara Arab-Palestina dan Israel sejak tahun 1947 hingga 1995 justru menunjukkan dampak terhadap perubahan paradigma tentang konsepsi dua negara. Kondisi riil wilayah Palestina dan Israel saat ini tidak sesuai baik terhadap Resolusi 242 tahun 1967 apalagi Resolusi 181 tahun 1947 (Hilal, 2007).

Meskipun pada kenyataannya wilayah Israel semakin meluas, dan kedua resolusi PBB semakin tidak relevan, Liga Arab justru masih mempertahankan kampanye 'Two State Solution'. Hal itu ditegaskannya pada KTT Beirut tahun 2002, dimana Liga Arab mengeluarkan inisiatif perdamaian. Inisiatif perdamaian ini diusulkan Raja Abdullah dari Arab Saudi yang menginginkan penghentian penderitaan orang-orang Palestina, dan menyelamatkan Israel dari dirinya sendiri dengan menciptakan perdamaian komprehensif antara Israel dan dunia Arab, juga untuk menghindari perang regional yang lebih besar (Terje Rod-Larsen, Nur Laiq, 2014). Inisiatif ini didukung Yasser Arafat dari otoritas Palestina, serta negara-negara Barat seperti AS, Inggris, Prancis, dan Jerman (Times, 2002). Sejak itu, negara-negara Arab mendukung 'Two State Solution' dalam konflik Palestina dan Israel. Kampanye ini kembali ditegaskan pada KTT Liga Arab tahun 2007 dan 2017. PBB dan Uni Eropa juga mendukung pembentukan dua negara merdeka sebagai solusi dalam konflik Palestina dan Israel.

Sedangkan pemerintah Indonesia telah menyatakan dukungan solusi dua negara sejak 1974, yakni ketika Presiden Soeharto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Lahore, Pakistan. Pada konferensi itu, Indonesia bersama negara-negara OKI lainnya menyetujui Deklarasi Lahore, yang menyerukan pengakuan terhadap hak-hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan mendirikan negara merdeka di wilayah yang diduduki Israel (Purnamasari, 2023). Artinya, Indonesia memberi dukungan terhadap solusi dua negara dengan batas-batas Resolusi tahun 1967. Indonesia konsisten menyuarakan narasi ini dalam berbagai forum multilateral.

Harapan atas Pepesan Kosong

Pertanyaan besarnya adalah, konteks 'Dua Negara' dengan batas-batas wilayah mana yang sebenarnya dikampanyekan Indonesia, negeri-negeri Arab, dan Barat jika pada kenyataannya dua resolusi PBB no 181 dan 242 menjadi tidak relevan karena ulah Israel yang terus meluaskan wilayahnya dari perjanjian ke perjanjian, tanpa ada satupun pihak yang mampu mencegahnya atas nama hukum internasional? Apalagi dengan dukungan AS dan sekutunya di Eropa yang selalu membela Israel atas nama pembelaan diri.

Faksi perlawanan Palestina, terutama HAMAS dan Jihad Islam memandang kampanye dua negara sebagai

solusi tidak ubahnya janji kosong tatanan dunia terhadap Palestina. Tidak ada langkah nyata pembentukan Palestina Merdeka. Tapi yang nyata adalah pendirian kedaulatan Israel. Karena itu bagi kedua faksi yang menguasai Jalur Gaza ini, perlawanan bersenjata adalah pilihan rasional *(rational choice)* yang paling relevan ditempuh untuk menahan laju Israel menguasai Palestina keseluruhan, serta solusi bagi rakyat Palestina untuk meraih kemerdekaannya meskipun PLO berseberangan dengan mereka. Peta Jalan Damai yang disusun Barat dan inisiatif perdamaian yang dibuat Liga Arab lebih mengakomodasi stabilitas regional untuk kepentingan nasional ekonomi masing-masing anggota Liga ketimbang sebagai upaya mewujudkan keadilan bagi Palestina. Puncaknya, normalisasi hubungan negara-negara Arab dan Israel melalui Abraham Accord pada 2020 (Güney & Korkmaz, 2021; IISS, 2020) setelah rangkaian panjang peperangan Arab dengan Israel, dan episode perundingan-perundingan sejak 1947 hingga 2017.

Solusi Dua Negara *(Two State Solution)* yang digaungkan sejak 76 tahun lalu pada akhirnya lambat laun meredup hanya menjadi pepesan kosong yang diberikan dunia kepada Palestina (O'Malley, 2017). Latar belakang inilah menjadi dasar bagi prinsip pemikiran faksi perlawanan, termasuk serangan mendadak mereka ke Israel pada 7 Oktober 2023 lalu. Hal ini juga yang menjadikan sikap rakyat Palestina, khususnya Gaza, untuk selalu memberikan dukungan terhadap faksi-faksi

perlawanan, sekalipun ulah mereka justru mengundang kebrutalan Israel. Karena dunia tidak memberi harapan kecuali sebuah pepesan kosong atas nama janji Solusi Dua Negara *(Two State Solution).*

Referensi

ABC News. (2023). *Israel-Gaza war latest updates: Gaza health ministry issues 212-page document it says proves 7,028 Palestinian have died*. ABC News. https://www.abc.-net.au/news/2023-10-27/israel-gaza-updates-gaza-health-reports-7000-deaths-in-document/103029230

Aljazeera. (2023). *Why the Palestinian group Hamas launched an attack on Israel? All to know*. Aljazeera. https://-www.aljazeera.com/news/2023/10/7/palestinian-group-hamas-launches-surprise-attack-on-israel-what-to-know

Britannica. (2023). *United Nations Resolution 181 | Map & Summary*. Britannica. https://www.britannica.-com/topic/United-Nations-Resolution-181

Güney, N. A., & Korkmaz, V. (2021). A new alliance axis in the eastern mediterranean cold war: What the abraham accords mean for mediterranean geopolitics and turkey. *Insight Turkey*, *23*(1), 61–76. https://-doi.org/10.25253/99.2021231.6

Hilal, J. (2007). *Where now for palestine?: The demise of the two-state solution*. books.google.com. https://books.-google.com/books?hl=en&lr=&id=VtQ_OnAvqOcC

&oi=fnd&pg=PA8&dq=two+state+solution+palestine &ots=0bWAw8zHg- &sig=dGkjBWjaozeEjsaakTotUX7mr-A

IISS. (2020). *The Abraham Accords: Israel–Gulf Arab normalization*.

IMEMC News. (2023). *UN Update: 7,028 Killed, 45% of Housing Destroyed in Gaza*. IMEMC News. https://imemc.org/article/un-update-7028-killed-45-of-housing-destroyed-in-gaza/

O'Malley, P. (2017). Israel and Palestine: The Demise of the Two-State Solution. *New England Journal of Public Policy*, *29*(1), Article 12. http://scholarworks.-umb.edu/nejpp/vol29/iss1/12

Purnamasari, D. M. (2023). *RI Bakal Tingkatkan Kontribusi Bantu Pengungsi Palestina*. IDN Times. https://www.idntimes.com/news/world/sonya-michaella/indonesia-bakal-tingkatkan-kontribusi-bantu-pengungsi-palestina

Ron Elving. (2023). *Israel's battle with Hamas recalls Yom Kippur War and its fateful effects*. NPR. https://www.-npr.org/2023/10/20/1207015189/israel-hamas-yom-kippur-war

Suhartono, A. (2023). *AS Veto 46 Resolusi PBB untuk Bela Israel sejak 1945, 34 soal Konflik dengan Palestina*. INews.Id. https://www.inews.id/news/internasio-nal/as-veto-46-resolusi-pbb-untuk-bela-israel-sejak-1945-34-soal-konflik-dengan-palestina

Terje Rod-Larsen, Nur Laiq, F. A. (2014). *The Search for Peace in the Arab-Israeli Conflict: A Compendium of Documents and Analysis*. Oxford University Press. https://books.google.co.id/books?id=JRfVBAAAQBAJ&pg=PA484&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Times, T. N. Y. (2002). *Support for the Saudi Initiative*. The New York Times. https://web.archive.org/-web/20161111012403/http://www.nytimes.com/2002/02/28/opinion/support-for-the-saudi-initiative.html

XIV

APAKAH NEGARA ARAB MENGACUHKAN PALESTINA? SEBUAH REFLEKSI

Rizky Hikmawan

Pendahuluan

Serangan mendadak Hamas pada 7 Oktober 2023 ke wilayah Israel Selatan yang berbatasan dengan Jalur Gaza membawa konsekuensi yang memprihatinkan. Israel membalas serangan Hamas dengan skala penuh yang menewaskan ribuan warga Palestina. Kebanyakan dari mereka merupakan warga sipil, termasuk anak-anak, yang tidak memiliki afiliasi langsung dengan Hamas. Serangan Israel juga diikuti oleh pemutusan aliran listrik, air bersih, dan pasokan logistic yang membuat warga Gaza semakin menderita. Di balik ujian yang dihadapi warga Gaza, negara-negara Arab justru terkesan pasif dalam upaya

menghentikan serangan Israel. Mereka memang menyuarakan gencatan senjata antara kedua belah pihak, tetapi sayangnya tidak didukung oleh aksi konkrit.

Bahkan Mesir yang berbatasan langsung dengan Gaza juga tidak mengizinkan warga untuk mengungsi di wilayah mereka. Negara Piramida tersebut juga tidak langsung membuka perbatasan untuk memberikan bantuan logistik kepada penduduk Gaza. Kebijakan Mesir untuk menolak adanya pengungsi juga diikuti oleh Yordania. Hal ini mengulang kebijakan negara-negara Arab yang terkesan acuh terhadap Palestina. Setiap kali muncul konflik terbuka antara Palestina dan Israel, negara-negara Arab justru terkesan menjaga jarak dan berusaha tidak ikut campur secara langsung dalam masalah tersebut.

Padahal secara etnis Palestina dikategorikan sebagai bagian dari suku Arab. Secara agama, ada kesamaan di antara kedua belah pihak yang mayoritasnya adalah Muslim. Dalam bingkai historis, Palestina juga menjadi salah satu tanah suci yang wajib dibela dan dilindungi dengan keberadaan Masjidil Aqsa di dalamnya. Sikap negara-negara Arab memunculkan pertanyaan dari khalayak ramai, mengapa negara-negara Arab mengacuhkan Palestina? Namun apakah negara-negara Arab memang mengacuhkan Palestina?

Palestina dan Dukungan Negara-Negara Arab

Sejak runtuhnya Kekhalifahan Turki Utsmaniyah, peta politik Timur Tengah mengalami perubahan yang signifikan seiring dengan kemunculan negara-negara Arab yang turut dibidani oleh para pemenang Perang Dunia I, terutama Inggris dan Perancis melalui perjanjian Sykes-Picot tahun 1916. Ironisnya, Palestina bukan termasuk negara yang dimerdekakan dan justru menjadi wilayah yang berada di bawah mandat Inggris. Persoalan kemerdekaan menjadi semakin pelik dengan adanya Deklarasi Balfour tahun 1917 dimana Inggris menjanjikan adanya pembentukan negara Yahudi di wilayah Palestina. Hasilnya migrasi orang-orang Yahudi yang berasal dari seluruh dunia menuju Palestina semakin meningkat. Terlebih lagi dengan adanya persekusi yang dilakukan oleh Nazi terhadap orang-orang Yahudi di Eropa. Puncaknya, pada tahun 1948, orang-orang Yahudi mendeklarasikan berdirinya negara Israel yang dianggap sebagai malapetaka (*Nakhba*) bagi orang-orang Palestina.

Atas nama solidaritas terhadap Palestina, negara-negara Arab menyatakan perang terhadap Israel di tahun 1948, Sayangnya dalam perang tersebut, negara-negara Arab mengalami kekalahan. Kendatipun demikian negara-negara Arab tersebut kemudian menerima beberapa pengungsi dari Palestina yang terusir dari tanah airnya. Upaya negara-negara Arab terhadap kemerdekaan Palestina terus dilakukan hingga pecahnya Perang Enam

Hari di tahun 1967 dan Perang Yom Kippur 1973. Namun Kembali upaya mereka mengalami kegagalan akibat kekuatan militer yang dimiliki oleh Israel serta dukungan negara-negara Barat atas eksistensi negara Yahudi tersebut di fora internasional. Bahkan kekalahan negara-negara Arab dalam Perang Enam Hari membuat Mesir kehilangan Sinai, Suriah merelakan Dataran Tinggi Golan, dan Yordania melepaskan Yerusalem Timur.

Selain itu, negara-negara Arab juga memberikan dana bantuan yang tidak sedikit kepada Palestina. Dana bantuan tersebut diberikan untuk menjalankan roda administratif Otoritas Palestina, membangun infrastruktur hingga pembelian kebutuhan logistik agar warga Palestina tetap dapat melanjutkan hidup, kendatipun di tengah pendudukan Israel. Bahkan dari tahun 1994-2020 bantuan negara-negara Arab mencapai US$ 8,5 Triliun dengan Arab Saudi sebagai pemberi donor terbesar dengan jumlah US$ 4 Triliun, disusul Uni Emirat Arab (UEA) US$ 2,1 Triliun, Aljazair US$ 908 Juta, Qatar US$ 766 Juta, dan Kuwait US$ 758 Juta (Shaban, 2022). Jumlah bantuan yang diberikan kepada Palestina memang mengalami penurunan drastis di tahun 2020 dengan jumlah hanya sebesar US$ 40 Juta. Angka tersebut berbeda jauh dari tahun sebelumnya yang mencapai US$ 265,5 Juta. Tetapi, penurunan tersebut dianggap wajar karena adanya penyesuaian anggaran dari negara-negara Arab dalam menghadapi pandemi Covid-19 (Abdullah & Gulay, 2021).

Faktor-Faktor Pasifnya Negara-Negara Arab

Bagi kelompok realis dalam Hubungan Internasional, negara merupakan aktor dan faktor utama dalam sistem internasional. Negara, dalam berinteraksi dengan aktor lain, senantiasa berupaya merealisasikan kepentingan nasionalnya, baik dalam bidang politik, ekonomi, hingga militer. Salah satu tujuan perwujudan kepentingan nasional adalah menjamin kedaulatan suatu negara di hadapan negara lainnya. Pengakuan kedaulatan dari negara lain ataupun komunitas internasional secara umum akan membuat suatu negara mampu berinteraksi dengan lincah di dalam sistem internasional yang anarki (Burchill, 2005). Dari aspek kepentingan nasional inilah dapat terlihat perubahan kebijakan negara-negara Arab terhadap Palestina yang ditinjau dari tiga aspek, yaitu: aspek internal atau domestik negara-negara Arab; aspek internal dan kebijakan Palestina; dan aspek internasional.

Ditinjau dari aspek internal negara-negara Arab terdapat dua alasan sikap pasif diberikan dalam masalah Palestina. *Pertama*, kekalahan-kekalahan yang dialami saat menghadapi Israel membuat negara-negara Arab berpikir ulang strategi dalam memperjuangkan Palestina. Terlebih lagi jika strategi yang selama ini digunakan justru mengorbankan kepentingan nasional mereka. Tidak heran jika Mesir kemudian memutuskan untuk berdamai dengan Israel di tahun 1978 melalui Perjanjian Camp David. Hal serupa diikuti oleh Yordania tahun 1994 serta keempat

negara Arab, yaitu: UEA, Bahrain, Maroko dan Sudan pada tahun 2020. Sejak itu isu normalisasi Israel dengan negara Arab lainnya juga semakin kencang berhembus. Salah satunya adalah dengan Arab Saudi yang jika terealisasi bisa mengubah geopolitik dan geoekonomi kawasan Timur Tengah.

Melalui adanya normalisasi hubungan membuat kerjasama antar negara menjadi terbuka lebar. Belum lagi melihat situasi keuangan global yang dipengaruhi oleh pengusaha ataupun perusahaan Yahudi yang berafiliasi kepada Israel. Hal ini tentunya membuat kepentingan dalam mendapatkan keuntungan strategis menjadi lebih mudah terealisasi sekaligus menghindarkan konflik terbuka di antara kedua negara. Konsekuensinya, negara-negara Arab yang telah melakukan normalisasi tidak bisa menekan Israel secara berlebihan dalam isu Palestina. Hal ini tampak jelas dari pidato yang disampaikan oleh Presiden Abdel Fattah As Sisi dari Mesir maupun Raja Abdullah II dari Yordania terkait serangan terus-menerus yang dilakukan Israel ke Gaza pasca peristiwa 7 Oktober 2023. Terlihat jelas melalui pemilihan kata-kata dalam pidato mereka berdua yang cenderung *soft* tanpa ada tendensi untuk mengutuk atau memaksa Israel menghentikan serangannya.

Kedua, dalam dekade terakhir beberapa negara Arab sedang menikmati keuntungan ekonomi dari penjualan sumber daya alam yang dimilikinya. Surplus yang ada

digunakan untuk membangun negara secara massif di berbagai aspek. Selain itu, surplus yang dimiliki juga dimanfaatkan sebagai modal pemberlakuan diversifikasi ekonomi dalam investasi global. Hal ini mengingat adanya kesadaran dari negara-negara Arab tersebut bahwa sumber daya alam yang mereka miliki tidak akan bersifat selamanya. Pada satu masa sumber daya alam tersebut akan habis sehingga mereka harus mempersiapkan alternatif sumber pemasukkan agar tetap mampu menjaga keseimbangan perekonomian negara. Upaya pembangunan dan diversifikasi ekonomi ini menuntut adanya stabilitas dalam negara dan juga kawasan. Salah satu caranya adalah dengan meminimalisir potensi konflik antara negara-negara Arab dengan Israel. Belum lagi jika melihat beban historis yang berisi kekalahan dalam perang-perang sebelumnya maupun kondisi saat ini dimana Israel memiliki aspek militer yang kompeten serta ditunjang kepemilikan senjata nuklir. Kembali, isu normalisasi menjadi variabel kunci dalam perwujudan stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan di kawasan yang pada akhirnya menguntungkan negara-negara Arab.

Adapun dari aspek internal dan kebijakan Palestina, terdapat tiga argumentasi yang dapat dikedepankan dalam memahami sikap pasif negara-negara Arab. *Pertama,* kekecewaan historis atas kebijakan ketua *Palestinian Liberation Organization* (PLO) Yasser Arafat yang mendukung invasi Irak ke Kuwait pada tahun 1991. Bagi Kuwait,

kebijakan Arafat adalah bentuk pengkhianatan atas dukungan kemerdekaan dan bantuan dana yang selama ini diberikan kepada Palestina. Sikap Kuwait ini juga diikuti oleh beberapa negara Arab lainnya yang mulai tidak mempercayai Arafat dan PLO. Ironisnya, di tahun 1993 Arafat justru menandatangani perjanjian damai dengan Israel di Washington DC, Amerika Serikat (AS). Kebijakan Arafat ini sebagai buntut dari kekalahan Iraq, yang sebelumnya mereka dukung, dalam Perang Teluk. Kendatipun keputusan Arafat juga diikuti oleh Yordania satu tahun setelahnya, namun memutuskan berdamai dengan pihak yang selama ini dianggap sebagai musuh bersama merupakan tindakan yang mengecewakan (Aljazeera, 2009)

Kedua, adanya tuduhan korupsi dalam tubuh otoritas Palestina. Pasca perdamaian antara PLO dan Israel, dibentuklah *Palestinian Authority* (PA) untuk mengelola pemerintahan di wilayah Tepi Barat dan Gaza. Salah satu bentuk pengelolaan yang dilakukan oleh PA adalah mengenai keuangan. Sayangnya pengelolaan keuangan turut dipengaruhi oleh nepotisme; korupsi dalam birokrasi; penyalahgunaan dana publik dan sumberdaya, korupsi politik; hingga adanya aliran dana yang tidak wajar (Chêne, 2012). Adanya isu korupsi ini membuat citra PA di masyarakat Palestina maupun internasional menjadi buruk. Sedikit banyak hal ini pula yang kemudian membuat negara-negara Arab berhati-hati dalam memberikan

bantuan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Dalam kasus korupsi beberapa sektor yang terkena imbas adalah di sektor bisnis, keamanan internal, Kesehatan hingga Pendidikan. Belum lagi dengan temuan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat teras PA yang semakin memperburuk wajah mereka sendiri (Ramahi, 2013)

Ketiga, perpecahan dua faksi besar dalam internal Palestina, yakni Fatah dan Hamas. Kedua kelompok ini memiliki cara pandang berbeda dalam mewujudkan Palestina merdeka. Kelompok yang disebut pertama mengajukan opsi solusi dua negara dengan Israel. Sementara kelompok lainnya menolak solusi dua negara dan menuntut penghapusan Israel. Faktor ideologi yang kuat di antara kedua belah pihak pada akhirnya menciptakan jalan buntu bagi upaya pencarian solusi bersama. Pada akhirnya upaya pembentukan persatuan nasional menjadi suatu cita-cita yang sulit untuk direalisasikan (Tartir, 2012). Dengan adanya perpecahan internal Palestina membuat negara-negara Arab merasa upaya perwujudan perdamaian menjadi sulit terwujud. Hal inilah yang membuat mereka kemudian memilih untuk mempertahankan status quo atas situasi yang ada di Palestina sembari terus mendorong terbentuknya persatuan Palestina.

Terakhir, jika ditinjau dari aspek internasional, terdapat dua catatan yang dapat diajukan. *Pertama*, sebanyak 165 dari 193 anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengakui kedaulatan Israel (World Population

Review, 2023). Dukungan tersebut membuat ide mengenai penghapusan Israel menjadi sulit untuk dilakukan. Belum lagi dengan ketiadaan aktor kuat dari Arab yang mampu membangun narasi baru dalam mempengaruhi dunia internasional untuk segera mengakui kemerdekaan Palestina. Justru negara-negara Arab terus di-*lobby* Barat, khususnya AS, untuk segera melakukan normalisasi dengan Israel. Salah satunya adalah Arab Saudi yang dalam beberapa tahun terakhir terus menunjukkan gestur membuka diri untuk normalisasi tersebut. Jika Arab Saudi pada akhirnya melakukan normalisasi, maka akan menjadi sebuah langkah baru dalam melihat konstelasi politik Timur Tengah, termasuk dalam isu Palestina.

Kedua, peran AS dalam melindungi Israel. Kebijakan AS untuk melindungi Israel secara mutlak membuat upaya negara-negara Arab dalam membantu Palestina menjadi terbatas. Adanya hubungan diplomatik negara-negara tersebut dengan AS, ditunjang ketergantungan dalam beberapa aspek terhadap negara adidaya tersebut, seperti di sektor keamanan saat terjadinya Perang Teluk, membuat mereka tidak bisa melakukan tindakan-tindakan politik maupun militer terhadap Israel. Bahkan negara-negara Arab seperti tidak bisa langsung bereaksi atas serangan membabi buta Israel terhadap Gaza. Hal ini tampak saat Mesir yang notabene berbatasan langsung dengan Gaza pun tidak bisa langsung membuka akses perbatasan, walau hanya untuk memberikan bantuan kemanusiaan.

Penutup

Jika hanya melihat dari apa yang tersaji di media, kita mungkin kecewa dengan sikap negara-negara Arab yang sepertinya acuh terhadap krisis yang terjadi di Palestina. Namun jika kita melihat dari sudut pandang Hubungan Internasional, maka sikap negara-negara Arab dapat dikategorikan sebagai tindakan yang rasional. Di dalam rezim *westphalian state system* yang berlaku saat ini membuat setiap negara akan mementingkan kepentingan nasionalnya di atas kepentingan negara lain. Namun dibalik dalih kepentingan nasional yang mengemuka, kita masih bisa melihat bahwasanya negara-negara Arab tidaklah mengacuhkan Palestina karena masih memberikan bantuan ekonomi setiap tahunnya dengan jumlah yang tidak sedikit. Begitu pula dengan posisi Liga Arab yang secara konsisten terus mendukung perjuangan Palestina, walaupun sayangnya belum memiliki dampak yang signifikan.

Referensi

Abdullah, M. F. M., & Gulay, Z. T. (2021, March 3). *Palestinian funding from Arab states down 85% in 2020*. Anadolu Ajansi. https://www.aa.com.tr/en/middle-east/palestinian-funding-from-arab-states-down-85-in-2020/2163509#

Aljazeera. (2009, August 22). *Arafat and Iraq*. Aljazeera. https://www.aljazeera.com/program/plo-history-

of-a-revolution/2009/8/22/arafats-costly-gulf-war-choice

Burchill, S. (2005). *The National Interest in International Relations Theory*. Palgrave.

Chêne, M. (2012). *Overview of Corruption and Anti-Corruption in Palestine*. www.U4.no

Ramahi, S. (2013). *Corruption in the Palestinian Authority*. www.middleeastmonitor.com

Shaban, O. (2022, August 4). *International Aid to the Palestinians: Between Politicization and Development*. Arab Center Washington DC. https://arabcenterdc.-org/resource/international-aid-to-the-palestinians-between-politicization-and-development/

Tartir, A. (2012). *Fatah and Hamas: An Elusive Reconciliation*. Open Democracy; Oneworld. https://eprints.-lse.ac.uk/51804/1/Tartir_Fatah_and_Hamas_2012.pdf

World Population Review. (2023). *Countries that Recognize Israel 2023*. Worldpopulationreview.Com. https://-worldpopulationreview.com/country-rankings/countries-that-recognize-israel

BIODATA PENULIS

Fajri Matahati Muhammadin

Departemen Hukum Internasional, Fakultas Hukum, UGM. Bidang kajian: hukum internasional publik, hukum internasional terkait konflik bersenjata, Islam dan Hukum Internasional, dan hukum internasional Islam. fajrimuhammadin@ugm.ac.id.

Hadza Min Fadhli Robby

Dosen di Departemen Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia sejak tahun 2018. Minat penelitian saya mencakup namun tidak terbatas pada isu-isu seperti agama dan hubungan internasional, pemikiran politik Islam, studi politik Turki, dan studi politik India. hadza.fadhli@uii.ac.id

Hasbi Aswar

Dosen program studi hubungan internasional, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta dan Kordinator nasional Asosiasi Pengkaji Islam dan Hubungan Internasional

(INSIERA-The Indonesian Islamic Studies and International Relations Associations) periode 2022-2026. Tertarik pada isu-isu politik di dunia Islam dan studi gerakan sosial. Bisa dihubungi di email berikut, hasbiaswar@uii.ac.id.

Khairul Munzilin

Pemuda kelahiran Aceh yang saat ini mengajar sebagai dosen Program Studi Hubungan Internasional di Universitas Darussalam Gontor (UNIDA Gontor), Ponorogo. Tertarik pada kajian isu Politik Internasional dan Studi Keamanan Internasional (terkhusus Keamanan Non-Tradisional). Bisa dihubungi melalui email berikut: khairul.munzilin@unida.ac.id/ kmunzilin@gmail.com.

Mohamad Rezky Utama

Universitas Islam Indonesia, Studi Kawasan Timur Tengah,
https://scholar.google.com/citations?user=JsCk6BcAAAAJ&hl=en&oi=ao 08111555204

Pizaro Gozali Idrus

Senior Fellow Asia Middle East Middle East Center for Research and Dialogue yang berbasis di Kuala Lumpur. Pada 2017-2022, Pizaro menjadi redaktur kantor berita Turki Anadolu Agency dan kini jurnalis media internasional yang berbasis di Washington untuk bidang politik, ekonomi, pertahanan, dan lingkungan. Pizaro juga

ketua The Palestine International Forum for Media and Communication cabang Indonesia, organisasi praktisi media global berbasis di Istanbul yang berfokus pada pembebasan Palestina. Selama menjadi jurnalis, ia meliput perang Suriah, konflik Thailand Selatan, perundingan damai Taliban dan pemerintah Afghanistan, dll. Pizaro kini tengah merampungkan Ph.D di Center for Policy Research and International Studies, Universiti Sains Malaysia. Beberapa buku yang ditulis antara lain Kutitipkan Namamu Dalam Doaku: Dari Suriah untuk Indonesia (2013) yang berisi catatan liputan kemanusiaan di Suriah. Pada tahun 2020 yang ditulis bersama Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dengan judul: Ketahanan Kesehatan Bangsa dalam Ancaman?: Perspektif Pandemi Covid-19.

Prihandono Wibowo,

Dosen Prodi Hubungan Internasional UPN "Veteran" Jawa Timur. Memiliki minat pada bidang politik dan keamanan Internasional, studi terorisme, studi kawasan Timur Tengah serta studi geopolitik dan geostrategi. Untuk berkorespondensi dapat melalui prihandono_wibowo.hi-@upnjatim.ac.id.

Ramdhan Muhaimin

Meraih gelar Sarjana di bidang Pemikiran Politik Islam dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dan gelar Master of Social Science (M.Soc.Sc) dari Program Analisa Kajian Strategi dan Keamanan Universitas

Kebangsaan Malaysia. Saat ini mengajar di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Al-azhar Indonesia, dan Universitas Mercu Buana. Tercatat sebagai anggota Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII), dan Asosiasi Pengkaji Islam dan Hubungan Internasional (INSIERA-The Indonesian Islamic Studies and International Relations Associations). Sebelum terjun ke dunia akademik, pernah bekerja sebagai jurnalis di detik.com dan Republika, serta pernah menjadi Tenaga Ahli di Komisi I dan IX DPR RI periode 2014-2019. Beberapa tulisan dan wawancaranya dimuat di sejumlah media seperti Republika, Jurnal Nasional, Kompas, Anadolu Agency, detik.com, dan lainnya. Memiliki minat pada kajian Islam dan HI, Media dan HI, Teori HI, dan Sistem Politik Indonesia. Beberapa publikasinya berjudul *"Sekuritisasi Keamanan Indonesia di Laut Natuna Utara", "Dunia Islam diantara Rivalitas AS dan Tiongkok", "Perbandingaan Posislamisme antara Arab Saudi dan Iran", dan "Diplomasi Vaksin Covid-19 dalam Budaya Anarki Internasional".* Dapat dihubungi melalui ramdhan.muhaimin@uai.ac.id.

Rizki Damayanti

Dosen di Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Paramadina, Jakarta. Bidang kajian yang menjadi fokus perhatiannya adalah Islam dan Hubungan Internasional, Kawasan Eropa, dan isu-isu kontemporer

lainnya dalam Hubungan Internasional. Dapat dihubungi melalui email: rizki.damayanti@paramadina.ac.id

Rizki Dian Nursita

Dosen di Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Indonesia. Dian adalah seorang akademisi yang telah mendalami kajian politik dunia siber dan politik halal global. Jejak akademisnya tercermin melalui sejumlah publikasi yang telah ia hasilkan, termasuk buku dan jurnal. Beberapa di antaranya adalah "Cyberspace: Perdebatan, Problematika, Serta Pendekatan Baru Dalam Tata Kelola Global," "Forecasting the Global Halal Politics in 2022," "Critical Discourse Analysis on Islam Nusantara in Indonesia's Foreign Policy," dan "Industri Halal Indonesia Menuju Pasar Global." Dian juga terbuka untuk menerima saran, kritik, atau tawaran kolaborasi, dan Anda dapat menghubunginya melalui alamat email rizki.dian.nursita@uii.ac.id.

Rizky Hikmawan

Pengajar Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ). Beliau memiliki ketertarikan pada kajian Teori dan Sejarah Hubungan Internasional, Studi Regionalisme, serta Islam dan Hubungan Internasional. Untuk berkorespondensi dengan beliau bisa melalui email: rizkyhikmawan@upnvj.ac.id.

Rizki Rahmadini Nurika

Dosen di Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Ampel Surabaya. Rizki memiliki minat pada kajian Diplomasi, Resolusi Konflik, dan Ekonomi Politik. Rizki dapat dihubungi melalui nomor handphone 085648835555 atau e-mail rr.nurika@uinsa.ac.id

Unis Sagena

Biasa dipanggil Unis, adalah dosen Prodi Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur. Konsentrasi kajian meliputi studi keamanan dan strategi internasional, khususnya isu energi, baik tradisional pun non-tradisional. Unis juga menulis esai isu perempuan dan anak, aktif dalam komunitas literasi, editor bersertifikasi, yang sesekali menulis puisi. Bisa dihubungi melalui kontak 082158286440, email: unisku@unmul.ac.id